IMPLEMENTASI PROGRAM COREMAP II DI KABUPATEN BUTON: MANFAAT DAN PERUBAHAN PENDAPATAN MASYARAKAT

PUSAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN KEBUDAYAAN * LIPI *

LAILA NAGIB
GUSTI AYU KETUT SURTIARI
ARY WAHYONO
ANDY AHMAD ZAELANI

LEUSER CITA PUSTAKA
LIPI
COREMAP-LIPI

IMPLEMENTASI PROGRAM COREMAP II DI KABUPATEN BUTON: MANFAAT DAN PERUBAHAN PENDAPATAN MASYARAKAT

Penulis :
Laila Nagib
Gusti Ayu Ketut Surtiari
Ary Wahyono
Andy Ahmad Zaelani

Layout :
Puji Hartana

Desain Cover :
Puji Hartana

ISBN :
978-602-8942-58-4

PMB Tgl. : 20-3-2012 No. : 46/2012

LEUSER CITA PUSTAKA

PT. LEUSER CITA PUSTAKA (Anggota IKAPI)
Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 16, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510
Telp. (021) 7810076, Fax: (021) 7810076

Bekerjasama dengan

LIPI COREMAP-LIPI

Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI dan COREMAP-LIPI
Jln. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430
Telp. 62-21-64713850, Fax: 62-21-64711948
Website: http://oseanografi.lipi.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Buku dengan judul Implementasi Program COREMAP di Kabupaten Buton : Catatan Kritis merupakan buku yang disusun dari hasil kajian terhadap program COREMAP fase kedua yang sudah akan berakhir di Kabupaten Buton. Oleh karena itu penting untuk memberikan beberapa catatan kritis terhadap pelaksanaan program khususnya sejak tahun 2006 hingga tahun 2011. Penekanan program pada Fase II adalah mengelola dan melindungi sumber daya laut, khususnya terumbu karang. Sehingga diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut COREMAP menerapkan beberapa program peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu berupa dana bergulir untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dan juga pembangunan sarana dan prasarana penunjangnya selain peningkatan kesadaran akan kelestarian terumbu karang.

Hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para stakehoder untuk perbaikan program selanjutnya, serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi keberhasilan COREMAP di wilayah ini dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Indikator keberhasilan COREMAP dari aspek sosial ekonomi adalah: 1) Total pendapatan anggota pokmas yang mendapat dana bergulir naik sebesar 10 persen pada akhir program, 2) Paling sedikit 70 persen dari nelayan/penerima manfaat di lokasi program mempunyai persepsi bahwa COREMAP mempunyai dampak positif terhadap kesejahteraannya.

Hasil kajian menunjukkan bahwa hal yang paling nyata dari pelaksanaan program COREMAP adalah adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya terumbu karang dan sumber daya laut lainnya. Sementara itu, perubahan

pendapatan rumah tangga di lokasi kajian dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor alam yaitu perubahan musim yang semakin tidak menentu, sehingga berpengaruh terhadap populasi ikan khususnya ikan teri di Desa Terapung; akses pasar di kedua lokasi; keragaman hasil laut baik jenis maupun jumlah; alternatif kegiatan ekonomi selain kenelayanan seperti budidaya rumput laut di Mawasangka dan pertambangan pasir di Kadatua; adanya kebiasaan merantau masyarakat nelayan pada saat musim gelombang kuat terutama dari Kadatua dan adanya inflasi.

Terselesainya buku ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terkait seperti CRITIC-LIPI, Pusat Penelitian Oseanografi dan pemerintah daerah Kabupaten Buton serta seluruh komponen yang terkait di dalamnya yang telah memberikan ijin penelitian dan dengan senang hati memberikan data dan informasi yang dibutuhkan serta masyarakat di dua lokasi penelitian yang sudah memberikan berbagai informasi pada tingkat lokal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Selain itu ucapan terima kasih kami juga layangkan kepada para peneliti dan staff pendukung serta teknis yang telah bekerja keras, dari perencanaan penelitian hingga selesainya penulisan laporan ini.

Buku ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, baik dari segi substansi maupun dari sisi format meski para penulis dan teknisi telah berusaha secara maksimal. Untuk itu kami penulis mengharap saran-saran yang membangun guna penyempurnaan laporan ini.

Jakarta, Desember, 2011

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		v
DAFTAR TABEL		vii
DAFTAR GRAFIK		xi
DAFTAR GAMBAR DAN SKEMA		xiii
BAB I	IMPLEMENTASI PROGRAM COREMAP DI KABUPATEN BUTON : CATATAN KRITIS	1
	1.1. Pengantar	1
	1.2. Pendekatan Penelitian	5
	1.3. Perkembangan Pelaksanaan COREMAP Di Kabupaten Buton (2006-2011)	7
BAB II	KONDISI SOSIAL-EKONOMI DAN PERUBAHAN PENDAPATAN MASYARAKAT	13
	2.1. Kegiatan Ekonomi	13
	2.2. Gambaran Pendapatan Masyarakat	17
	2.2.1. Pendapatan Rumah Tangga Dan Perkapita	18
	A. Kecamatan Mawasangka	19
	B. Kecamatan Kadatua	26
	2.2.2. Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan	31
	A. Kecamatan Mawasangka	31
	B. Kecamatan Kadatua	42

BAB III DANA BERGULIR (*SEED FUND*) DAN PERUBAHAN PENDAPATAN MASYARAKAT 51
3.1. Kegiatan Seed Fund (Dana Bergulir) 54
A. Kecamatan Mawasangka 54
B. Kecamatan Kadatua 76
3.2. Perkembangan Pendapatan Penerima Dana Bergulir COREMAP 96
A. Perkembangan Pendapatan Di Kecamatan Mawasangka 96
B. Perkembangan Pendapatan Di Kecamatan Kadatua 101
C. Perkembangan Pendapatan Di Kabupaten Buton 105

BAB IV INTERVENSI PROGRAM COREMP : PEMBERDAYAAN UNTUK REHABILITASI TERUMBU KARANG 109
4.1. Masyarakat Dan Intervensi COREMAP 111
4.2. *Block Grant* 112
4.3. Pengawasan dan DPL 119
4.4. Persepsi Masyarakat Tentang Manfaat COREMAP 121

BAB V PENUTUP 125
5.1. Kesimpulan 125
5.2. Temuan Pokok dari Hasil Kajian 125

DAFTAR PUSTAKA 139

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Tutupan terumbu karang hidup di kabupaten Buton Tahun 2006 – tahun 2011	2
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Tahun 2009	5
Tabel 2.1.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan Kec. Mawasangka Kab. Buton Tahun 2006, 2008 , 2011	19
Tabel 2.2.	Distribusi RT Menurut Kelompok Pendapatan Rata-rata Per Bulan di Kec. Mawasangka, Kab. Buton Tahun 2006, 2008, 2011	25
Tabel 2.3.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan, Kec. Kadatua Kab. Buton Tahun 2006, 2008 , 2011	26
Tabel 2.4.	Distribusi RT Menurut Kelompok Pendapatan Per Bulan di Kec. Kadatua Kab. Buton Tahun 2006, 2008 , 2011	30
Tabel 2.5.	Pendapatan Per Kapita Rumah Tangga Dengan Memperhatikan Faktor Inflasi, Kedua Lokasi Kajian, Kab. Buton, Tahun 2008, 2011.	31
Tabel 2.6.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan, Kec. Mawasangka, Kab. Buton Tahun 2006, 2008, 2011 (Gabungan 3 Musim)	32

Tabel 2.7.	Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Dan Perubahannya, Kec. Mawasangka, Tahun 2006, 2008, 2011	40
Tabel 2.8.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan, Kec. Kadatua Kab. Buton Tahun 2006, 2008 , 2011 (Gabungan 3 musim)	43
Tabel 2.9:	Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Dan Perubahannya, Kec. Kadatua, Tahun 2006, 2008, 2011	47
Tabel 3.1.	Besarnya Dana Bergulir yang Dipinjam Di Kecamatan Mawasangka	60
Tabel 3.2.	Pemanfaatan Dana Bergulir Di Kecamatan Mawasangka	61
Tabel 3.3.	Kondisi Usaha yang Memanfaatkan Dana Bergulir	63
Tabel 3.4.	Matrik Perkembangan Pelaksanaan Dana Bergulir (*Seed Fund*) di Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tahun 2011	71
Tabel 3.5.	Pemanfaatan Dana Seed fund di Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka	72
Tabel 3.6.	Matrik Perkembangan Pelaksanaan Dana Bergulir (*Seed Fund*) di Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tahun 2011	75

Tabel 3.7.	Besarnya Dana Bergulir yang Dipinjam Di Kecamatan Kadatua	79
Tabel 3.8.	Pemanfaatan Dana Bergulir Di Kecamatan Kadatua	82
Tabel 3.9.	Matrik Perkembangan Pelaksanaan Dana Bergulir (*Seed Fund*) di Desa Kapoa, Kabupaten Buton Tahun 2011	86
Tabel 3.10.	Matrik Perkembangan Pelaksanaan Dana Bergulir (*Seed Fund*) di Desa Wauno, Kecamatan Kadatua , Kabupaten Buton Tahun 2011	89
Tabel 3.11.	Kondisi Usaha yang Memanfaatkan Dana Bergulir di Kecamatan Kadatua	95
Tabel 3.12.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir (*Seed Fund*) di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten ButonTahun 2008 dan 2011	97
Tabel 3.13.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir (*Seed Fund*) di Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Tahun 2008 dan 2011	102
Tabel 3.14	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir (*Seed Fund*) Sebelum dan Setelah Inflasi di Kabupaten Buton, Tahun 2008 dan 2011	106
Tabel 4.1.	Bentuk Bantuan *Village Grant* di Buton	113

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Perkembangan Rata-rata Pendapatan RT dan Per Kapita di Kec. Mawasangka, 2006, 2008 dan 2011	21
Grafik 2.2.	Perkembangan Pendapatan Rata-rata RT dan Per Kapita di Kec. Kadatua, 2006, 2008 dan 2011	28
Grafik 2.3.	Distribusi RT Menurut Kelompok Pendapatan Rata-rata Per Bulan dari Kegiatan Kenelayanan, Kec. Mawasangka, Kab. Buton Tahun 2006, 2008 , 2011	37
Grafik 2.4.	Perkembangan Pendapatan Rata-rata RT Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim di Kecamatan Mawasangka, Buton, 2006, 2008, 2011 (Persen)	41
Grafik 2.5.	Distribusi RT Menurut Kelompok Pendapatan Rata-rata Per Bulan dari Kegiatan Kenelayanan, Kec. Kadatua, Kab. Buton Tahun 2006, 2008 , 2011	45
Grafik 2.6.	Perkembangan Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim di Kecamatan Kadatua, Buton (Persen), 2006, 2008, 2011	49
Grafik 3.1.	Perkembangan Usaha Setelah Mendapatkan Dana Bergulir Di Kecamatan Mawasangka	64

Grafik 3.2.	Perkembangan Hasil Usaha Setelah Mendapat Dana Bergulir di Kecamatan Mawasangka	65
Grafik 3.3.	Distribusi Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir Menurut Kelompok Pendapatan di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tahun 2006, 2008 dan 2011	99
Grafik 3.4.	Distribusi Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir Menurut Kelompok Pendapatan Perkapita di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tahun 2008 dan 2011	99
Grafik 3.5.	Distribusi Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir Menurut Kelompok Pendapatan di Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Tahun 2008 dan 2011	103
Grafik 3.6.	Distribusi Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir Menurut Kelompok Pendapatan Perkapita di Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Tahun 2008 dan 2011	104
Grafik 4.1.	Keterlibatan Reponden dalam Pengelolaan Berbasis Masyarakat	112
Grafik 4.2.	Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan	120
Grafik 4.3.	Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat COREMAP	122
Grafik 4.4.	Persepsi Masyarakat terhadap Manfaat COREMAP di Kecamatan Mawasangka	124

DAFTAR GAMBAR DAN SKEMA

Gambar 2.1.	Ibu Dan Anak Bekerja Memanen Rumput Laut	23
Gambar 2.2.	Anak-Anak Mengangkat Batu Kerikil	27
Gambar 2.3.	Kepiting Yang Sudah Diolah	34
Skema 2.1.	Prosedur Peminjaman Dana Bergulir COREMAP	52
Gambar 4.1.	Balai Pertemuan yang tidak Selesai dibangun	116
Gambar 4.2.	Bantuan Taman Bermain di Desa Kapoa	117

BAB I
IMPLEMENTASI PROGRAM COREMAP DI KABUPATEN BUTON: CATATAN KRITIS

1.1. Pengantar

Kegiatan kenelayanan yang mengancam kelestarian sumberdaya laut disebut sebagai *exploitive fishing*, yang terdiri dari dua kategori yakni *destructive fishing* dan *over fishing (The Coral Reef Alliance*, 2003). *Destructive fishing* sudah lama menjadi salah satu bentuk praktek kenelayanan di Indonesia , dan telah memberikan kontribusi yang besar pada kerusakan terumbu karang di berbagai wilayah perairan Indonesia.

Hasil pengamatan di wilayah perairan Kabupaten Buton dan sekitarnya, menunjukkan bahwa praktek yang cenderung merusak ekosistem terumbu karang telah terjadi dalam waktu lama. Hal ini dibuktikan dengan berbagai hasil pengamatan tentang kondisi terumbu karang di wilayah ini yang mengalami degradasi dengan tingkat kerusakan yang bervariasi. Hasil survei ekologi Pusat Penelitian Oseanografi LIPI pada tahun 2005, mengungkapkan bahwa kondisi karang di Kabupaten Buton tergolong dalam kategori 'sedang'. Menurut hasil pengamatan RRI di 32 stasiun, persentasi rata-rata tutupan karang hidup hanya sekitar 29,8 persen (P2O-LIPI, 2005).

Adanya kegiatan COREMAP di wilayah Kabupaten Buton, seharusnya membawa perbaikan terhadap ekosistem di wilayah perairan sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak. Namun, pertumbuhan terumbu karang tidaklah bisa cepat dan membutuhkan waktu yang lama. Pemulihan kondisi terumbu karang seperti semula, memerlukan waktu lama dan perencanaan yang komprehensif, dengan melibatkan semua stakeholder terkait. Masih lambannya pemulihan

kondisi terumbu karang terutama di Kawasan Mawasangka juga menunjukkan masih tingginya *overfishing* di daerah tersebut, meskipun menurut banyak informasi sudah jauh berkurang dibandingkan kondisi sebelumnya. Sementara, kondisi terumbu karang di kecamatan Kadatua secara kualitatif lebih baik, karena "tekanan" terhadap terumbu karang menurun pesat dengan lebih intensifnya penduduk beralih ke pekerjaan dagang.

Kini, setelah implementasi COREMAP di kabupaten Buton diperkirakan telah terjadi perbaikan tutupan terumbu karang di 80 % area percontohan. Pertumbuhan tutupan terumbu karang di perairan kabupaten ini dari periode tahun 2006 – tahun 2011 sekitar 18 % dan khususnya pada daerah perlindungan laut (*sanctuary area*) mencapai 27 % sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Tutupan Terumbu Karang Hidup di Kabupaten Buton Tahun 2006–Tahun 2011

Tutupan Terumbu Karang Hidup	2006	2007	2009	2010	2011	% pertambahan
Titik-Titik Pengamatan LIPI	34	36	38	30	41	18%
Daerah Perlindungan Laut	32	30	37	41	NDY	27%

Sumber : PMA August 2011 *Monthly Report*

Kabupaten Buton merupakan salah satu wilayah binaan COREMAP Fase II yang pendanaannya berasal dari Bank Dunia (World Bank). Di wilayah Kabupaten Buton terdapat 7 dari 17 kecamatan yang merupakan daerah binaan COREMAP, yaitu Kecamatan Mawasangka, Kadatua, Siompu, Wabula, Siontapina, Talaga, dan Losalimu. Studi dasar sosial ekonomi pada umumnya telah dilakukan di wilayah ini pada tahun 2006, termasuk di Kecamatan Mawasangka dan Kadatua, yang juga merupakan sampel

kajian BME Sosial Ekonomi untuk Kabupaten Buton pada tahun 2008 dan tahun 2011 ini.

Tujuan program COREMAP Fase II, terutama menekankan pada terciptanya pengelolaan ekosistem terumbu karang, agar sumber daya laut dapat direhabilitasi, diproteksi dan dikelola secara berkelanjutan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di lokasi COREMAP. Untuk mencapai tujuan ini, maka program COREMAP menekankan pada Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM) sebagai fokus utama kegiatan programnya. Implementasi program COREMAP Fase II di dua wilayah kajian yaitu Kecamatan Mawasangka dan Kadatua, Kabupaten Buton, telah memberi pelajaran penting, bahwa keterlibatan seluruh *stakeholders* dalam pengelolaan terumbu karang sangat diperlukan terutama untuk membantu mencegah kerusakan karang lebih lanjut dan upaya pelestariannya. Pantai yang sangat panjang dan laut yang luas di wilayah ini dengan keterbatasan jumlah petugas dan sarana yang dimiliki, memerlukan keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh *stakeholders*, khususnya masyarakat setempat dalam menjaga, mengelola dan melindungi sumber daya lautnya.

Selain melanjutkan beberapa kegiatan sebelumnya, juga dilakukan akselarasi program-program yang sesuai dengan kondisi daerah. Penekanan program COREMAP Fase II adalah mengelola dan melindungi sumber daya laut, khususnya terumbu karang. Studi *Benefit Monitoring Evaluation* (BME) sosial ekonomi pada tahun 2011 ini merupakan lanjutan dari studi-studi sebelumnya yaitu Studi Dasar Sosial Ekonomi tahun 2006 (T0), dan studi BME tahun 2008 (T1), dan tahun 2009 (T2) yang semuanya dilakukan di wilayah sampel yang sama yaitu Desa Terapung dan Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka, serta Desa Kapoa dan Desa Waonu, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton.

Studi BME pada tahun 2011 secara umum bertujuan untuk melakukan evaluasi akhir terhadap perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan COREMAP Fase II. Secara khusus studi ini bertujuan untuk :

1) Mengkaji perkembangan pelaksanaan kegiatan COREMAP di daerah dan lokasi kajian.

2) Mengevaluasi perkembangan pendapatan masyarakat selama COREMAP Fase II dan keterkaitannya dengan capaian indikator keberhasilan dari aspek sosial ekonomi.

3) Mengevaluasi peningkatan pendapatan anggota kelompok masyarakat yang menerima dana bergulir (*project beneficiarry group members*) sesuai dengan indikator keberhasilan sosial ekonomi.

4) Mengevaluasi persepsi masyarakat tentang manfaat dan dampak kegiatan COREMAP terhadap kesejahteraannya.

Penekanan program pada Fase II adalah mengelola dan melindungi sumber daya laut, khususnya terumbu karang. Studi BME pada tahun 2011 ini memfokuskan pada evaluasi program COREMAP, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Tulisan ini merupakan hasil kajian BME di lokasi tersebut, sebagai bagian dari evaluasi kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan program COREMAP di wilayah ini. Hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para stakehoder untuk perbaikan program selanjutnya, serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi keberhasilan COREMAP di wilayah ini dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Adapun indikator keberhasilan COREMAP dari aspek sosial ekonomi yang sudah diperbaharui adalah: 1) Total pendapatan anggota pokmas yang mendapat dana bergulir naik sebesar 10 persen pada akhir program, 2) Paling sedikit 70 persen dari nelayan/penerima

manfaat di lokasi program mempunyai persepsi bahwa COREMAP mempunyai dampak positif terhadap kesejahteraannya.

1.2. Pendekatan Penelitian

Studi BME tahun 2011 merupakan evaluasi akhir program COREMAP Fase II di Kabupaten Buton. Untuk itu survei dilakukan di lokasi yang sama dengan lokasi kajian sebelumnya yaitu Kecamatan Mawasangka dan Kadatua. Demikian pula untuk lokasi penelitiannya, kembali ke desa binaan pada masing-masing kecamatan yaitu Desa Terapung dan Wakambangura di Kecamatan Mawasangka, dan Desa Waonu dan Desa Kapoa di Kecamatan Kadatua.

Dinamika penduduk di Kecamatan Kadatua dan Mawasangka lebih dipengaruhi oleh mobilitas penduduk keluar, terutama ke Malaysia. Migrasi ke Malaysia maupun ke kota-kota lainnya (khususnya ke Provinsi Maluku dan Provinsi Papua) banyak dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Mawasangka dan Kadatua, yaitu penduduk usia produktif untuk mencari pekerjaan. Menjadi TKI illegal di Malaysia dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Pada saat musim barat atau musim angin kencang mereka pergi ke Malaysia dan musim angin Timur sebagian pulang kembali untuk turun ke laut, melakukan kegiatan kenelayanan.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2009

Desa/Kelurahan	Luas(km2)	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Kepadatan Penduduk
Kecamatan Kadatua				
Desa Waonu	1,76	489	481	551
Desa Kapoa	2,51	524	525	418
Kecamatan Mawasangka				
Desa Terapung		1,477	1,390	287
Desa Wakamba-ngura	4.44	924	1,046	444

Sumber : - Kecamatan Kadatua dalam Angka, 2010
- Kecamatan Mawasangka dalam Angka 2010

Studi ini mengambil sampel dua kecamatan yang meliputi daerah kepulauan yaitu Kecamatan Kadatua dan daerah pesisir (darat) yaitu Kecamatan Mawasangka. Kecamatan Kadatua terletak sekitar 40 mil dari Kota Bau-Bau, atau sekitar 15 menit dengan transportasi laut dari Pelabuhan Topa. Wilayah Kecamatan Kadatua merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Batauga pada tahun 2000. Sedangkan Kecamatan Mawasangka terletak di kawasan barat Kabupaten Buton atau tepatnya di sebelah barat daya Pulau Muna. Untuk mencapai wilayah ini relatif mudah karena tersedia sarana dan prasarana transportasi darat maupun laut. Cara mencapai lokasi termudah adalah melalui transportasi laut dari Pelabuhan Batulo di Kota Baubau ke Pelabuhan Wamengkoli yang ditempuh selama 15 menit dengan kapal feri yang tersedia setiap setengah jam sampai pukul 7 malam. Sedangkan perjalanan dari Pelabuhan Wamengkoli ke Kecamatan Mawasangka ditempuh sekitar 2 jam dengan transportasi darat yang tersedia secara reguler setiap hari.

Sasaran kajian adalah 100 rumah tangga sampel untuk masing-masing kecamatan, yaitu responden yang sama dengan responden pada kajian sebelumnya pada tahun 2006, tahun 2008 dan tahun 2009. Pada kajian tahun 2008 (T1), sasaran survei juga mencakup anggota POKMAS UEP, sehingga jumlah rumah tangga sampel dapat bertambah sampai maksimal 30 rumah tangga, apabila dalam target 100 rumah tangga sampel belum mencakup variasi anggota POKMAS. Pemilihan sampel anggota POKMAS diupayakan mencakup berbagai kelompok kegiatan UEP yang ada di lokasi kajian. Apabila dalam 100 rumah tangga sampel sudah terdapat cukup anggota POKMAS (30 anggota penerima dana UEP), maka tambahan rumah tangga sampel hanya untuk memperoleh variasi kegiatan UEP.

1.3. Perkembangan Pelaksanaan COREMAP Di Kabupaten Buton (2006-2011)

Sejak tahun 2004 Kabupaten Buton merupakan salah satu dari wilayah binaan COREMAP Fase II, dengan sumber pendanaan dari World Bank. Sebelumnya program COREMAP Fase 1 untuk Kabupaten Buton dilakukan pada tahun 2003, oleh ADB-MCRMP dengan daerah binaan Kecamatan Lakudo. Pada awal-awal kegiatan COREMAP di Kabupaten Buton penentuan daerah binaan COREMAP II terdiri dari 7 kecamatan yaitu 5 kecamatan di Kawasan Barat dan 2 kecamatan di Kawasan Timur. Dari setiap kecamatan ditentukan empat desa binaan COREMAP, sehingga desa binaan berjumlah 28. Penentuan daerah binaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati, dengan mengutamakan daerah yang tertinggal. Daerah kepulauan pada umumnya lebih tertinggal dibandingkan daerah pesisir. Sementara itu, daerah binaan COREMAP II mencakup 5 kecamatan di daerah pesisir (daratan) dan 2 kecamatan di daerah kepulauan.

Ketika COREMAP mulai diperkenalkan, banyak kendala yang dihadapi, seperti banyak program yang tumpang tindih; sistem birokrasi yang kurang fleksibel, sehingga penyerapan dana untuk melakukan aksi relatif rendah (tingkat penyerapan dana baru mencapai 13%); banyak program dana bergulir untuk masyarakat di Buton gagal pengembaliannya, antara lain penerima dana bergulir tidak selamanya tinggal di desa, karena merantau ke daerah lain. Banyak nelayan dari daerah binaan yang mobilitasnya tinggi, dan tinggal berbulan-bulan di rantau, sehingga sulit untuk terlibat dalam berbagai program COREMAP. Untuk mengatasi masalah, pengurus COREMAP seharusnya penduduk yang menetap di lokasi seperti PNS, agar lebih fokus dalam mengelola program COREMAP di wilayah binaan.

Anggaran untuk pelaksanan kegiatan/program COREMAP di Buton selalu naik dalam setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran program COREMAP selama 3 tahun, adalah sebagai berikut: Rp. 1.093.734.636 (2005), Rp. 3.220.207,- (2006) dan Rp. 8.553.147.318,- (2007). Anggaran ini digunakan untuk membiayai komponen program/kegiatan COREMAP, yakni CRITC, *Community Awareness*, MCS, dan CBM. Masing-masing komponen COREMAP memiliki program atau kegiatan yang saling mendukung yang muaranya untuk mendukung keberhasilan pengelolaan terumbu karang. Masing-masing program dan kegiatan tentu saja memiliki target sasaran yang berbeda. Di lihat dari perspektif masyarakat, paling tidak kegiatan COREMAP yang meliputi kegiatan *village grant*, Publik Awarness, dan Pengawasan telah dinilai cukup baik oleh warga masyarakat. Dari survai terhadap 250 warga desa di lokasi penelitian COREMAP di Buton sekitar 88,8 persennya mengemukakan kegiatan-kegiatan COREMAP tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat.

PMU COREMAP kabupaten adalah instrumen kebijakan COREMAP nasional. PMU COREMAP kabupaten harus menjabarkan kebijakan COREMAP nasional di daerah, atau dengan kata lain kebijakan PMU COREMAP Buton merupakan jabaran dari kebijakan COREMAP di tingkat nasional. Tetapi disisi lain, PMU COREMAP Buton juga berkewajiban melaporkan kebijakan pengelolaan termubu karang yang ditempuh kepada Bupati Buton. Jadi dengan demikian, PMU COREMAP merupakan pusat pengendalian pelaksanaan program COREMAP di Buton, yang dalam merumuskan kebijakan harus memperhatikan kebijakan nasional dan masukan dari dari instansi teknis, dan juga kelembagaan terkait lain yang dibentuk di daerah.

PMU COREMAP memiliki struktur sendiri, yang tidak sama dengan struktur dinas teknis di lingkungan pemerintah daerah. Jadi,

secara kelembagaan PMU COREMAP kabupaten merupakan tangan panjang dari COREMAP pusat walaupun personilnya berasal dari karyawan Pemda. PMU COREMAP Buton, disatu sisi harus menjabarkan kebijakan COREMAP nasional, dan di sisi lain PMU COREMAP Buton merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pemerintah daerah kabupaten Buton. Posisi kelembagaan PMU COREMAP yang demikian kemungkinan dapat berpengaruh terhadap kinerja implementasi program COREMAP. Keterlambatan pemberian gaji SETO dan CF adalah persoalan yang sering terjadi dan tentu hal ini berpengaruh terhadap kinerja mereka, antara lain jarang ditemui di lokasi desa binaannya. Ketidakaktifan SETO danCF membuat resah aktivis COREMAP di lapangan. Kebijakan rotasi SETO dan CF dari COREMAP Buton cukup membingungkan masyarakat di desa binaan. Ada juga informasi jika di masa mendatang jumlah SETO akan dikurangi. Informasi seperti ini belum sampai ke masyarakat dan tampaknya mengganggu pelaksanaan COREMAP di lapangan.

Problem koordinasi yang dihadapi PMU COREMAP kabupaten Buton di dalam menjalankan kebijakan COREMAP tampaknya tidak dapat dilepaskan posisi jabatan PMU COREMAP yang tidak dipegang langsung kepala dinas, walaupun secara kepegawaian personal yang menjabat PMU di bawah kepala dinas teknis tetapi dalam realitasnya PMU COREMAP dapat langsung berhubungan dengan instansi teknis lain karena secara struktural bukan dinas teknis pemda. PMU COREMAP memiliki struktur terpisah dengan struktur dinas teknis terkait dan memiliki posisi yang kuat dalam konteks pelaksanaan program COREMAP. PMU COREMAP, disamping institusi yang melaksanakan tugas-tugas COREMAP dari pusat di daerah, juga melakukan koordinasi dengan instansi teknis di daerah. Di era otonomi daerah seperti sekarang, jika PMU COREMAP bertindak seperti instansi pusat yang menjalankan tugasnya di daerah tentu selalu menghadapi persoalan koordinasi dengan instansi teknis lain

yang otonom. Hal ini disebabkan program COREMAP yang dianggap "sentralisasi" ini atau di lihat sebagai program pemerintah pusat, tentu akan menjadi problem keberlanjutan jika program COREMAP ini selesai.

Ada beberapa catatan tentang pelaksanaan COREMAP:

Pertama, tingkat keberhasilan membangun kelembagaan yang ditunjukkan aktivitas warga dalam aktivitas kelembagaan pada program kegiatan konservasi dapat dikatakan sangat kecil. Aktivitas kelembagaan yang tidak banyak direspon warga masyarakat terjadi terutama pada pembentukan LPSTK, Penyusunan RPTK dan kegiatan POKMAS Konservasi. Kecenderungan ini terjadi di Mawasangka maupun di Kadatua. Namun, terdapat aktivitas kelembagaan dalam pengembangan DPL yang direspon warga masyarakat sekalipun hal ini terjadi hanya di Kadatua.

Kedua, keterlibatan warga di lokasi penelitian pada kegiatan-kegiatan usaha ekonomi produktif yang sangat rendah. Hasil penelitian pada tahun 2009 telah memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan berbasis masyarakat di Kadatua lebih besar dibandingkan dengan Mawasangka terutama kegiatan *Village Grant*, LKM, Pokmas, Pokwasmas dan Pokmas usaha. Pada hasil survey tahun 2011, terjadi kecenderungan yang hampir sama yaitu keterlibatan masyarakat kurang. Kecenderungan ini terjadi karena pengurus LKM menghadapi dilema dalam penyaluran dana bergulir. Pengurus LKM dan LPSTK mengakomodasi dua pilihan antara memilih peminjam yang diperkirakan bisa mengembalikan dan yang sulit mengembalikan tetapi memerlukan dana tersebut.

Ketiga, Salah satu bentuk pengelolaan berbasis masyarakat adalah program *village grant*. Pembangunan fisik ini rawan pemotongan. Menurut informasi seorang kepala desa bahwa kegiatan fisik seringkali dilakukan pemotongan.Pemotongan terjadi ketika uang

turun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan PNPM, pembangunan fisik yang dibangun COREMAP tidak disertai gambar desain sehingga menyulitkan bagi pemborong.

Keempat, kegiatan pengawasan tidak banyak melibatkan warga masyarakat baik pada pembentukan LPSTK, Penyusunan RPTK dan kegiatan POKMAS Konservasi. Kecenderungan ini terjadi di Mawasangka maupun di Kadatua. Namun demikian, terdapat aktivitas kelembagaan dalam pengembangan DPL yang direspon warga masyarakat sekalipun hal ini terjadi hanya di Kadatua. Di Kadatua ternyata lebih berhasil mengembangkan DPL dibandingkan Mawasangka dilihat menurut keterlibatan penduduk.

PUSAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN KEBUDAYAAN * LIPI *

BAB II
KONDISI SOSIAL–EKONOMI DAN PERUBAHAN PENDAPATAN MASYARAKAT

Kegiatan ekonomi masyarakat sangat erat kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya yang tersedia di lokasi dan sekitarnya. Bagi masyarakat yang hidupnya tergantung dengan pengelolaan sumberdaya laut, maka kegiatan ekonomi sering dikaitkan dengan kerusakan ekosistem yang terjadi. Berbagai praktek kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan alat tangkap yang merusak terumbu karang dianggap sebagai biang keladi kerusakan terumbu karang yang terjadi. Untuk mengurangi kerusakan ekosistem diupayakan kegiatan ekonomi alternatif yang dapat menambah penghasilan masyarakat, sehingga kerusakan tidak terus berlangsung. Berbagai studi menunjukkan bahwa kerusakan sumberdaya kelautan dipicu oleh motivasi para aktornya yaitu keserakahan dan kemiskinan, yang berdampak pada berbagai kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan. Hal ini dipicu oleh keinginan pelaku ekonomi untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin atau bagi kelompok miskin sebagai cara untuk tetap bertahan. Bagian ini terutama menekankan pada uraian tentang dinamika kegiatan ekonomi masyarakat terkait dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi di daerah tersebut (COREMAP maupun non-COREMAP) serta gambaran pendapatan masyarakat dan perubahan-perubahannya terkait berbagai program yang terdapat di lokasi kajian.

2.1. Kegiatan Ekonomi

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Buton memiliki potensi perikanan yang besar dan merupakan sentra perikanan bagi Kawasan

Sulawesi Tenggara. Kegiatan ekonomi masyarakat terkait dengan perikanan laut tersebar di semua kecamatan dan merupakan mata pencaharian pokok penduduk di kawasan ini. Bahkan Buton telah memiliki pelabuhan internasional yang cukup besar di Kecamatan Wajo (sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Buton). Demikian pula keberadaan perusahaan perikanan terbesar di Buton yang juga berlokasi di Pasar Wajo, mampu menampung sebagian hasil tangkapan ikan dan sekaligus sebagai pengekspor berbagai jenis hasil tangkapan ikan yang telah diawetkan ke berbagai Negara. Kegiatan kenelayanan yang dominan di berbagai wilayah ini didukung oleh berbagai sarana dan prasarana alat tangkap yang umumnya dimiliki oleh nelayan individual dan/atau kelompok kecil.

Berdasarkan perkembangan alat tangkap yang terdapat di Kabupaten Buton dapat disimpulkan terdapat 5 jenis alat tangkap yaitu : jaring insang hanyut, jaring insang tetap, pancing tonda, pancing ulur dan bubu (COREMAP-LIPI dan PPK-LIPI, 2008). Demikian pula prasarana alat tangkap mengalami perkembangan sejalan dengan membaiknya ekonomi mereka. Hal ini berdampak pada kurang berpengaruhnya musim untuk pergi melaut pada waktu gelombang kuat, karena dengan sarana dan prasarana alat tangkap yang lebih baik, jangkauan wilayah tangkap nelayan lebih luas, sehingga dapat memperoleh hasil tangkapan yang jenisnya bervariasi dan jumlahnya lebih banyak. Meskipun kedua lokasi kajian cukup dominan dalam kegiatan kenelayanan, namun masing-masing daerah mempunyai kekhasan jenis tangkapannya. Ikan teri merupakan hasil andalan nelayan di Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka. Pada musim ikan teri, hasilnya melimpah ruah sehingga setelah mengalami proses pengeringan maupun pengasinan di lokasi, pemasaran hasil olahan cukup luas ke kota-kota besar di Jawa maupun kawasan Indonesia Timur. Besarnya hasil tangkapan yang diperoleh nelayan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yang cukup menonjol

adalah pengaruh musim, sehingga hasil tangkapan sangat fluktatif sepanjang tahun. Sebagian nelayan di lokasi survei merasakan musim sudah berubah yang menyebabkan musim gelombang kuat lebih panjang dibandingkan dengan musim gelombang tenang. Pada saat penelitian ini berlangsung, masyarakat nelayan umumnya mengeluh karena hasil tangkapan teri dalam setahun terakhir menurun tajam, sehingga banyak penampung teri yang beralih usaha atau merantau untuk berdagang. Hal ini dianggap sebagai krisis ekonomi di wilayahnya, karena berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi lainnya baik terkait langsung dengan kenelayanan (seperti papa lele dan industri pengolahan teri) maupun tidak langsung (seperti pedagang, warung sembako dan usaha lainnya). Akibatnya pendapatan masyarakat nelayan dan daya beli masyarakat pada umumnya menurun, yang pada gilirannya mengganggu dinamika ekonomi di daerah ini. Selain jenis ikan teri, beberapa jenis ikan lainnya seperti kepiting cukup membantu nelayan karena hasilnya sepanjang tahun, sehingga dapat menjadi alternatif pendapatan pada waktu sulit ikan teri. Hasil olahan kepiting dipasarkan ke kota besar, bahkan menjadi komoditi ekspor yang cukup menguntungkan bagi masyarakat nelayan.

Kegiatan ekonomi lainnya yang menonjol terkait dengan pengelolaan sumberdaya laut adalah budidaya rumput laut yang berkembang pesat dan semakin luas cakupan lokasinya. Hampir di semua kecamatan terdapat budidaya rumput laut, kecuali beberapa kecamatan saja yang penduduknya belum terlibat dalam usaha budidaya tesebut. Di Kecamatan Mawasangka, kegiatan budidaya rumput laut berkembang pesat dan cakupannya semakin luas. Usaha budidaya rumput laut di wilayah ini menjadi salah satu mata pencaharian utama di samping sebagai nelayan tangkap. Kegiatan ekonomi di wilayah ini juga didukung oleh sarana dan prasarana, seperti pasar desa, warung-warung sembako, tempat pengisian BBM

(semacam SPBU kecil untuk memenuhi kebutuhan solar kapal nelayan). Meskipun belum ada tempat pelelangan ikan, keberadaan para pedagang pengumpul di desa telah memudahkan masyarakat untuk menjual hasil tangkapan ikan atau rumput laut. Para pedagang pengumpul selain dianggap membantu masyarakat dalam pemasaran hasil, kebanyakan juga merangkap sebagai penyedia modal usaha bagi masyarakat nelayan dan budidaya rumput laut dengan keringanan pengembalian hutang sesuai dengan hasil yang diperoleh. Sebagai nelayan tangkap, hasil tangkapan ikan juga bervariasi tetapi beberapa jenis ikan karang cukup dominan di wilayah ini. Pendapatan nelayan bervariasi tergantung pada jenis dan jumlah hasil tangkapan. Jenis ikan karang hidup sebagai komoditi ekspor, memungkinkan nelayan memperoleh penghasilan relatif tinggi karena harga ikan karang hidup yang cukup tinggi. Sementara ikan karang mati harganya hampir sama dengan jenis ikan lainnya, sangat murah dibandingkan harga ikan karang hidup, dan cakupan pemasarannya juga terbatas untuk konsumsi pasar lokal. Krisis ekonomi yang dialami masyarakat nelayan sebagai dampak perubahan musim menyebabkan makin banyak penduduk merantau ke daerah lain terutama pada musim sulit ikan. Pada umumnya mereka merantau ke kawasan timur seperti Maluku dan Papua, baik sebagai nelayan maupun usaha lainnya (berdagang dan jasa).

Berbagai program pembangunan juga berpotensi menunjang dinamika ekonomi masyarakat, baik yang berasal dari program COREMAP maupun program lainnya di luar COREMAP. Di Kecamatan Kadatua, bantuan COREMAP berupa dana bergulir untuk modal usaha maupun *blockgrant* untuk pembangunan fisik (MCK, dan penampung air hujan). Selain dari program COREMAP, pemberian dana bergulir dan bangunan fisik di Kadatua juga diperoleh dari program P2KP (dana bergulir dan bangunan fisik), NUS (PU) bantuan pembangunan fisik (PAH dan MCK) serta dari program

PNPM (dana bergulir dan fisik). Bantuan berupa bangunan fisik juga menjadi bagian dari pemanfaatan dana APBD 1 (Pemprov), berupa jalan desa dan talut. Di Kecamatan Mawasangka, bantuan dari COREMAP, selain berupa dana bergulir juga bantuan fisik berupa bangunan talut dan sejumlah bak air untuk masyarakat. Dalam dua tahun terakhir Desa Terapung juga menerima bantuan *village grant* untuk membangun tempat pertemuan masyarakat, namun sampai saat penelitian berlangsung, pembangunan belum selesai, karena dana tidak cukup, sehingga belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut informasi dari beberapa informan pengelolaan dana pembangunan tempat pertemuan kurang transparan, dan kurang mengikut sertakan aparat desa dalam pengelolaannya. Demikian pula dana bergulir yang diharapkan dapat berkembang dan berkelanjutan, sangat tergantung pada kelancaran pengembaliannya. Meskipun diakui pengucuran dana bergulir cukup bermanfaat bagi masyarakat pengguna, namun untuk dapat menunjang ekonomi masyarakat belum optimal, karena jumlah dana yang relatif kecil dibanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan, serta pemanfaatan yang masih relatif baru (tahun 2008). Keberlangsungan dana bergulir UEP atau lainnya juga tergantung pada kelancaran pembayaran kembali dari peminjam, serta keseriusan dan kejujuran para pengelolanya. Gejala adanya mismanajemen (salah urus) merupakan kendala serius untuk keberlangsungan dana bantuan bergulir. Bahkan di Mawasangka dana bergulir terancam gagal karena salah urus dan penyalahgunaan dana oleh para pengelola dana yang umumnya mempunyai kaitan kekeluargaan.

2.2. Gambaran Pendapatan Masyarakat

Gambaran pendapatan masyarakat meliputi pendapatan rumah tangga secara keseluruhan (N= total rumah tangga sampel) dan pendapatan masyarakat nelayan (N adalah total rumah tangga yang

mempunyai anggota rumah tangga sebagai nelayan). Pendapatan rumah tangga meliputi pendapatan bersih semua anggota rumah tangga (10 tahun ke atas) dari rumah tangga sampel baik dari pekerjaan pokok maupun tambahan. Sumber pendapatan rumah tangga dikelompokkan ke dalam: 1) pendapatan rumah tangga dari sector perikanan laut menurut musim; 2) pendapatan rumah tangga dari sektor budidaya; 3) pendapatan rumah tangga dari sektor lainnya (di luar sektor perikanan dan budidaya). Uraian tentang gambaran pendapatan masyarakat meliputi statistik pendapatan dan perkembangan pendapatan rata-rata dan per kapita, serta distribusi pendapatan menurut kelompok pendapatan di masing-masing lokasi kajian yaitu Kecamatan Mawasangka dan Kadatua. Trend perubahan pendapatan dilihat dari tahun-tahun dilakukannya kajian yaitu tahun 2006 (T0), tahun 2008 (T1) dan tahun 2011 (T2). Jumlah sampel rumah tangga berbeda antara tahun 2006 (yaitu 100 rumah tangga) dengan tahun-tahun berikut yaitu 2008 dan 2011 ditambah dengan rumah tangga yang mempunyai anggota Pokmas penerima dana bergulir UEP (Usaha Ekonomi Produktif) harus mencapai 30 rumah tangga. Jumlah ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pendapatan anggota Pokmas setelah menerima bantuan dana UEP sejak tahun 2008.

2.2.1. Pendapatan Rumah Tangga dan Per Kapita

Pendapatan rumah tangga dan per kapita dimaksudkan untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi rumah tangga yang berasal dari berbagai sumber pendapatan. Sementara itu, pendapatan perkapita dimaksudkan untuk melihat lebih dalam kondisi kesejahteraan penduduk. Lebih lanjut akan dibahas juga median dari pendapatan total rumah tangga yang mempertimbangkan pendapatan minimum dan nilai maksimum. Nilai median merupakan nilai tengah, sehingga

jika menunjukkan angka yang kecil berarti sebagian besar pendapatan berada pada kelompok pendapatan rendah dan sebaliknya.

A. Kecamatan Mawasangka

- Statistik Pendapatan

Statistik pendapatan rumah tangga per bulan meliputi trend pendapatan per kapita, rata-rata pendapatan, median pendapatan rumah tangga, minimum dan maksimum pendapatan rumah tangga, pada tahun 2006, 2008 dan 2011 (lihat Tabel 2.1). Pendapatan per kapita dapat lebih menggambarkan kondisi kesejahteraan penduduk, sementara itu median diperlukan untuk menganalisis lebih jauh bagaimana persebaran pendapatan pada kelompok pendapatan. Hasil survey menunjukkan bahwa secara umum Tabel 2.1 menunjukkan kecenderungan peningkatan pendapatan rumah tangga yang konsisten dilihat dari semua jenis statistik pendapatan pada semua periode waktu, terutama pendapatan rata-rata dan pendapatan per kapita rumah tangga,.

Tabel 2.1. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan Kec. Mawasangka Kab. Buton Tahun 2006, 2008 , 2011

No	Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)		
		2006	2008	2011
1	Pendapatan Per Kapita/ Bulan	286.286	351.877	382.269
2	Rata-Rata Pendapatan Rt/Bulan	1.440.522	1.575.740	1.941.647
3	Median Pendapatan	534.167	858.333	1.102.500
4	Pendapatan Rt Minimum/ Bulan	6.667	26.250	83.333
5	Pendapatan Rt Maksimum/ Bulan	7.100.000	8.074.230	18.516.667
	N	100	129	130

Sumber: - Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial terumbu Karang. 2006
- Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan BME 2011

Meskipun pendapatan rata-rata dan per kapita masyarakat cenderung meningkat dalam periode 2006-2011, namun masih terdapat kesenjangan yang relatif besar antar kelompok masyarakat, terutama dilihat dari perbedaan antara pendapatan minimum dan

maksimum (terutama tahun 2008-2011) yang lebih dari 100 persen, serta perbedaan median pendapatan. Hal ini berarti peningkatan pendapatan rumah tangga belum merata, karena peningkatan pendapatan lebih besar pada kelompok pendapatan yang lebih tinggi. Demikian pula perkembangan upah minimum rumah tangga yang cukup signifikan selama 2006-2011 tidak cukup untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan masih banyak kelompok masyarakat yang belum beranjak dari kemiskinan, karena kelompok ini umumnya kurang mempunyai akses untuk berbagai dana bantuan seperti dana bergulir UEP dan PNPM. Persyaratan untuk mendapat dana bergulir (antara lain sudah mempunyai usaha) membatasi masyarakat pemula usaha untuk memanfaatkannya, sehingga tetap miskin. Bahkan ada juga yang menetapkan persyaratan bagi calon peminjam untuk menyerahkan jaminan atau boreh pada awal digulirkannya dana bantuan COREMAP. Padahal dengan kemiskinan yang mereka alami, aset rumah tangga berupa emas menjadi sulit dimiliki. Sehingga akses untuk mendapatkan pinjaman semakin kecil.

Sementara itu, berdasarkan hasil survey terlihat bahwa relatif tingginya perkembangan pendapatan maksimum pada tahun 2008-2011 menunjukkan perkembangan pendapatan lebih kentara pada kelompok berpenghasilan relatif tinggi. Kelompok masyarakat yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan tinggi memiliki modal lebih baik dan dapat memiliki akses yang lebih baik dalam mengembangkan usahanya. Sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih baik dan penghasilan mereka juga akan meningkat.

Grafik 2.1. menunjukkan perkembangan kedua indikator pendapatan rumah tangga (pendapatan rata-rata dan pendapatan per kapita) di Mawasangka, pada periode 2006-2008, 2008-2011 serta 2006-2011. Perkembangan pendapatan rata-rata dan per kapita dihitung dengan menggunakan formula: (T(2008)- T(2006))/T(2006)),

dan hasil perhitungan perubahan seperti pada Grafik 2.1. Secara keseluruhan selama kurun waktu 2006-2011 terjadi perkembangan pendapatan rata-rata rumah tangga dan pendapatan per kapita rumah tangga yang signifikan (masing-masing sekitar 34 dan 35 %). Perkembangan kedua indikator pendapatan rumah tangga ini juga menunjukkan konsistensi peningkatan pendapatan rata-rata per bulan dan pendapatan per kapita pada setiap periode (2006-2008 dan 2008-2011), meskipun dengan pola perubahan yang berbeda. Dilihat dari intensitas perkembangan pendapatan per periode waktu, perkembangan rata-rata pendapatan rumah tangga cenderung lebih menonjol pada periode 2008-2011, sementara perkembangan pendapatan per kapita tertinggi terjadi pada kurun waktu 2006-2008 (masing-masing sekitar 23 persen) (Grafik 2.1).

Grafik 2.1. Perkembangan Rata-rata Pendapatan RT dan Per Kapita di Kec. Mawasangka, 2006, 2008 dan 2011

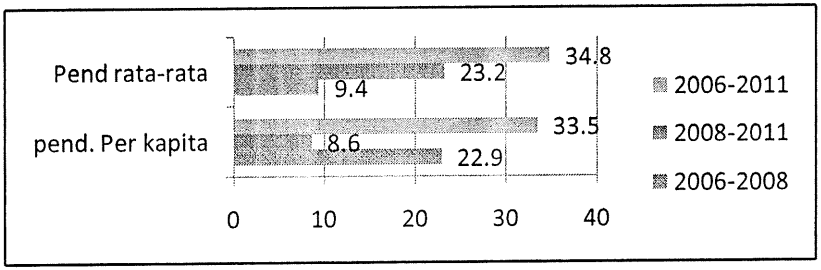

Sumber:
- Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial terumbu Karang. 2006
- Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan BME 2011

Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan musim yang berdampak pada minimnya nelayan mendapatkan hasil tangkapan, sehingga perubahan pendapatan per kapita pada 2 tahun terakhir (2008-2011) relatif rendah. Sementara pada periode waktu yang sama, sebagai dampak krisis ikan di lokasi survey, banyak nelayan yang beralih

usaha atau merantau ke daerah lain, sehingga perubahan pendapatan rata-rata rumah tangga per bulan relatif tinggi yang kemungkinan berasal dari hasil usaha lainnya atau kiriman dari perantau. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di lokasi survey bahwa rata-rata penduduk yang pergi merantau bisa berhasil atau setidaknya dapat mengirimkan hasil kerjanya secara rutin ke daerah asal. Jenis pekerjaan yang ditekuni di daerah rantau cukup beragam yaitu mulai dari kegiatan kenelayanan, perdagangan hingga pertambangan.

- **Kelompok Pendapatan Rumah Tangga**

Tabel 2.2 menunjukkan distribusi rumah tangga menurut kelompok pendapatan dan perkembangannya selama 2006-2011. Meskipun secara keseluruhan terjadi perubahan penyebaran rumah tangga ke arah pendapatan yang lebih merata, kesenjangan distribusi antar kelompok pendapatan masih tetap terjadi, terutama dilihat dari perbedaan trend perubahan antar kelompok pendapatan rumah tangga. Secara keseluruhan peningkatan pendapatan rumah tangga yang terjadi selama tahun 2006-2011, telah mengurangi kesenjangan pendapatan, terutama antara kelompok pendapatan terendah dengan kelompok pendapatan tertinggi. Proporsi rumah tangga dengan rata-rata pendapatan kurang dari 500 ribu rupiah cenderung menurun secara signifikan selama kurun waktu 2006-2011 yaitu sebesar 59 persen. Demikian pula untuk kelompok pendapatan terbesar (3 juta rupiah/lebih) cenderung menurun selama 2006- 2011, meskipun relatif kecil (sekitar 4%). Hal ini menunjukkan peningkatan pendapatan merata pada semua kelompok pendapatan dan kesenjangan semakin menurun. Sedangkan untuk kelompok pendapatan lainnya cenderung menunjukkan trend meningkat dengan intensitas yang berbeda. Peningkatan pendapatan yang cukup mencolok terjadi pada kelompok-kelompok pendapatan lainnya (antara 500 ribu - 2,5 juta

rupiah). Hal ini berarti meskipun masih terjadi kesenjangan antara kelompok pendapatan terendah dan tertinggi, peningkatan pendapatan rumah tangga pada kelompok lainnya, cukup merata. Kemungkinan berbagai intervensi program pembangunan baik fisik maupun dana bergulir telah memberi kontribusi terhadap dinamisasi kegiatan ekonomi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga pada umumnya.

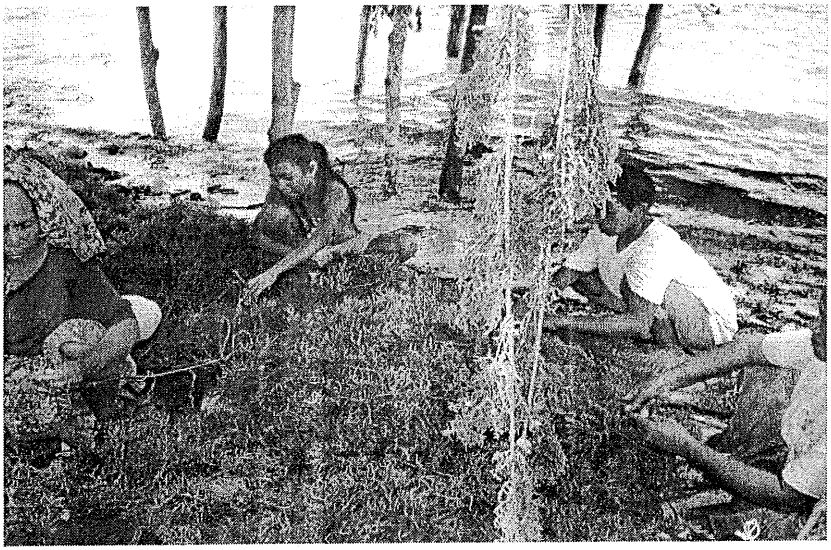

Gambar 2.1: Ibu dan Anak Bekerja Memanen Rumput Laut

Perkembangan tersebut juga diantaranya didukung oleh stabilnya usaha budidaya rumput laut. Hasil yang diperoleh dari penjualan rumput laut dapat diperoleh pada setiap musim, bahkan salah satu narasumber menyatakan bahwa hasil panen rumput laut ketika musim gelombang kuat lebih bagus karena batangnya menjadi lebih besar sehingga akan meningkatkan berat hasil produksi. Sementara itu, dalam kegiatan budidaya rumput laut, terdapat kecenderungan

memberdayakan seluruh anggota keluarga termasuk anak usia sekolah. Anak-anak dapat membantu mengerjakan pekerjaan rumput laut seperti memasang bibit pada tali, melepaskan rumput laut yang baru dipanen hingga membersihkan tali setelah selesai panen dan siap digunakan untuk pemasangan bibit selanjutnya. Anak-anak yang membantu pekerjaan orangtuanya tetap diberi bayaran dan termasuk dalam hitungan biaya produksi.

Hasil panen rumput laut sebagian besar dapat ditampung oleh penampung yang ada dan tidak terjadi persaingan harga yang dapat merugikan petani. Setiap petani dapat menjual hasil panen mereka kepada pengumpul secara bebas. Tetapi, pada umumnya mereka sudah memiliki pilihan pengumpul tertentu karena banyak terdapat hubungan antara pengumpul dan petani rumput laut khususnya dalam pemberian modal untuk penanaman rumput laut. Pembayaran dilakukan pada saat panen, sehingga perhitungnya dapat langsung dipotong dari hasil penjualan rumput laut kepada pengumpul. Hubungan antara pengumpul dan petani budidaya rumput laut juga disebabkan karena masih adanya kesulitan dalam mengakses pinjaman yang ada seperti pinjaman dari COREMAP. Jumlah yang ditawarkan juga terbatas dan masyarakat yang berminat juga cukup banyak sehingga tidak semua peminjam dapat diberikan pinjaman. Pada akhirnya mereka yang meminjam pada orang perorang atau pada pengumpul.

Pendapatan rumah tangga secara umum di Kecamatan Mawasangka juga disebabkan karena variasi pekerjaan dalam satu rumah tangga cukup beragam. Pada umumnya mereka yang memiliki usaha budidaya rumput laut juga tetap melakukan usaha di perkebunan seperti menanam jagung dan singkong. Rata-rata rumah tangga memiliki kebun dengan luasan yang berbeda-beda. Hasil kebun tersebut sebagian besar dikonsumsi sendiri, seperti panen singkong

dan jagung. Namun ada beberapa rumah tangga yang menjual hasil panennya ke pasar, walaupun hasilnya masih sangat minimum.

Tabel 2.2.: Distribusi RT Menurut Kelompok Pendapatan Rata-rata Per Bulan di Kec. Mawasangka, Kab. Buton Tahun 2006, 2008 , 2011

No	Kelompok Pendapatan	Nilai (Persen)		
		2006	2008	2011
1	< 500.000	49	37,2	20,0
2	500.000- 999.000	11	19,4	23,1
3	1.000.000- 1.499.000	6	10,9	16,9
4	1.500.000- 1.999.000	4	10,9	7,7
5	2.000.000- 2.499.000	5	2,3	10,0
6	2.500.000- 2.999.000	3	3,1	3,8
7	3.000.000/lebih-	22	16,3	18,4
	Total (persen)/ (N)	100/(99)	100/(129)	100/(130)

Sumber:
- Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial terumbu Karang. 2006
- Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan BME 2011

Selain itu ada juga dalam satu rumah tangga yang pergi merantau. Hasil dari merantau tersebut digunakan untuk modal melakukan budidaya rumput laut. Modal untuk rumput laut, selain diperoleh dari usaha sendiri ataupun dari pengumpul juga diperoleh dari hasil peminjaman pada dana bergulir COREMAP. Pengembaliannya dilakukan pada saat panen dengan sistem sekaligus mengembalikan. Karena jika dicicil justru membuat mereka menjadi lebih sulit karena panen tidak dilakukan setiap bulan, walaupun resiko yang mereka hadapi cukup kecil. Membaiknya kondisi pendapatan dari hasil budidaya rumput laut mengakibatkan jenis kegiatan budidaya ini menjadi alternatif dalam sumber pendapatan rumah tangga. Pada tahun 2000 terjadi peningkatan jumlah petani budidaya rumput laut yang mengakibatkan produksi rumput laut secara umum juga meningkat.

B. Kecamatan Kadatua

- **Statistik Pendapatan Rumah Tangga**

Hasil kajian di lokasi lainnya yaitu Kecamatan Kadatua menunjukkan kecenderungan perkembangan pendapatan rumah tangga yang sama dengan Mawasangka, yaitu cenderung meningkat secara signifikan selama periode 2006-2011, dilihat dari beberapa indikator statistik pendapatan yaitu pendapatan pendapatan rumah tangga per bulan dan pendapatan per kapita per bulan (Tabel 2.3).

Tabel 2.3. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan, Kec. Kadatua Kab. Buton Tahun 2006, 2008, 2011

No	Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)		
		2006	2008	2011
1	Pendapatan per kapita/bulan	47.372	183.053	175.305
2	Rata-rata pendapatan RT/bulan	209.329	806.599	868-346
3	Median pendapatan	118.750	600.000	602.917
4	Pendapatan RT minimum/ bulan	4.167	50.000	50.000
5	Pendapatan RT maksimum/ bulan	2.235.833	6.000.000	6.328.000
	N	100	129	132

Sumber: - Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial terumbu Karang. 2006
- Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan BME 2011

Namun demikian sebetulnya perkembangan pendapatan rumah tangga yang lebih mencolok terjadi pada periode pertama yaitu tahun 2006-2008. Sedangkan pada periode selanjutnya (2008-2011), hampir tidak terjadi peningkatan pendapatan atau bahkan menurun meskipun relatif kecil (Grafik 2.2). Masyarakat setempat menyatakan bahwa telah terjadi krisis ikan, sehingga hasil tangkapan ikan terus menurun. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah perubahan cuaca sehingga menurunkan kegiatan melaut nelayan, dan berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan. Sebenarnya di Kadatua sudah lama mata pencaharian nelayan tidak tergantung hanya pada kegiatan kenelayanan, sehingga tidak banyak nelayan yang melakukan

perubahan alat tangkap yang dapat digunakan untuk mengatasi perubahan cuaca. Alat tangkap yang dimiliki sederhana, karena umumnya mereka mencari ikan lebih banyak untuk konsumsi keluarga daripada untuk dijual. Pada waktu terjadi gelombang kuat, nelayan dengan sarana dan alat tangkap yang relatif sederhana, tidak mampu melaut dan mereka lebih suka meninggalkan kegiatan kenelayanan dan beralih usaha ke arah kegiatan ekonomi lainnya atau merantau ke daerah lain untuk berdagang atau menjadi buruh. Alternatif kegiatan ekonomi yang tersedia di Kecamatan Kadatua dalam rentang waktu tahun 2010 hingga pada saat penelitian adalah pekerjaan sebagai penambang batu. Kegiatan ini sangat membantu perekonomian rumah tangga. Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekonomi pada budidaya rumput laut yang mengoptimalkan anggota rumah tangga, maka dalam pekerjaan penambangan batu, anggota rumah tangga juga diberdayakan. Sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih besar jika dibandingkan dengan mengerjakan sendiri mengingat hasil yang diperoleh sangat tergantung dan berapa kubik batu yang dihasilkan.

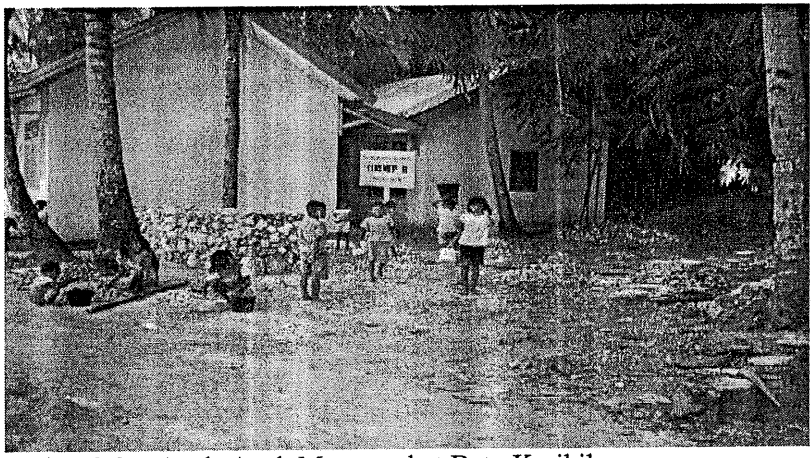

Gambar 2.2. : Anak-Anak Mengangkat Batu Kerikil

Sumber pendapatan rumah tangga lainnya yang juga cukup menonjol di Kecamatan Kadatua adalah dari hasil tenunan. Pekerjaan ini banyak dilakukan oleh kelompok perempuan baik ibu-ibu maupun anak-anak usia sekolah. Hasil tenunan mereka pada umumnya dapat langsung dijual kepada pengumpul bahkan banyak diantaranya yang mengerjakan tenunan berdasarkan pesanan dari pengumpul. Sehingga tidak diperlukan modal seperti benang karena semua sudah disediakan oleh pengumpul. Rata-rata seorang penenun dapat menyelesaikan satu kain dalam waktu satu minggu jika dikerjakan secara terus menerus setiap hari penuh. Tetapi jika dikerjakan sebagai sampingan dari kegiatan lainnya, satu kain baru dapat diselesaikan dalam waktu 3 sampai 4 minggu. Rata-rata keuntungan dari satu kain adalah 55 ribu rupiah atau dapat lebih tergantung dari tingkat kesulitan pembuatan.

Grafik 2.2. Perkembangan Pendapatan Rata-rata RT dan Per Kapita di Kec. Kadatua, 2006, 2008 dan 2011

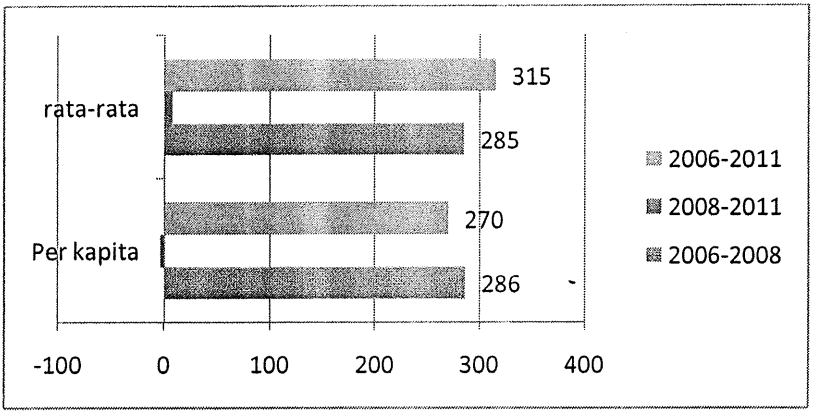

Sumber: - Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang. 2006
- Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan BME 2011

Sementara di daerah pesisir Mawasangka, bervariasinya alat tangkap yang dimiliki nelayan menyebabkan mereka mampu mempertahankan kegiatan kenelayanan, tanpa banyak terpengaruh oleh perubahan cuaca. Demikian pula kegiatan budidaya rumput laut yang banyak dilakukan nelayan tidak terlalu terpengaruh dengan perubahan cuaca, sehingga sangat membantu nelayan dalam menambah penghasilan, Akibatnya masa sulit ikan tidak banyak berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga. Di Kecamatan Kadatua, selama 2 tahun terakhir (2008-2011), ketika masa sulit ikan, pendapatan per kapita rumah tangga cenderung menurun dan perubahan pendapatan rata-rata sangat rendah dibandingkan periode sebelumnya (2006-2008) (Grafik 2.2)

- **Kelompok Pendapatan Rumah Tangga**

Perubahan pendapatan rumah tangga yang lebih rinci di Kadatua dapat dilihat dari distribusi rumah tangga menurut kelompok pendapatan (Tabel 2.4). Pola perubahan tidak jauh berbeda dengan lokasi kajian Mawasangka, yaitu untuk kelompok pendapatan terendah (kurang dari 500 ribu rupiah) dan relatif tinggi (di atas 2,5 juta rupiah) persentase cenderung menurun setelah tahun 2008 dan 2011. Untuk kelompok pendapatan lainnya antara 500 ribu dan 2,5 juta rupiah cenderung meningkat persentasenya selama 2006-2011. Perubahan yang paling menonjol terjadi pada kelompok pendapatan kurang dari 500 ribu rupiah yang menurun cukup signifikan terutama selama 2006-2008 (lebih dari 50 persen). Peningkatan pendapatan rumah tangga yang paling menonjol terjadi pada kelompok pendapatan di atasnya yaitu antara 500-999 ribu rupiah terutama pada 2006-2008, yang meningkat sebesar 4 kali lipatnya, sementara pada periode 2008-2011, cenderung menurun, namun secara umum selama tahun 2006-2011 terlihat meningkat (hampir tiga kali lipat). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan rumah tangga selama

2006-2011 di Kadatua cenderung terbatas pada kelompok yang relatif miskin, belum meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya.

Perubahan pendapatan masyarakat di kedua lokasi juga dipengaruhi oleh faktor inflasi. Dengan memasukkan unsur tingkat inflasi dalam perhitungan pendapatan rumah tangga, peningkatan pendapatan kemungkinan terkoreksi mendekati kenyataan yang dirasakan masyarakat apakah pendapatan rumah tangga secara riil meningkat, tetap atau bahkan menurun.

Tabel 2.4. Distribusi RT Menurut Kelompok Pendapatan Per Bulan di Kec. Kadatua Kab. Buton Tahun 2006, 2008 , 2011

NO	KELOMPOK PENDAPATAN	NILAI (Persen)		
		2006	2008	2011
1	< 500.000	88,7	38,9	40,8
2	500.000- 999.000	10,3	41,6	30,0
3	1.000.000- 1.499.000	-	6,2	10,8
4	1.500.000- 1.999.000	-	4,4	7,5
5	2.000.000- 2.499.000	1,0	4,4	5,8
6	2.500.000- 2.999.000	-	1,8	0,8
7	3.000.000/lebih-	-	2,7	4,1
	Total (persen)/ (N)	100/(100)	100/(113)	100/(120)

Sumber:
- Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial terumbu Karang. 2006
- Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan BME 2011

Pengaruh faktor inflasi terhadap perubahan pendapatan dapat dilihat pada perubahan pendapatan per kapita rumah tangga tahun 2008-2011 yang merupakan gabungan kedua lokasi kajian (Tabel 2.5). Dengan memperhatikan faktor inflasi selama periode 2008-2011, maka peningkatan pendapatan per kapita sesudah dimasukkan faktor inflasi menurun dari 4,28 menjadi 3,68 atau turun sekitar 14 persen. Hal ini berarti peningkatan pendapatan yang relatif kecil, secara substansi dapat berarti tidak ada perubahan atau bahkan menurun.

Tabel 2.5: Pendapatan Per Kapita Rumah Tangga Dengan Memperhatikan Faktor Inflasi, Kedua Lokasi Kajian, Kab. Buton, Tahun 2008, 2011.

Tahun	Pendapatan Per Kapita	
	Sebelum Inflasi	Sesudah Inflasi
2008	273.045,94	209.307,24
2011	1.442.020,67	979.721,45
Perubahan Pendapatan	4,28	3,68

Sumber : Diolah dari data primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan 2011

2.2.2. Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan

Pendapatan dari kegiatan kenelayanan terutama berkaitan dengan kegiatan terkait penangkapan ikan di laut. Berdasarkan data hasil survei tentang pendapatan nelayan dari kegiatan penangkapan ikan, secara umum kegiatan kenelayanan cenderung mengalami penurunan, terutama untuk periode 2009-2011. Beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yaitu berkurangnya ketersediaan ikan di laut, perbedaan musim dan perubahan iklim. Faktor manusia seperti kebijakan pemerintah , perubahan sarana dan alat tangkap, dan beralihnya orientasi perekonomian rumah tangga dari kenelayanan menjadi non kenelayanan (seperti perdagangan dan jasa) (LIPI dan COREMAP LIPI, 2008).

A. Kecamatan Mawasangka

- **Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan**

Pada saat penelitian dilakukan, secara umum kondisi kenelayanan di Kecamatan Mawasangka relatif tidak baik karena sedang mengalami krisis ikan. Sebagian besar nelayan tidak

mendapatkan hasil dari melaut akibat adanya penurunan jumlah hasil tangkapan, khususnya ikan teri yang menjadi salah satu andalan hasil tangkapan nelayan di Desa Terapung. Musim ikan teri yang biasanya muncul pada bulan 6 hingga bulan 10. Dalam satu tahun terakhir ini menurun sekali. Akibatnya sangat berpengaruh terhadap rata-rata pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan secara keseluruhan. Gambaran pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan dilihat dari perkembangan rata-rata pendapatan RT per bulan untuk masing-masing musim yaitu musim gelombang tenang, pancaroba dan musim gelombang kuat (Tabel 2.6).

Tabel 2.6: Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan, Kec. Mawasangka, Kab. Buton Tahun 2006, 2008 , 2011 (Gabungan 3 musim)

NO	JENIS PENDAPATAN	NILAI (Rp)		
		2006	2008	2011
1	Rata-rata pendapatan RT/bulan	1.444.522	1.640.159	1.048.491
2	Median pendapatan RT	534.167	900.000	531.667
3	Pendapatan RT minimum/ bulan	6.667	50.000	50.000
4	Pendapatan RT maksimum/ bulan	7.100.000	7.725,000	6.666.667
	N	99	85	68

Sumber:
- Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial terumbu Karang. 2006
- Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan BME 2011

Berdasarkan hasil survei, rata-rata pendapatan RT per bulan berfluktuasi. Peningkatan terjadi pada rentang waktu 2006-2008 dan penurunan terjadi pada rentang waktu 2008-2011. Penurunan tersebut tergambar dari meningkatnya jumlah rumah tangga nelayan yang berpendapatan rendah. Hal tersebut terlihat dari menurunnya nilai median pada tahun 2011. Nilai median merupakan nilai tengah yang menggambarkan keadaan minimum dan maksimum. Nilai median

yang rendah menunjukkan semakin dominannya kelompok rumah tangga nelayan yang berpendapatan rendah. Penurunan tersebut juga diikuti oleh dari menurunnya pendapatan maksimum per bulan. Walaupun pendapatan minimum per bulan meningkat jika dibandingkan dengan pendapatan RT minimum tahun 2006 tetapi relatif tetap jika dibandingkan dengan tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga nelayan yang miskin berada dalam kondisi yang semakin memburuk.

Menurunnya kondisi perekonomian rumah tangga nelayan pada tahun 2011 diantaranya disebabkan karena adanya penurunan rentang waktu melaut akibat musim gelombang kuat yang dirasakan lebih panjang yaitu rata-rata 5 bulan. Bagi nelayan tradisional, kondisi gelombang sangat mempengaruhi waktu melaut dan hasil yang diperoleh. Alat tangkap dan armada tangkap yang sederhana tentunya hanya dapat digunakan secara maksimal pada saat gelombang tenang atau pada saat musim gelombang kuat tetapi wilayah tangkap sangat terbatas. Rendahnya hasil tangkapan ikan dialami hampir oleh semua nelayan di lokasi penelitian. Kondisi yang terburuk dialami oleh nelayan di Desa Terapung yang mengalami masa krisis (panceklik) selama lebih dari satu tahun. Nelayan ikan teri yang secara rutin dapat memperoleh hasil yang cukup banyak di musim gelombang tenang, saat penelitian dilakukan nelayan tidak memperoleh hasil tangkapan. Bahkan penampung ikan teri yang selama ini selalu dapat menampung sepanjang tahun, saat penelitian dilakukan kegiatan penampungan dan pengolahan ikan teri terhenti total. Beberapa diantara para penampung ada yang pergi merantau ke luar (wilayah Papua) untuk menjadi pedagang, dan satu penampung yang masih berada di Desa Terapung beralih usaha ke usaha perdagangan.

Penurunan hasil tangkapan ikan teri dapat dilihat dari perkembangannya sejak tahun 2008 berdasarkan perkembangan hasil pengolahan oleh penampung ikan teri di Desa terapung. Pada tahun

2008, jumlah ikan teri yang ditampung dapat mencapai 9 ton dalam satu bulan dengan kondisi yang stabil hingga 8 bulan. Ikan teri yang dikirim ke luar daerah dalam satu kali pengiriman dapat mencapai 3 ton. Dalam satu bulan dilakukan 3 kali pengiriman, sehingga rata-rata pengiriman ikan teri per bulan sekitar 9 ton. Pada tahun 2009 kondisi populasi ikan teri masih hampir sama dengan tahun 2008 tetapi dari segi volume tiap pengiriman relatif menurun. Pengiriman Ikan teri yang biasanya dalam keadaan direbus, pada tahun 2009 hanya dijemur, sehingga harga jual cenderung menjadi lebih rendah. Kondisi semakin menurun pada tahun 2010, di mana dalam satu tahun hanya mengirim ke luar sebanyak 4 kali. Dan puncaknya adalah pada tahun 2011, hasil tangkapan ikan teri hampir tidak ada. Kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi tahun 2006, di mana ikan teri masih banyak dan pendapatan nelayan cukup baik.

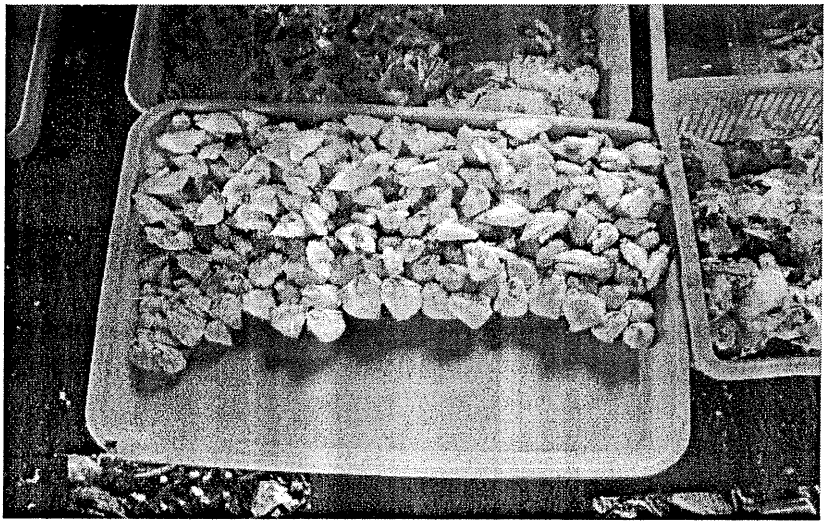

Gambar 3.3. Kepiting Yang Sudah Diolah

Dengan adanya musim panceklik teri di Desa Terapung, masyarakat nelayan khususnya mengusahakan alternatif hasil

tangkapan. Pada kondisi normal, jenis-jenis ikan yang diperoleh dari hasil tangkapan adalah ikan Balana, ikan Kuasi, dan ikan Babara. Sementara itu sebagian nelayan biasa melakukan penangkapan kepiting. Berdasarkan karakteristik sebagian besar nelayan yang merupakan Suku Bajo, dapat diketahui bahwa naluri mereka untuk menangkap ikan cukup tinggi, namun tetap saja hasil yang diperoleh pada saat panceklik sangat sedikit.

Dalam keadaan sulit ikan tersebut, salah satu alternatif yang cukup menjanjikan adalah adanya hasil dari penangkapan kepiting. Hasil tangkapan kepiting merupakan hasil tangkapan yang relatif stabil karena dapat diperoleh pada segala musim baik gelombang kuat, pancaroba maupun gelombang tenang. Hasil tangkapan kepiting dijual kepada pengumpul yang juga sekaligus sebagai pengolah kepiting untuk dikirim ke luar daerah Buton bahkan untuk diekspor ke beberapa negara tetangga seperti Singapura. Cukup stabilnya penampungan kepiting sedikit membantu rumah tangga nelayan yang selama ini bergantung sepenuhnya pada hasil penangkapan ikan teri. Selain dapat menampung hasil tangkapan kepiting, kegiatan ekonomi pengolahan kepiting juga membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif. Tenaga kerja banyak terserap karena pengolahannya dilakukan secara manual. Dalam kegiatan pengolahan kepiting ini di butuhkan beberapa tenaga untuk membersihkan, memotong, dan mensortir kepiting sampai menjadi kemasan tertentu. Salah seorang pengusaha pengolah kepiting menyebutkan bahwa terdapat juga hubungan pekerjaan antara pengusaha pengolah kepiting dengan nelayan. Ada beberapa nelayan kepiting yang meminjam uang dan dikembalikan dalam bentuk menyerahkan hasil panen kepiting. Keberlanjutan usaha ini sangat tergantung pada adanya hubungan kerjasama dengan penampung hasil olahan kepiting. Kepiting olahan tersebut kemudian dikirim ke penampung besar yang kemudian menjadi komoditi ekspor, sebagai bahan makanan di restoran-restoran

besar. Melalui jaringan kerjasama tersebut, seluruh hasil olahan dipastikan tidak akan terbuang, dengan catatan kualitas yang dikirimkan sesuai dengan standar yang ditentukan. Kepiting yang sudah diolah dikemas sesuai dengan kualitas produk, dengan harga sesuai dengan kualitasnya. Untuk kualitas yang baik, harganya akan tinggi, demikian pula sebaliknya harga semakin murah untuk kualitas yang lebih rendah. Harga olahan kepiting sesuai dengan kualitasnya berkisar antara 25 ribu hingga 135 ribu rupiah per kg. Satu unit usaha pengolahan kepiting dalam satu hari menampung sekitar 80 kg kepiting dan menjadi 50 kg hasil olahan kepiting.

Walaupun hasil panen kepiting memberikan prospek yang lebih baik, namun tidak semua nelayan melakukan kegiatan budidaya kepiting, sehingga kondisi rumah tangga nelayan umumnya pada tahun 2011 sangat memprihatinkan. Rendahnya pendapatan rumah tangga nelayan bahkan berdampak pada ketidakmampuan mereka dalam mengembalikan pinjaman dana bergulir COREMAP. Seluruh dana bergulir yang disalurkan kepada nelayan, tidak dapat dibayarkan pada tahun 2011.

Kesulitan dalam mendapatkan ikan juga dialami oleh papa lele (pedagang ikan). Mereka biasanya mencari ikan dari penangkap ikan dengan kapal besar. Akibatnya, ikan sulit diperoleh penduduk dan hanya bisa didapatkan dari papa lele yang menjual ikan dalam jumlah yang terbatas. Bahkan untuk mendapatkan ikan, penduduk harus berebutan akibat jumlah yang dibawa terbatas. Hal ini semakin menegaskan bahwa telah terjadi penurunan hasil tangkap nelayan, sehingga jumlah ikan yang dikonsumsi juga menjadi terbatas.

Meningkatnya jumlah rumah tangga nelayan dengan penghasilan rendah diikuti dengan penurunan jumlah rumah tangga nelayan yang berpenghasilan lebih dari Rp. 1.000.000. Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya bahwa penurunan tersebut terjadi pada

rentang waktu tahun 2008-2011. Jumlah nelayan dengan penghasilan kurang dari Rp. 500.000 pada tahun 2011 meningkat cukup besar. Padahal sebelumnya, yaitu pada tahun 2006-2008 jumlah kelompok pendapatan ini sudah menurun dari 54,0 persen menjadi 32,9 persen. Demikian juga pada kelompok pendapatan 500 ribu sampai 1 juta rupiah sudah menurun pada rentang tahun 2006-2008, namun kembali meningkat walaupun kecil (kurang dari satu persen). Penurunan yang signifikan terjadi pada kelompok pendapatan tinggi atau 3 juta rupiah atau lebih. Pada rentang tahun 2006-2008 terjadi peningkatan jumlah yang signifikan dan sebaliknya pada rentang waktu 2008-2011 terjadi penurunan yang sangat drastis.

Grafik 2.3. Distribusi RT Menurut Kelompok Pendapatan Rata-rata Per Bulan dari Kegiatan Kenelayanan, Kec. Mawasangka, Kab. Buton Tahun 2006, 2008 , 2011

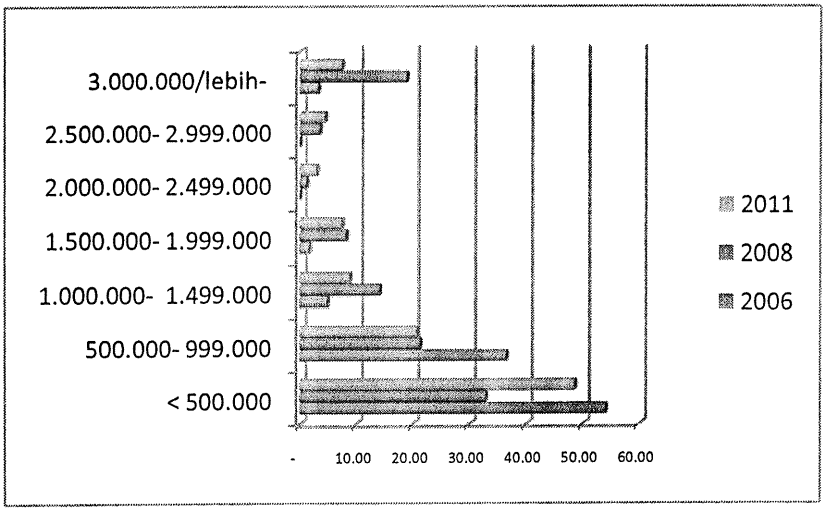

Sumber:
- Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial terumbu Karang. 2006
- Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan BME 2011

Penurunan pendapatan pada tahun 2011 terjadi pada musim gelombang tenang. Hal ini disebabkan karena jumlah waktu melaut pada saat gelombang tenang telah berkurang. Menurut beberapa narasumber dikatakan bahwa musim gelombang kuat pada satu tahun terakhir ini terjadi lebih panjang, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga musim gelombang tenang yang biasanya dimanfaatkan untuk mendapatkan banyak ikan juga berkurang. Secara umum, gelombang tenang atau waktu yang baik untuk melaut hanya tiga bulan. Sementara itu, musim gelombang kuat menjadi lebih panjang yaitu sekitar 5-6 bulan. Semakin panjangnya bulan dengan gelombang kuat, menyebabkan hasil tangkapan tentunya juga menurun. Musim gelombang kuat di Kecamatan Mawasangka terjadi pada bulan 2 sampai dengan bulan 4 dan bulan 7 sampai bulan 9. Terkadang pada bulan 9 nelayan sudah mulai bersiap untuk melaut. Banyak diantara nelayan yang berusaha melaut lebih sering, namun tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan.

Alat tangkap nelayan yang sederhana seperti jaring maupun bubu masih sangat rentan digunakan pada saat musim gelombang kuat. Kondisi itu diperparah dengan adanya persaingan perolehan ikan oleh kapal-kapal besar dengan teknologi penangkapan yang lebih canggih. Kapal besar dapat mencari ikan pada semua musim baik gelombang kuat maupun gelombang tenang. Akibatnya semua ikan sudah terambil dan nelayan tradisional menjadi semakin kesulitan mendapatkan ikan. Di sisi lain, masyarakat khususnya nelayan mengakui bahwa adanya daerah konservasi ikan atau daerah perlindungan laut dari COREMAP sangat bermanfaat dalam meningkatkan jumlah ikan karang khususnya. Ikan-ikan di daerah perlindungan laut tersebut sudah mulai meluas ke daerah sekitarnya. Hal ini dapat terlihat pada saat meti atau air surut. Air surut dapat terjadi hingga beberapa meter sehingga masyarakat dapat dengan mudah menangkap ikan yang muncul di permukaan.

Tabel 2.7 dan grafik 2.4 berikut secara umum memperlihatkan bahwa rata-rata pendapatan nelayan pada saat musim gelombang kuat meningkat. Peningkatan tersebut juga disebabkan adanya faktor inflasi, sebagaimana sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Demikian juga dengan meningkatnya harga-harga ikan seiring dengan semakin berkurangnya ketersediaan ikan di masyarakat. Namun, secara total untuk semua gelombang terlihat perkembangan rata-rata pendapatan pada rentang 2008-2011 terlihat negatif yaitu sekitar -36 persen. Sementara itu dilihat dari perkembangan pendapatan pada rentang waktu 2006-2011 rata-rata pendapatan meningkat cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena rata-rata pendapatan pada saat gelombang kuat pada tahun 2006 jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun 2006 adalah awal digalakkannya zone perlindungan atau daerah perlindungan laut. Demikian juga jumlah nelayan yang menggunakan bius atau bom juga cenderung berkurang, sehingga hasil tangkapan ikan juga menjadi berkurang. Akibatnya perbedaan rata-rata pendapatan pada tahun 2006 dan tahun-tahun berikutnya relatif besar. Hal ini juga didukung oleh pengawasan yang sangat ketat terutama pada tahun-tahun awal pelaksanaan program COREMAP, sehingga nelayan yang sebelumnya menggunakan alat tangkap illegal beralih kepada penangkapan ikan tradisional yang lebih ramah lingkungan.

Namun, pengawasan yang ketat oleh masyarakat tidak berlangsung lama disebabkan karena munculnya satu kasus pengeboman ikan oleh beberapa orang, yang berakhir dengan penahanan dua orang anggota masyarakat yang berusaha menghalangi pengeboman ikan tersebut. Pada kasus di Desa Wakambangura, penangkapan pelaku pengeboman oleh masyarakat, berubah menjadi kasus penganiayaan oleh masyarakat terhadap pelaku pengeboman, sehingga masyarakat yang berniat melindungi laut dari praktek pengeboman, justru harus menerima hukuman 3 bulan. Kejadian

tersebut memunculkan rasa ketidakadilan dan menimbulkan trauma di kalangan masyarakat, sehingga terjadi penurunan pengawasan laut oleh masyarakat. Masyarakat hanya berani melaporkan jika terjadi praktek penangkapan ikan yang merusak (seperti bius dan bom) Dampak dari kejadian tersebut adalah semakin meningkatnya kasus nelayan setempat yang kembali melakukan penangkapan ikan illegal, karena ketidakadilan yang dirasakan masyarakat setempat terhadap pelaku dari luar daerah. Dalam hal ini pihak pengurus COREMAP hanya berupaya melakukan pendekatan dan peneguran pada pelaku, namun tidak berani bertindak untuk mencegah. Akibat konflik yang berkepanjangan, sebagian nelayan beralih pekerjaan menjadi pedagang, karena merasa kawatir dengan ancaman-ancaman yang terjadi di laut

Tabel 2.7. Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, dan Perubahannya, Kec. Mawasangka, Tahun 2006, 2008, 2011

Tahun	Rata-rata Pendapatan RT Nelayan Menurut Musim (Rp)			
	Gel. Kuat	Pancaroba	Gel Tenang	Total
2006	120.216	269.797	360.338	250.117
2008	445.938	1.082.756	2.558.492	1.640.159
2011	740.250	762.585	2.331.277	1.048.491

Sumber:
- Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang. 2006
- Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan BME 2011

Tabel 2.7 dan Grafik 2.4 menunjukkan Rata-rata pendapatan menurut musim dan perubahannya pada periode 2006-2008 dan 2008-2011. Pendapatan rata-rata nelayan pada umumnya cenderung menurun pada tahun 2008-2011, terutama pada musim pancaroba dan gelombang tenang, bahkan penurunan rata-rata pendapatan pada musim pancaroba cukup signifikan. Salah seorang narasumber

menyebutkan bahwa pada tahun 2009 pernah kejadian laut tercemar menjadi merah. Akibatnya banyak ikan yang terkena penyakit yang menyebabkan banyak ikan mati dan muncul bintik-bintik pada ikan. . Banyak ikan yang mati muncul ke permukaan laut , termasuk ikan tuna. Kejadian tersebut berlangsung cukup lama yaitu 4-5 bulan dan mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Sementara pada musim gelombang kuat justru rata-rata pendapatan nelayan meningkat terus, termasuk pada periode 2008-2011, meskipun peningkatannya tidak sebesar periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena harga ikan meningkat dan ada penghasilan dari budidaya rumput laut, pekerjaan non kenelayanan dan juga budaya merantau.

Grafik 2.4. Perkembangan Pendapatan Rata-rata RT Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim di Kecamatan Mawasangka, Buton, 2006,2008, 2011 (Persen)

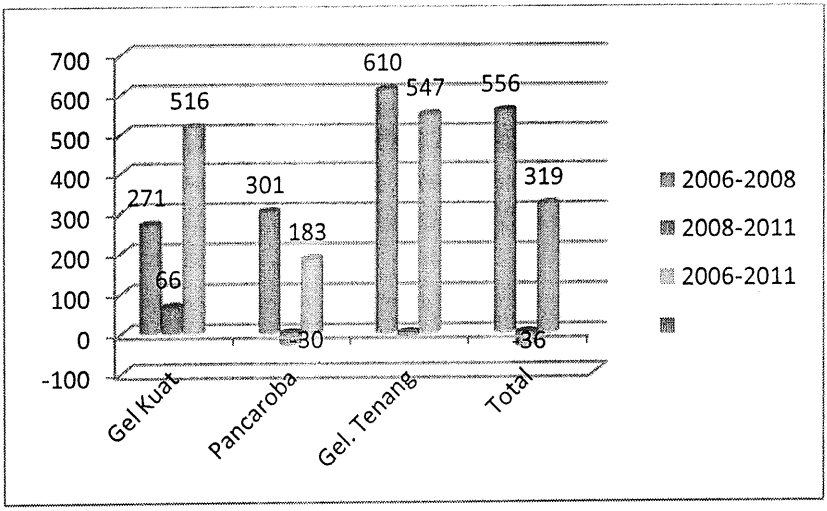

Sumber:
- Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang. 2006
- Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan BME 2011

B. Kecamatan Kadatua

- Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan

Sebagaimana halnya perkembangan pendapatan rumah tangga nelayan di Kecamatan Masawasangka, perkembangan pendapatan di Kecamatan Kadatua juga menunjukkan adanya kecenderungan menurun khususnya pada periode tahun 2008- 2011 (Tabel 2.9). Jumlah nelayan juga terlihat menurun karena sebagian diantaranya memilih untuk merantau baik sebagai pedagang maupun bekerja sebagai buruh nelayan di kapal-kapal besar. Sebagian diantaranya tetap berada di daerah asal tetapi memilih untuk melakukan pekerjaan alternatif di luar kenelayanan. Seperti yang ditemui di Desa Kapoa di mana sebagian nelayan beralih pekerjaan menjadi penambang batu kapur. Pendapatan yang diperoleh lebih memadai dibandingkan dengan hasil melaut. Besarnya hasil dari menambang batu ditentukan oleh masing-masing pekerja karena hasil yang akan diperoleh tergantung dari berapa kubik batu kerikil yang dihasilkan. Pada tahun 2006, jumlah responden nelayan lebih dari 70 orang dan pada tahun 2011 hanya tinggal 42 orang. Ini menunjukkan kegiatan kenelayanan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu narasumber diperoleh informasi bahwa menurunnya jumlah nelayan juga disebabkan karena terjadinya perubahan orientasi di kalangan masyarakat khususnya generasi muda dari jenis pekerjaan di bidang kenelayanan ke arah kegiatan ekonomi jasa atau perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penduduk yang merantau ke luar daerah seperti Papua (pedagang atau jasa) dan Sumatera untuk bekerja di penambangan.

Di daerah ini kegiatan mencari ikan banyak dilakukan penduduk dengan memanfaatkan waktu meti atau air laut surut. Jumlah ikan yang diperoleh bervariasi, tergantung pada alat tangkap

yang digunakan. Bagi nelayan yang menggunakan jaring , jumlah ikan yang diperoleh relatif lebih banyak. Ikan yang banyak muncul ke permukaan adalah ikan karang, diantaranya adalah ikan baronang. Namun, masyarakat yang mengambil ikan karang sebagian besar tetap memiliki kesadaran untuk tidak sampai merusak karang. Walaupun beberapa nelayan masih menggunakan alat tangkap berupa tombak ataupun ketika memasang jaring kemungkinan telah menancapkan jaring di sekitar karang. Kebanyakan nelayan memanfaatkan hasil tangkapan ikan hanya untuk dikonsumsi sendiri.

Banyaknya ikan karang yang muncul ke permukaan dianggap sebagai salah satu bentuk keberhasilan dalam pengelolaan daerah perlindungan laut. Berdasarkan hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa ketika kegiatan pengeboman dan pembiusan ikan masih banyak digunakan, jumlah ikan yang muncul ketika meti sangat sedikit, sehingga hasil yang diperoleh juga tidak banyak. Sementara itu, pendapatan yang bersumber dari hasil tangkapan ikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nelayan. Meskipun kebanyakan nelayan masih menggunakan armada tangkap dan alat tangkap tradisional, namun mereka tetap memerlukan biaya operasional untuk melaut, antara lain bahan bakar dan keperluan untuk konsumsi nelayan.

Tabel 2.8. Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan, Kec. Kadatua Kab. Buton Tahun 2006, 2008 , 2011 (Gabungan 3 musim)

NO	JENIS PENDAPATAN	NILAI (Rp)		
		2006	2008	2011
1	Rata-rata pendapatan RT/bulan	250.117	693.899	409.675
2	Median pendapatan RT	181.667	491.667	337.833
3	Pendapatan RT minimum/ bulan	11.333	200.000	10.000
4	Pendapatan RT maksimum/ bulan	2.143.333	6.000.000	1.583.333
	N	74	63	42

Sumber:
- Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial terumbu Karang. 2006
- Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan BME 2011

Rendahnya pendapatan rumah tangga nelayan terlihat dari menurunnya pendapatan rumah tangga minimum dan juga maksimum, sehingga median pendapatan atau nilai tengah pendapatan juga menurun secara signifikan. Hal ini sangat berbeda dengan perkembangan pada tahun 2006-2008. Meningkatnya pendapatan rata-rata juga ditandai dengan meningkatnya secara signifikan pendapatan minimum dan maksimum serta median pendapatan. Hal tersebut menggambarkan bahwa kehidupan nelayan pada tahun 2008 terlihat lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, kondisi pada tahun 2011 berbeda, karena banyak nelayan yang pergi melaut seharian, namun hasil tangkapan relatif sedikit bahkan banyak diantaranya tidak mendapatkan hasil tangkapan. Sebagian besar nelayan atau hampir seluruhnya merupakan nelayan tradisional yang sangat tergantung pada musim dan memiliki jangkauan wilayah tangkap yang terbatas. Padahal di sisi lain, mereka juga harus bersaing dengan kapal besar yang mampu mengambil ikan dalam jumlah banyak, termasuk ikan yang kecil. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah nelayan miskin. Bahkan di Desa Kapoa sangat banyak ditemui kapal-kapal nelayan yang tidak digunakan untuk melaut karena menghindari kerugian yang lebih besar, jika tetap melaut.

Berdasarkan grafik 2.5 berikut ini, terlihat bahwa persentase rumah tangga nelayan yang berpenghasilan kurang dari 500 ribu pada tahun 2006 masih sangat besar (lebih dari 80 %). Persentase ini menurun menjadi kurang dari 60 persen pada tahun 2008. Namun demikian pada tahun 2011 meningkat lagi seiring dengan semakin sulitnya mendapatkan hasil tangkapan yang memadai. Tren sebaliknya terjadi pada kelompok pendapatan antara 500 ribu – 1 juta rupiah, yang meningkat. Persentase rumah tangga nelayan yang termasuk dalam pada kelompok pendapatan ini relatif sedikit pada tahun 2006, dan meningkat secara signifikan pada tahun 2008. Tetapi pada tahun

2011, justru menurun lagi walaupun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase rumah tangga pada tahun 2006. Pola yang berbeda ditemui juga pada kelompok pendapatan antara 1 juta hingga kurang dari 1,5 juta rupiah. Persentase rumah tangga nelayan pada kelompok pendapatan ini terus meningkat selama periode tahun 2006- 2011. Walaupun persentase yang ditunjukkan kecil, namun terlihat ada peningkatan yang linear. Hal ini disebabkan adanya sebagian nelayan yang terus melakukan kegiatan kenelayanan pada setiap musim, walaupun dengan jangkauan wilayah tangkap yang berbeda.

Grafik 2.5. Distribusi RT Menurut Kelompok Pendapatan Rata-rata Per Bulan dari Kegiatan Kenelayanan, Kec. Kadatua, Kab. Buton Tahun 2006, 2008 , 2011

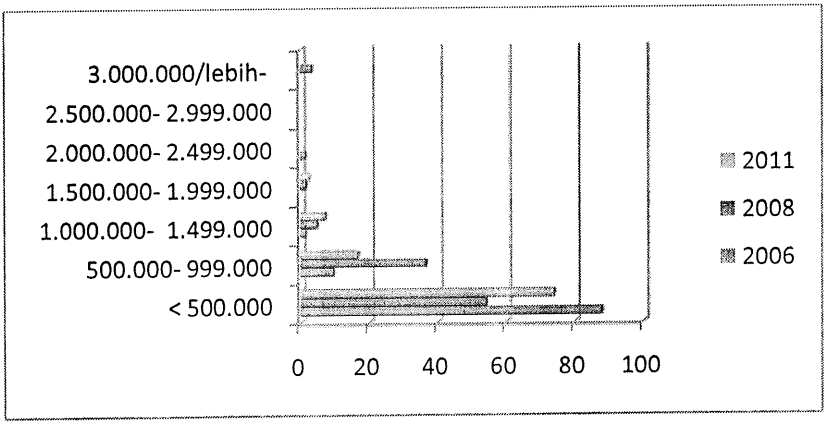

Sumber: - Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial terumbu Karang. 2006
- Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan BME 2011

Secara keseluruhan terlihat bahwa kondisi rumah tangga nelayan masih sangat jauh dari pendapatan yang memadai. Sebagian

besar masih mengelompok pada pendapatan yang kecil (kurang dari 500 ribu rupiah). Dengan pendapatan yang minimum tersebut, sulit bagi nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Misalnya untuk memperbaiki armana tangkap sehingga jangkauan wilayah tangkap menjadi lebih luas. Dengan pendapatan yang minimum tersebut pada akhirnya mereka terus berada dalam lingkaran kemiskinan sehingga sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Jika dikaitkan dengan adanya bantuan dari COREMAP yaitu berupa dana bergulir, terlihat bahwa terdapat beberapa nelayan yang meminjam dana untuk meningkatkan kapasitas kegiatan kenelayanannya, namun tidak banyak yang mencapai hasil optimal. Bahkan pada umumnya mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjaman dana bergulir. Pada bagian pembahasan dana bergulir (bab 3), disebutkan bahwa peminjam dana bergulir yang lancar pengembaliannya adalah justru yang berkaitan dengan kegiatan non nelayan seperti perdagangan. Hal ini dapat lebih menjelaskan bahwa kondisi yang dialami oleh nelayan setempat lebih sulit dari non nelayan. Alat tangkap dan armada tangkap yang sederhana hanya memberikan hasil yang terbatas, sehingga mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga nelayan.

Seperti halnya di Kecamatan Mawasangka, jumlah nelayan miskin di Kecamatan Kadatua juga meningkat, terutama jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2008. Pada tahun 2008 jumlah rumah tangga nelayan yang memiliki pendapatan 500 ribu rupiah hanya 54 persen meningkat menjadi sekitar 74 persen pada tahun 2011. Padahal kondisi nelayan miskin mengalami perbaikan selama 2006-2008, yaitu menurunnya persentase nelayan dengan penghasilan rendah (kurang dari 500 ribu rupiah) dari sekitar 88 menjadi kurang dari 60 persen. Peningkatan persentase kelompok pendapatan terendah ternyata diikuti dengan menurunnya persentase kelompok rumah tangga berpenghasilan tinggi yaitu lebih dari 2 juta

rupiah. Kelompok pendapatan tinggi tersebut bahkan tidak ditemui pada tahun 2011.

Analisis lebih rinci pada setiap musim menunjukkan bahwa penurunan rata-rata pendapatan tersebut merata pada setiap musim (tabel 2.9). Pada tahun 2011, untuk semua musim pendapatan rata-rata nelayan mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan terjadi pada musim gelombang kuat, pancaroba bahkan hingga pada musim gelombang tenang. Musim pancaroba yang pada umumnya dialami dua kali dalam setahun oleh nelayan masih tidak banyak membantu dalam meningkatkan rata-rata pendapatan karena hasil tangkap yang relatif sedikit. Demikian juga pada saat gelombang tenang yang biasanya memperoleh hasil tangkap yang cukup besar pada saat ini bahkan tidak jauh berbeda dengan hasil pada musim-musim lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya populasi ikan teri dalam jangka waktu yang relatif lama dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.9. Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, dan Perubahannya, Kec. Kadatua, Tahun 2006, 2008, 2011

Tahun	Rata-rata Pendapatan RT Nelayan Menurut Musim (Rp)			
	Gel. Kuat	Pancaroba	Gel Tenang	Total
2006	120.216	281.197	375.563	250.117
2008	413.048	634.603	1.034.048	693.899
2011	271.425	446.657	871.146	409.675

Sumber: - Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial terumbu Karang. 2006
- Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan BME 2011

Penurunan pendapatan rata-rata dapat juga dilihat dari perkembangan pendapatan pada rentang waktu tahun 2008-2011 yang

secara umum menunjukkan perkembangan yang negatif. Untuk masing-masing gelombang juga menunjukkan perkembangan yang negatif. Penurunan yang signifikan terlihat pada musim gelombang kuat. Seperti halnya di Kecamatan Mawasangka, frekuensi melaut pada saat gelombang kuat juga menurun, sehingga hasil tangkapan juga menurun. Namun, berbeda halnya dengan di Kecamatan Mawasangka yang memiliki alternatif di bidang penangkapan kepiting, di Kecamatan Kadatua tidak ada alternatif untuk kegiatan kenelayanan. Sehingga hasil dari kegiatan kenelayanan menjadi sangat rendah.

Alternatif kegiatan kenelayanan di Kecamatan Kadatua memang sangat terbatas, termasuk juga di luar penangkapan ikan seperti kegiatan perdagangan ikan. Hasil tangkapan ikan umumnya tidak dijual, tetapi lebih untuk konsumsi rumah tangga masing-masing. Selain karena pasokan ikan sangat kurang, peralatan tangkap yang masih tradisional tidak memungkinkan nelayan memperoleh hasil yang banyak. Di Kadatua hanya terdapat sekitar lima orang yang berprofesi sebagai 'papa lele' yang menjual ikan di sekitar desa dan ikan diperoleh dari kapal besar (kapal redi) yang berlabuh di Desa Bungi. Keuntungan yang diperoleh oleh papa lele rata-rata sekitar . 100 ribu sampai 200 ribu rupiah untuk satu kali penjualan. Tetapi penjualan ikan tidak dapat dilakukan setiap hari, karena sangat tergantung dari keberadaan kapal ikan yang berlabuh di Kadatua. Informasi dari Papa lele di Desa Kapoa menyatakan adanya kesulitan mendapatkan ikan dalam satu tahun terakhir. Dalam keadaan normal, ikan yang banyak dijual adalah ikan layang dan ikan tongkol serta ikan cakalang. Penjualan ikan dilakukan hingga ke kecamatan lain di luar Kecamatan Kadatua. Akibatnya, rata-rata pendapatan nelayan pada tahun 2011 juga menurun. Selain faktor ketersediaan ikan yang menurun, penurunan pendapatan tersebut juga diakibatkan oleh

meningkatnya harga bahan bakar sehingga biaya penangkapan ikan meningkat, sementara harga penjualan relatif tetap.

Grafik 2.6. Perkembangan Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim di Kecamatan Kadatua, Buton (Persen), 2006, 2008, 2011

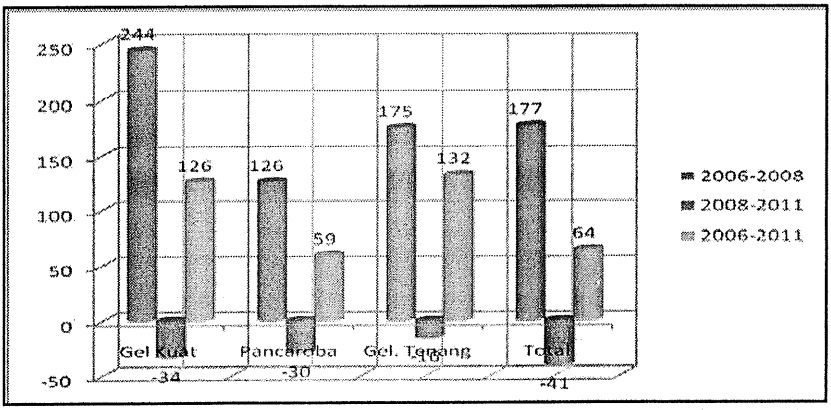

Sumber:
- Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang. 2006
- Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan BME 2011

Faktor perubahan musim sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan diungkapkan oleh beberapa narasumber yang merasakan gelombang kuat menjadi lebih lama, sehingga nelayan sulit memprediksi waktu yang tepat untuk melaut. Sementara itu, kapal-kapal besar yang berlayar mencari ikan hingga ke wilayah tangkapan mereka semakin meningkat. Diantaranya adalah kapal redi yang dapat menangkap ikan sangat banyak dengan berbagai ukuran. Ikan-ikan kecil terkadang ikut terambil dan mengurangi jumlah pasokan ikan bagi nelayan tradisional. Keberhasilan dalam pengelolaan daerah perlindungan laut atau DPL tidak secara signifikan memberikan dampak pada peningkatan hasil

tangkapan nelayan tradisional, karena kalah bersaing dengan penangkapan ikan oleh kapal besar dengan sarana tangkap yang lebih canggih tersebut.

Berdasarkan data tentang perubahan pendapatan rumah tangga di kedua lokasi kajian, maka dapat disimpulkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap dinamika pendapatan masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat terutama di lokasi Kecamatan Mawasangka sangat didominasi oleh kegiatan kenelayanan. Menurunnya pendapatan rata-rata masyarakat yang didominasi oleh kegiatan kenelayanan pada periode akhir program (2009-2011) sangat dipengaruhi oleh faktor alam yaitu perubahan musim yang semakin tidak menentu, sehingga berpengaruh terhadap populasi ikan khususnya ikan teri di Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka. Faktor-faktor lainnya seperti juga dilaporkan pada kajian sebelumnya adalah perbedaan kondisi alam dan akses pasar di kedua lokasi, keragaman hasil laut baik jenis maupun jumlah. Wilayah Mawasangka mempunyai hasil laut yang lebih beragam dan bernilai ekonomi tinggi seperti teri, kepiting dan ikan karang, sementara hasil laut di Kadatua cenderung kurang laku dipasarkan. Selain faktor alam, juga terdapat faktor-faktor lainnya seperti keberadaan alternatif kegiatan ekonomi lainnya baik terkait kenelayanan maupun non nelayan, seperti budidaya rumput laut di Mawasangka dan pertambangan pasir di Kadatua (LIPI dan COREMAP-LIPI, 2008). Kebiasaan merantau masyarakat nelayan pada saat musim gelombang kuat terutama dari Kadatua, di satu sisi memberi peluang masyarakat untuk meningkatkan penghasilan, terutama pada saat sulit ikan. Namun di sisi lain kondisi ini menurunkan daya saing nelayan terutama di Kadatua untuk melakukan kegiatan kenelayanan, karena sarana dan peralatan tangkap yang relatif tertinggal dibandingkan nelayan komersial.

BAB III
DANA BERGULIR (*SEED FUND*) DAN PERUBAHAN PENDAPATAN MASYARAKAT

Program dana bergulir atau *seed fund* merupakan salah satu program COREMAP yang dimaksudkan untuk membantu menyediakan atau mengembangkan usaha ekonomi alternatif masyarakat dalam rangka menambah pendapatan rumah tangga. Dana untuk kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP) diberikan secara bertahap untuk setiap desa binaan COREMAP termasuk untuk kedua lokasi kajian Mawasangka dan Kadatua, dengan jumlah dan tahapan yang berbeda. *Seed fund* atau dikenal juga sebagai dana UEP adalah salah satu jenis bantuan COREMAP untuk lokasi binaan dengan memberikan bantuan modal usaha kecil yang dikelola oleh masyarakat. Tujuan dari bantuan tersebut adalah sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui upaya mendorong kegiatan usaha nelayan dengan tetap mengutamakan upaya pelestarian sumber daya alam terutama terumbu karang. Bantuan dana tersebut dikelola oleh Lembaga Keuangan Mikro atau LKM dengan pendampingan dari LPSTK. Pengurus LKM yang mengelola dana tersebut adalah Bendahara LKM dan Ketua LKM.

Pada awal program peran Ketua LPSTK dalam pengelolaan dana UEP cukup menentukan karena penyaluran dana harus mendapat persetujuan Ketua LPSTK. Namun pada saat survei dilakukan, pengelolaan dana bergulir COREMAP, tidak perlu lagi mendapat persetujuan Ketua LPSTK, hanya mengetahui saja. Hal ini disebabkan adanya perubahan manajemen COREMAP sejak akhir tahun 2010, yaitu seluruh fungsionaris COREMAP seperti CF dan SETO secara bertahap dikurangi perannya. Dengan demikian pengawasan aktif dari

pihak COREMAP juga berkurang. Namun prosedur pengelolan dana UEP tetap dilakukan dan upaya pengembangan dana bergulir tetap dilakukan pengurus COREMAP di lokasi binaan. Sejak berkurangnya pengawasan maka prosedur peminjaman pun tidak seketat pada awal program.

Skema 3.1. Prosedur Peminjaman Dana Bergulir COREMAP

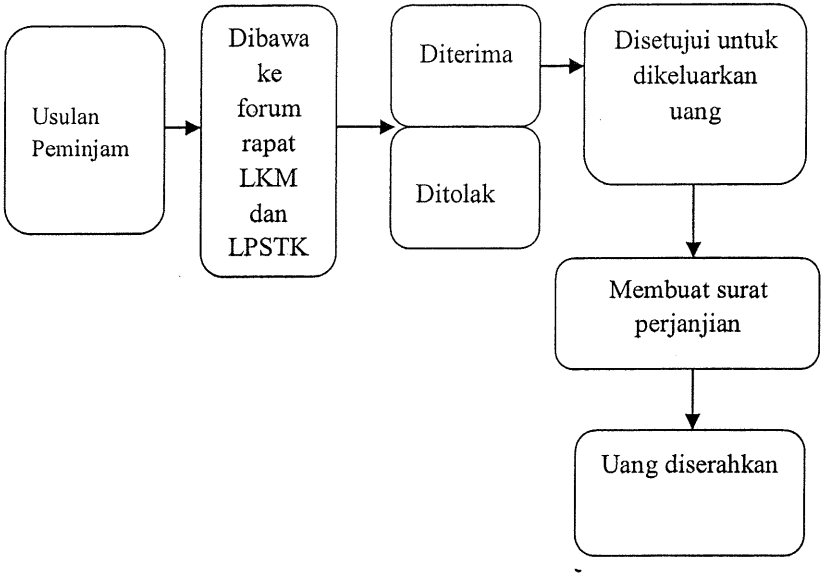

Proses pemberian pinjaman sejak awal pembentukan pengurus sudah disepakati yaitu melalui pengajuan oleh masyarakat kepada pengurus COREMAP dan keputusan diberikannya pinjaman oleh pengurus adalah setelah melalui penilaian kelayakan pemberian bantuan kepada calon peminjam.

Lokasi kajian yang merupakan desa binaan COREMAP dan mendapat dana bergulir UEP adalah Desa Terapung dan Desa Wakambangura di Kecamatan Mawasangka serta di Desa Kapoa dan Desa Wauno di Kecamatan Kadatua. Bantuan *seed fund* atau UEP di

Kawasan Mawasangka dan Kadatua secara umum mulai digulirkan sejak tahun 2008. Dana UEP diberikan sejak tahun 2008 hingga 2010 adalah sebesar 50 juta rupiah hingga 75 juta rupiah. Namun khusus untuk Desa Terapung, total dana yang diperoleh untuk pengelolaan dana bergulir ini adalah 100 juta rupiah. Hal tersebut disebabkan Desa Terapung berhasil memenangkan lomba administrasi pengelolaan dana bergulir sehingga diberikan tambahan dana untuk dikelola sebesar 25 juta rupiah. Keseluruhan dana yang dikelola diberikan secara bertahap rata-rata sebesar 25 juta rupiah dalam setiap tahapnya, sehingga keseluruhan dana yang diterima oleh pengurus LKM diberikan dalam 3 tahap.

Dana bergulir COREMAP idealnya diberikan untuk kepentingan usaha kenelayanan dan usaha non kenelayanan. Proses pengembaliannya ditetapkan melalui kesepakatan bersama yaitu pinjaman harus dikembalikan dengan mencicil sebanyak 10 kali dan bunga pinjaman adalah sebesar 1,2 persen. Ada ketentuan jika cicilan tidak dibayar tepat pada waktunya, maka peminjam akan dikenakan denda sebesar 0,5 persen dari sisa pinjaman yang belum dibayarkan. Tetapi pada kenyataannya tidak sampai ada yang dikenai denda karena masih diberi kepercayaan untuk mengembalikan pinjaman pokoknya saja. Keuntungan dari bunga tersebut kemudian dibagi untuk kas LKM, untuk LPSTK, dan untuk perkembangan dana bergulir selanjutnya. Proporsi pembagian keuntungan dari dana bergulir adalah 45 persen untuk LKM, 25 persen untuk LPSTK, dan untuk tambahan modal sebanyak 30 persen.

Bagian ketiga dari buku ini akan membahas bagaimana pengelolaan *seed fund* dan dampaknya bagi pendapatan masyarakat. Pembahasan perkembangan *seed fund* meliputi : bagian pertama dengan membahas kegiatan *seed fund* secara umum dan selanjutnya akan dijelaskan kondisi pelaksanaannya di masing-masing desa yang di survei. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan diantara masing-

masing desa walaupun dalam satu kawasan terkait dengan pengelolaannya, sehingga pencapaian yang diperlihatkan juga berbeda. Bagian kedua akan membahas perkembangan pendapatan penerima manfaat dana bergulir tersebut. Akan dibahas lebih dalam faktor yang mempengaruhi perkembangan pendapatan masyarakat khususnya penerima dana *seed fund*. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah bagaimana peran dana bergulir dari COREMAP dan juga program bantuan dari luar COREMAP seperti Gapoktan dan PNPM. Dari gambaran umum prosedur peminjaman dan ketentuan pengelolaannya, pada kenyataannya, terdapat beberapa variasi penerapan yang disesuaikan dengan kebijakan dari pengurus masing-masing. Seperti adanya ketetapan untuk menyerahkan jaminan di awal peminjaman, ketentuan kriteria peminjam dan permasalahan kemampuan SDM. Berikut akan dibahas pelaksanaan dana bergulir di masing-masing kawasan yaitu Kecamatan Mawasangka dan Kadutua.

3.1. Kegiatan Dana Bergulir *(Seed Fund)*

A. Kecamatan Mawasangka

Secara umum pelaksanaan dana bergulir di kedua lokasi penelitian telah berhasil meningkatkan perguliran dana namun tidak cukup besar dan sebagian mengalami kemacetan perguliran dana. Bahkan di Desa Terapung dan Desa Wakambangura, seluruh dana habis dipinjamkan sehingga sisa dana yang tersimpan hampir tidak ada atau relatif kecil. Tetapi alasan yang mendasari tidak ada atau kecilnya dana di dalam kas bendahara berbeda. Idealnya pengembalian dana setiap bulan terkumpul dan dapat segera disalurkan kepada peminjam lainnya, sehingga dana yang tersimpan dalam kas tidak perlu besar. Namun karena berbagai alasan pengembalian dana tidak selamanya lancar dan tepat waktu, sehingga penambahan jumlah peminjam tersendat. Masalah yang dihadapi peminjam dana bergulir setahun terakhir umumnya adalah tidak

mampu mengembalikan akibat panceklik yang berkepanjangan. Sejak pertengahan tahun 2010 hingga awal tahun 2011 nelayan di Desa Terapung misalnya tidak memperolah hasil tangkapan ikan teri yang selama ini menjadi unggulan hasil perikanan tangkap di daerah ini. Akibatnya hampir seluruh peminjam yang merupakan nelayan ikan teri tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Namun, pengurus percaya bahwa jika kondisi sudah normal, maka cicilan akan lancar kembali, seperti tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, di Desa Wakambangura, permasalahan tersendatnya pengembalian dana bergulir lebih pada manajemen pengelolaannya.

Pengelolaan dana bergulir tidak berjalan dengan baik akibat adanya manajemen keuangan yang tertutup dan tidak transparan. Secara kebetulan dana UEP di wilayah ini dikelola oleh bendahara LKM dan ketua LPSTK yang mempunyai hubungan kekerabatan. Idealnya dana bergulir dari COREMAP dikelola secara transparan oleh pengurus COREMAP (LKM), agar kepercayaan masyarakat terjaga. Dalam hal ini, pembukuan hanya diketahui oleh satu pihak yaitu bendahara dan ketua LPSTK yang kebetulan merupakan pasangan suami isteri. Ketua LKM1 yang secara formal seharusnya bertanggung jawab, dalam realitasnya tidak banyak mengetahui tentang pengelolaan dana *seed fund* kecuali pada awal-awal pelaksanaan. Akibatnya pengelolaan dana selama ini berjalan tanpa control dan persetujuan Ketua LKM. Administrasi pembukuan untuk peminjam dana juga relative tertutup, sehingga tidak diketahui dengan pasti besarnya dana yang disalurkan, pengembalian dana serta keuntungan yang diperoleh.. Menurut informasi dari bendaraha LKM,

[1] Pembentukan penggurus LKM di Desa Wakambangura tergolong tidak sesuai prosedur karena dilakukan dalam waktu yang singkat. Sehingga ketika penunjukkan bendahara yang harus memiliki kualifikasi tertentu, yang diangkat akhirnya pasangan sendiri. Padahal ada ketentuan bahwa untuk menjadi pengurus diharapkan tidak merupakan pasangan suami istri.

semua penyaluran dan pengembalian dana tercatat dengan baik, Namun sistem pengelolaan dana yang dianggap tidak transparan dalam memberikan pinjaman mengakibatkan ketidaksenangan di kalangan masyarakat. Banyak timbul kecurigaan bahwa bantuan itu hanya untuk kalangan tertentu (termasuk pengelola) dan tidak sesuai dengan tujuan semula yaitu kesejahteraan masyarakat umumnya dan nelayan pada khususnya.

Besarnya pinjaman didasarkan pada pertimbangan antara kebutuhan calon peminjam dan ketersediaan dana di kas LKM. Selanjutnya, LKM akan mempelajari kebutuhan peminjam dan kemampuan mengembalikannya serta ketersediaan dana yang ada di bendahara LKM. LKM tetap berupaya agar dana yang dipinjam benar-benar digunakan untuk modal usaha baik di bidang kenelayanan maupun di luar kenelayanan seperti perdagangan dan usaha lainnya. Karena jika dana yang digunakan untuk kepentingan modal usaha, besar kemungkinannya akan dapat terus berkembang dan lancar dalam pengembaliannya. Keuntungan dari usaha tersebut dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman. Sebaliknya jika digunakan untuk konsumsi maka sudah dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dalam pengembalian karena dana tidak berkembang. Namun, ada pertimbangan lain bagi calon peminjam yang akan memanfaatkan pinjaman untuk kebutuhan non ekonomi yaitu harus memiliki usaha yang sedang berjalan. Oleh karena itu benar-benar diupayakan untuk mengetahui secara detail pemanfaatan dana yang dipinjam. Kenyataannya seringkali kondisi peminjam tidak sesuai dengan keterangan awal. Untuk peminjaman pertama, rata-rata peminjam melalui seleksi dan dapat dikontrol penggunaan pinjamannya. Prioritas peminjam adalah mereka yang menggunakan pinjaman untuk peningkatan kegiatan usaha agar dapat memperbaiki kondisi ekonominya atau membuka usaha baru daripada menganggur.

Permasalahan dalam pengontrolan pemanfaatan dana bergulir tidak terlepas dari karakteristik penduduk setempat. Seperti kecenderungan penduduk di kedua lokasi untuk pergi merantau, terutama pada masa sulit ikan atau gelombang kuat. Penggunaan dana bergulir juga menyesuaikan kebutuhan penduduk yaitu untuk modal merantau. Pada awal peminjaman, calon peminjam biasanya menyatakan dana yang dipinjam akan digunakan untuk usaha, tetapi kenyataannya digunakan untuk modal merantau (transportasi). Di sisi lain, dilihat dari kelancaran pengembalian dana para perantau yang berhasil biasanya lebih cepat dan lebih lancar pengembaliannya dari peminjam lainnya. Biasanya pengembalikan dana dilakukan sekaligus pada saat mereka pulang ke desa asal atau dikirim dari rantau kalau dana sudah tersedia. Pada umumnya, rata-rata besarnya peminjaman per orang berkisar antara 500 ribu sampai 3 juta rupiah. Seseorang yang sudah pernah meminjam dapat mengajukan pinjaman ulang jika selama pinjam menunjukkan keteraturan dalam pengembalian pinjaman. Pertimbangan lainnya adalah perkembangan usaha yang dilakukan dan manfaat pinjaman bagi kesejahteraan rumah tangganya.

Kegiatan *Seed Fund*

Pelaksanaan dana bergulir di Kecamatan Mawasangka pada awalnya cukup baik karena dana yang diterima dari COREMAP lebih banyak dibandingkan dengan dana bergulir untuk Kecamatan Kadatua. Kondisi ini menyebabkan peluang untuk meminjamkan dana menjadi lebih besar. Namun keadaan saat survei memperlihatkan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan karena faktor teknis pelaksanaan dan non teknis. Fenomena yang hampir sama terkait dengan dana bergulir terjadi di kedua desa sampel kajian yaitu adanya kemacetan pembayaran oleh sebagian peminjam dana bergulir, dan tidak terdapat dana tunai di kas bendahara.

Permasalahan yang muncul diantaranya adalah masalah teknis yaitu terkait dengan masalah manajemen pengelolaan, seperti sistem pemberian pinjaman, pengembalian serta sistem pembukuan. Sebagian masyarakat menyatakan tidak memiliki akses untuk meminjam dana bergulir, karena dianggap peminjam umumnya hanya dari kalangan tertentu yang dekat dengan pengurus COREMAP. Akibatnya adalah munculnya ketidakpercayaan antara pengurus COREMAP dan masyarakat. Fenomena ini lebih menonjol di Desa Wakambangura dibanding Desa Terapung. Terkait dengan proses pengembalian pinjaman juga cenderung tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, karena pola pembayaran disesuaikan dengan jenis pekerjaan masyarakat peminjam. Diantaranya terdapat peminjam yang terpaksa menunggak beberapa bulan, namun membayar sekaligus pinjaman pada waktu memperoleh hasil panen atau menerima kiriman dari rantau. Demikian juga sebaliknya, terdapat peminjam yang bisa membayar secara harian namun jumlah yang dibayarkan relatif kecil.

Sedangkan alasan non teknis diantaranya adalah karena pengaruh alam yaitu terjadinya panceklik hasil laut. Hasil tangkapan ikan menurun drastis bahkan beberapa nelayan tidak mendapatkan hasil penangkapan ikan dalam satu tahun terakhir, sebagai dampak perubahan musim yang ekstrim. Salah satu narasumber menyebutkan bahwa kondisi perairan laut yang tidak menentu termasuk juga suhu permukaan laut yang berubah menyebabkan ikan berpindah ke lokasi lain. Kemungkinan keadaan berlanjut sebelum normal kembali yaitu keadaan alam mendekati kondisi yang sesuai dengan habitat semula. Seperti terjadi di Desa Terapung hampir seluruh nelayan ikan teri tidak mendapatkan hasil karena musim gelombang kuat lebih dominan dibandingkan dengan gelombang tenang. Kondisi panceklik sudah tentu akan mempengaruhi pendapatan nelayan secara keseluruhan dan menghambat dalam pembayaran cicilan pinjaman.

Dari semua alasan keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan dana bergulir, terdapat satu hal yang juga mendukung keberhasilan dalam administrasi pengelolaan dana bergulir Coremap. Hal tersebut adalah adanya fasilitator yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap program Coremap. Salah satu contohnya adalah ketika awal tahun 2011 belum diturunkan SK untuk fasilitator (CF) atau fasilitator lapangan, banyak diantaranya yang sudah tidak lagi mengawasi daerah binaannya karena kontraknya sudah berakhir. Tetapi ada juga yang masih tetap berupaya memantau keadaan desa binaannya sehingga jika ada permasalahan dapat dibantu penyelesaian. Hal ini dialami oleh Desa Terapung yang mendapatkan pendampingan hingga dapat menyusun laporan dengan baik. Sementara itu, bendahara LKM juga memiliki kemampuan dalam manajemen keuangan. Sehingga menjadi lebih mudah dalam mengelola keuangan. Secara umum, sejak tahun 2010 sudah tidak ada pengawasan dari Coremap pusat dan berdampak pada mulai tidak dibuat pembukuan yang baik di sebagian besar desa binaan Coremap seperti di Desa Wakambangura. Walaupun pencatatan untuk peminjaman dan pembayaran tetap dilakukan tetapi tidak seperti yang diharapkan.

Berdasarkan informasi dari pengurus LKM masing-masing desa lokasi survei disebutkan bahwa dana bergulir pada dasarnya sangat berguna untuk membantu perkembangan ekonomi masyarakat. Walaupun dana yang dipinjamkan tidak terlalu besar tetapi cukup untuk memulai membuka usaha atau menambah modal kerja di bidang kenelayanan. Berdasarkan hasil survei, secara umum masyarakat di Kecamatan Mawasangka meminjam dana bergulir berkisar antara 500 ribu rupiah hingga 2,5 juta rupiah. Pinjaman tersebut dimulai pada tahap pertama dana diturunkan oleh Coremap dan terus berkembang untuk peminjaman tahap kedua dan ketiga.

Tabel 3.1. Besarnya Dana Bergulir yang Dipinjam Di Kecamatan Mawasangka

No	Besarnya Pinjaman Dana Bergulir	Persentase Peminjam Tahap I	Persentase Peminjam Tahap II	Persentase Peminjam Tahap III
1	< Rp. 500.000	15	25.0	-
2	Rp. 1.000.000	22.5	16.7	100
3	Rp. 1.500.000	17.5	16.7	-
4	Rp. 2.000.000	20	16.7	-
5	Rp. 2.500.000	22.5	25	-
6	Rp. 3.000.000	2.5	0	-
Jumlah N		40	12	1

Sumber : Data Survei BME 2011

Tabel 3.1. diatas memperlihatkan pada tahap pertama dana digulirkan, jumlah peminjam masih cukup banyak. Pada tahap kedua, jumlah peminjam tidak sebanyak pada tahap pertama, karena masih ada penerima dana bergulir yang belum melunasi pinjamannya. Sedangkan responden yang meminjam pada perguliran dana tahap ketiga hanya ditemui satu orang. Dari semua persentase di atas, termasuk di dalamnya adalah masyarakat yang meminjam lebih dari satu kali. Menurut narasumber pengurus LKM, untuk dapat memperoleh pinjaman dana bergulir lebih dari satu kali perlu dipertimbangkan bagaimana proses pembayaran pada peminjaman tahap pertama. Salah seorang narasumber yang memiliki pengalaman meminjam dua kali, menyatakan bahwa pada peminjaman pertama, dana dikembalikan sekaligus pada saat panen rumput laut, sisa dari bunga pinjamannya dibayar secara mencicil setiap hari. Jadi dapat dilihat bahwa penerapan aturan pengembalian rutin setiap bulan tidak berjalan sepenuhnya. Tetapi bunga pinjaman yang ditetapkan terus diberlakukan, padahal sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang

disepakati bersama. Hal tersebut juga akan menyulitkan dalam sistem pembukuannya.

Secara umum penggunaan pinjaman dana bergulir di Kecamatan Mawasangka sebagian besar digunakan untuk usaha perdagangan dan kenelayanan serta budidaya rumput laut. Walaupun dana bergulir Coremap diharapkan sepenuhnya untuk kegiatan perekonomian, namun ada juga pemanfaatannya di luar kegunaan ekonomi seperti untuk pendidikan, konsumsi rumah tangga dan perbaikan rumah. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut.

Tabel 3.2. Pemanfaatan Dana Bergulir Di Kecamatan Mawasangka

No	Pemanfaatan	Persentase peminjam
A. Kegiatan ekonomi		
1	Usaha perdagangan (modal dagang, warung, pedagang keliling, pedagang bbm, dll)	45,0
2	Kegiatan perikanan tangkap (membeli/memperbaiki sarana produksi, seperti alat tangkap, body kapal, mesin kapal, modal melaut/ bensin, ransum)	42,5
3	Budidaya rumput laut	20
4	Usaha peternakan (ayam, kambing, sapi, babi) dan pertanian (singkong, jagung, dll)	2.5
B. Kegiatan non ekonomi		
5	Biaya pendidikan	2.5
6	Konsumsi rumah tangga	2.5
7	Perbaikan rumah	2.5
Jumlah N = 40		

Sumber : Survei BME 2011

Jika dibandingkan dengan kondisi pemanfaatan untuk kenelayanan di Kecamatan Kadatua lebih sedikit dibandingkan pemanfaatan untuk kenelayanan di Kecamatan Mawasangka. Proporsi terbesar lainnya adalah untuk pengembangan budidaya rumput laut. Berbeda halnya dengan masyarakat di Kecamatan Kadatua yang memilih untuk bekerja di bidang non perikanan dan digunakan untuk modal merantau, maka masyarakat di Mawasangka khususnya di Desa Wakambangura masih memilih menekuni pekerjaan sebagai nelayan dan budidaya rumput laut. Beberapa narasumber mengungkapkan bahwa modal yang diperlukan dalam usaha budidaya rumput laut yaitu untuk membeli bibit dan peralatan lain seperti kayu dan tali pengikat. Sebagian masyarakat di Desa Wakambangura melakukan usaha budidaya rumput laut, baik sebagai pemilik atau bekerja pada usaha budidaya milik orang lain.

Perkembangan Usaha

Dana yang dimanfaatkan untuk modal usaha baik usaha perdagangan maupun bidang kenelayanan menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan sebagian besar masih tetap berjalan. Bahkan untuk pengembangan budidaya rumput laut semuanya masih tetap berjalan khususnya di Desa Wakambangura. Berbeda halnya dengan usaha perdagangan dan usaha kegiatan perikanan. Stabilnya kondisi usaha di bidang budidaya rumput laut disebabkan karena sistem pemasaran di Desa Wakambangura cukup baik. Hasil panen budidaya rumput dapat dipastikan akan diambil oleh pengumpul yang berjumlah tiga orang. Dari ketiga pengumpul tersebut, harga beli ke petani tidak terlalu berbeda, sehingga tidak terjadi persaingan harga yang dapat menjatuhkan harga. Biasanya, pengumpul hasil panen rumput laut juga sekaligus memberikan modal usaha. Modal usaha tersebut kemudian dibayarkan dengan langsung memotong hasil pembayaran

hasil panen rumput laut. Kondisi usaha penerima dana bergulir secara detail dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut ini.

Tabel 3.3. Kondisi Usaha yang Memanfaatkan Dana Bergulir

No	Pemanfaatan	Kondisi Usaha Saat Ini		N
		Masih berjalan (persen)	Terhenti (persen)	
1	Usaha perdagangan (modal dagang, warung, pedagang keliling, pedagang bbm, dll)	77,8	23,5	18
2	Kegiatan perikanan tangkap (membeli/memperbaiki sarana produksi, seperti alat tangkap, body kapal, mesin kapal, modal melaut/ bensin, ransum)	88,2	11,8	17
3	Budidaya rumput laut	100	0	8
4	Usaha peternakan (ayam, kambing, sapi, babi) dan pertanian (singkong, jagung, dll)	100	0	1

Sumber : Survei BME, 2011

Dari perkembangan usaha yang dilakukan tersebut, sebagian besar masih tetap jenis atau komoditas usahanya. Salah satu contohnya adalah usaha budidaya rumput laut yang cenderung tetap jenis dan komoditasnya. Jumlah hasil panen juga cenderung tetap karena luasan lahan budidaya tidak bertambah. Sementara itu, kondisi pasar rumput laut cenderung tetap, jika mengalami perubahan tidak terlalu menonjol. Keadaan bertambahnya jenis dan komoditas lebih banyak ditemui pada usaha perdagangan seperti buka warung. Dengan modal yang dipinjam, perlahan-lahan komoditas usaha terus dapat

bertambah. Jenis makanan ringan yang dijual bertambah jumlahnya dan luasan warung juga bertambah.

Sementara itu, usaha kenelayanan masih banyak yang tetap berjalan khususnya nelayan tangkap. Walaupun kondisi nelayan ikan teri khususnya di Desa terapung tidak dapat melakukan kegiatan menangkap ikan, tetapi ada diantara mereka yang beralih menjadi nelayan kepiting. Usaha pengolahan kepiting sedang meningkat di Desa terapung dan pemasarannya sudah ke luar daerah bahkan ada yang diekspor ke Singapura walaupun tidak secara langsung tetapi melalui pengumpul. Tenaga kerja yang terserap dalam usaha pengolahan kepiting juga cukup banyak. Diperlukan adanya pekerja yang membersihkan setiap bagian kepiting, memotong dan mengepak dalam kemasan tertentu. Setelah dalam kemasan khusus, kemudian baru dapat dikirim.

Grafik 3.1. Perkembangan Usaha Setelah Mendapatkan Dana Bergulir Di Kecamatan Mawasangka

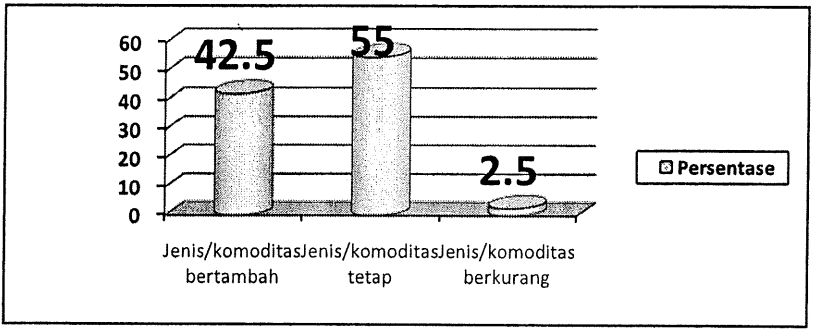

Sumber : Survei BME, 2011

Sejalan dengan pekembangan usaha yang dilakukan, terjadi juga peningkatan hasil usaha. Lebih dari 50 persen peminjam yang usahanya berkembang memperoleh peningkatan hasil usaha. Hasil perkembangan usaha yang tetap menyebabkan hasil usaha yang

diperoleh juga cenderung tetap dan untuk usaha yang komoditas usahanya berkurang, hasil usaha yang diterima juga menurun.

Grafik 3.2. Perkembangan Hasil Usaha Setelah Mendapat Dana Bergulir di Kecamatan Mawasangka

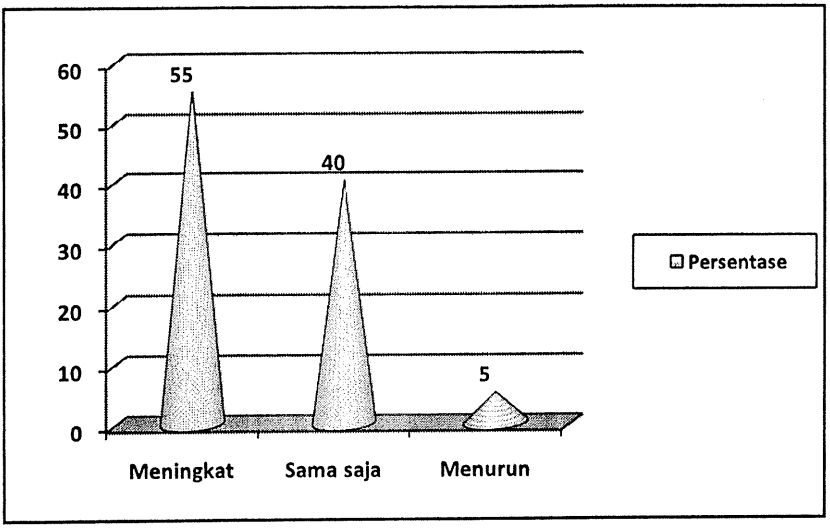

Sumber : Survei BME 2011

Gambaran utuh terkait dengan pengelolaan dana bergulir Coremap akan dibahas untuk masing-masing desa. Dana yang diterima oleh Desa terapung berbeda dengan dana yang diterima oleh Desa Wakambangura yaitu masing-masing Rp. 75.000.000 dan Rp. 100.000.000.

Pelaksanaan Dana Bergulir Di Desa Wakambangura

Pengelolaan dana bergulir Coremap di Desa Wakambangura secara umum tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal dana digulirkan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa dana bergulir Coremap sulit diakses dan yang meminjam hanya kalangan tertentu

yang dekat dengan pengurus LKM. Namun, peminjaman dana oleh masyarakat juga tidak sesuai dengan prosedur yang diharapkan. Ketidaksesuaian prosedur tersebut diantaranya proses pengembalian dana pinjaman dan bunga yang ditetapkan.

Secara umum peraturan yang ditetapkan adalah bunga 1,2 persen dengan cicilan selama 10 kali. Tetapi banyak masyarakat yang mengembalikan cicilan langsung sekaligus ketika mempunyai uang. Ada juga sebagian penerima dana bergulir mengembalikan di bulan pertama dan pada bulan-bulan selanjutnya dicicil setiap hari bunganya semampu peminjam.

Ketidakjelasan pelaksanaan tersebut ternyata telah menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat atas perguliran dana Coremap tersebut. Bahkan diantara pengurus LKM pun tidak mengetahui dengan pasti pelaksanaan peminjaman dana bergulir Coremap. Ketidakpercayan masyarakat juga disebabkan karena bendahara LKM adalah pasangan dari ketua LPSTK. Sehingga dianggap tidak independen dalam pengawasannya. Bahkan diantara pengurus LKM juga memiliki posisi yang sulit untuk mengawasi karena akses untuk mengetahui perguliran dana sangat terbatas. Pelaporan dari bendahara tidak lagi berjalan seperti pada awal berjalannya peminjaman dana. Bahkan bunga keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana bergulir dimodifikasi distribusinya, yaitu ada sebagian yang digunakan untuk administrasi atau digunakan untuk keperluan ketua LPSTK. Penggunaan sebagian keuntungan tersebut terkait adanya kasus konflik antara masyarakat dan pengeboman oleh seorang nelayan (LO) yang sudah sering melakukan pengeboman ikan. Akibat dari konflik tersebut, ketua LPSTK yang mendapatkan ancaman dari nelayan yang menjadi korban konflik tersebut sehingga tidak lagi berani melaut. Akibatnya pendapatan rumah tangganya menjadi berkurang. Sementara itu, ketua LPSTK juga berkewajiban ke kabupaten Baubau untuk menjadi saksi. Hal

tersebut membutuhkan dana operasional dan diambilkan dari keuntungan modal pengelolaan dana bergulir Coremap. Menurut penjelasan dari ketua LPSTK, dana yang terpakai tersebut pada suatu saat nanti akan dikembalikan untuk dijadikan modal dana bergulir. Semua keputusan tersebut dilakukan oleh ketua LPSTK dengan bendahara LPSTK tanpa melibatkan ketua LKM. Dari modal dana bergulir yang diberikan oleh Coremap, pembagian keuntungan sebagian untuk lembaga LPSTK. Pembagiannya adalah 45 persen untuk LKM, 25 persen untuk LPSTK, 20 persen untuk aministrasi dan ada 30 persen untuk tambahan modal.

Rendahnya akses ketua LKM dan pengurus lainnya terhadap perguliran dana Coremap tersebut tidak terlepas dari latar belakang pengurus LKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diketahui bahwa penentuan pengurus LKM ditentukan dalam waktu yang sangat singkat sehingga tidak dipertimbangan kapasitas dan komitmennya. Bendahara LKM pada akhirnya yang ditunjuk adalah istri dari LPSTK sendiri dan ketua LKM tidak terjalin hubungan kelembagaan yang profesional.

Ketidakjelasan perguliran dana bergulir Coremap tercermin dari pembukuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Coremap. Pembukuan yang disusun hanya seperti kas kecil yang mencatat uang keluar dan uang yang dikembalikan oleh peminjam. Sehingga tidak langsung dapat diketahui berapa perguliran dana, berapa dana yang macet dan berapa dana yang sudah berkembang. Kondisi pembukuan menjadi semakin tidak terkontrol sejak tidak adanya pengawasan dari Coremap Kabupaten. Pengawasan sudah tidak ada sejak akhir tahun 2010. Selanjutnya pengelolaan dilakukan secara mandiri dan mekanisme pelaporan ke ketua LKM dari bendahara juga tidak lagi lancar seperti awal pelaksanaan dana bergulir. Oleh karena itu terkesan tidak ada transparansi dan memungkinkan timbul adanya ketidakpercayaan di kalangan

masyarakat bahkan di kalangan pengurus LPSTK, LKM, dan pemerintahan desa. Sementara itu di sisi lain, menurut informasi dari salah seorang yang meminjam dana *seed fund*, bahwa penagihan dana yang dipinjam oleh bendahara cukup ketat. Pengembalian diwajibkan tepat waktu dan secara intensif penagihan dilakukan langsung oleh bendahara. Seharusnya dana yang bergulir bisa lebih baik hasilnya jika didukung oleh pembukuan yang lebih baik. Namun, menurut seorang narasumber disebutkan bahwa semua penjelasan dari pihak bendahara LKM dan ketua LPSTK masih perlu dicheck kebenarannya akibat adanya beberapa kejanggalan pengelolaan dana bergulir tersebut. Menurut informasi dari pengurus desa, dana yang macet atau tidak dapat digulirkan lagi cukup besar dan tidak terdata. Dana yang macet ini direncanakan akan diputihkan atau menunggu keputusan lebih lanjut dari pihak COREMAP Kabupaten Bau-bau.

Total dana bergulir dari COREMAP untuk Desa Wakambangura sebanyak 75 juta rupiah dan diberikan dalam 3 tahap yaitu Bulan Januari 2008 (25 juta rupiah), bulan November 2008 (25 juta rupiah) dan pada Bulan Oktober 2009 (25 juta rupiah).

Sebagaimana di desa binaan Coremap lainnya, ketentuan peminjaman dana bergulir dikenakan bunga sebesar 1,2 persen dan dibayarkan dala, kurun waktu 10 bulan. Tetapi pada kenyataannya ketentuan tersebut tidak berlaku. Terdapat beberapa orang yang meminjam tetapi mengembalikan pinjaman sesuai dengan keadaan keuangan rumah tangganya. Ada yang mengembalikan sekaligus ketika sudah punya uang dan ada juga yang mengembalikan uang pokok sekaligus dan bunganya yang dicicil setiap hari sesuai dengan kemampuan peminjam.

Tidak semua peminjam diberikan kredit karena melihat kemampuan peminjam, atau catatan pengembalian dari peminjam tersebut. Yang diberikan pinjaman adalah mereka yang memang

dianggap memiliki komitmen untuk mengembalikan tepat pada waktunya. Jadi sering ditemui masyarakat yang akan meminjam tetapi terpaksa tidak diberikan. Penolakan lainnya juga terjadi akibat dana kas tidak mencukupi untuk memenuhi usulan peminjam. Akibat dari tidak meratanya dana yang dipinjamkan banyak menimbulkan ketidaksenangan di kalangan masyarakat.

Total peminjam sejak awal dana digulirkan yaitu tahun 2008-awal tahun 2011 ada sebanyak 153 orang termasuk peminjam yang mengulang. Dari jumlah tersebut, saat ini dana bergulir pada 54 orang. Jumlah peminjam baru ada sebanyak 27 orang dan lainnya adalah peminjam lebih dari satu kali. Peminjam 3 kali ada sebanyak 4 orang, dan yang meminjam 2 kali ada 22 orang. Rata-rata peminjam setiap bulannya bertambah 3-4 orang.

Jumlah penerima kredit dari dana tahap pertama (2008-2009) ada sebanyak 89 orang. Pada tahun 2010 jumlah peminjam ada 51 orang dan pada tahun 2011 ada peminjam sebanyak 13 orang. Pada awal dana diberikan jumlah peminjam cukup banyak dan sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan usaha baik perdagangan maupun kenelayanan dan budidaya rumput laut. Rata-rata pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan kenelayanan termasuk untuk kegiatan budidaya rumput laut. Selain untuk kegiatan kenelayanan juga digunakan untuk kepentingan usaha dagang dan juga merantau.

Dari tahun 2008- 2009 perkembangan jasa ada sekitar 2 juta rupiah. Dana yang bergulir di masyarakat sekitar 69 juta rupiah. Ada sebagian kecil yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah "kasus penganiayaan terhadap pelaku bom ikan". Dari jumlah tersebut ada 54 orang yang tercatat sedang meminjam. Sementara itu, tercatat 10-15 orang yang menunggak pinjaman.

Jumlah penunggak cukup banyak yaitu mencapai sekitar 50 persen. Penerima manfaat dana bergulir Coremap yang dikategorikan

menunggak tersebut meliputi mereka yang memiliki peluang untuk mengembalikan tetapi saat ini belum juga mengembalikan. Pada tahun 2009 yang benar-benar tidak membayar ada satu orang. Pada tahun 2010 masih banyak yang tidak lancar membayar tetapi masih dalam rentang waktu pencicilan pinjaman. Proses pembayaran tidak semuanya mengharapkan kesadaran masyarakat yang meminjam, tetapi banyak yang harus ditagih secara terus menerus ke rumah-rumah. Dan kendalanya adalah pada saat menagih peminjamnya tidak ada di tempat.

Masyarakat yang meminjam untuk keperluan usaha perdagangan atau misalnya pedagang sayur, pembayarannya cukup lancar karena perputaran modalnya lebih baik. Sementara itu, kalau dana *seed fund* digunakan untuk pengembangan usaha rumput laut, pola pengembaliannya biasanya sekaligus walaupun tertunda 2-3 bulan. Walaupun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi dana tetap dapat kembali. Pengambalian pinjaman yang tidak lancar pada umumnya jika dana yang dipinjam untuk keperluan non ekonomi. Misalnya untuk kepentingan konsumsi rumah tangga. Akibatnya dana yang dipinjam tersebut tidak berkembang dan akan kesulitan dalam mengembalikan.

Saat ini dana yang beredar di masyarakat ada sebanyak Rp. 68.716.500 tersebar pada 54 orang peminjam. Dari tahun 2009 diambil dana sebanyak 12 juta rupiah oleh ketua LPSTK untuk penyelesaikan kasus konflik antara pengebom dan masyarakat yang dituduh menganiaya. Perkembangan dana jasa dari tahun 2008 sampai akhir tahun 2009 sebanyak 2 juta rupiah. Sebenarnya perkembangan jasa lebih dari 2 juta rupiah yaitu sekitar 5 juta rupiah, tetapi karena aliran dana tidak tercatat dengan baik dan ada penggunaan yang diluar penggunaan yang seharusnya maka terjadi selisih perkembangan jasa.

Tabel 3.4. Matrik Perkembangan Pelaksanaan Dana Bergulir (*Seed Fund*) di Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tahun 2011

Uraian	Kondisi Awal		Kondisi saat ini	Keterangan
	Tahap I	Tahap II		
Jumlah anggota (org)	89	51	54	Jumlah peminjam saat ini ada 54 orang. Peminjam baru 13 orang
Satu kali			27	
Dua kali			23	
Lebih dari dua kali			4	
Jumlah dana yang berputar (aktif)				Dana tahap pertama diberikan 2 tahap masing-masing Rp. 25.000.000
Jumlah dana yang tidak dikembalikan (macet)	30 persen (13.206.600)		(68.716.500)	
Minimum	500.000		500.000	
Maksimum	2.500.000		2.500.000	

Sumber: Data Primer hasil wawancara Bendahara LKM, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Pemanfaatan dana tersebut diantaranya digunakan untuk kegiatan usaha kenelayanan baik nelayan pukat maupun nelayan tangkap. Selain untuk kegiatan kenelayanan, pinjaman juga digunakan untuk usaha budidaya rumput laut dan usaha perdagangan. Jumlah yang dipinjam bervariasi dalam rentang 1 juta rupiah sampai dengan 2,5 juta rupiah. Menurut penjelasan dari ketua LPSTK, diinformasikan bahwa rata-rata pendapatan mereka per bulan adalah berkisar antara 1 juta rupiah hingga 2,7 juta rupiah. Dengan pendapatan rata-rata tersebut diyakini pinjaman dana bergulir akan dapat dikembalikan

sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Terkait dengan pemanfaatan dana *seed fund* dan jumlah yang dipinjamkan, rinciannya sebagai berikut.

Tabel 3.5. Pemanfaatan Dana *Seed fund* di Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka

No	Pemanfaatan	Jumlah Peminjam
1	Budidaya rumput laut	15
2	Usaha perdagangan	14
3	Nelayan pukat	4
4	Pada awalnya mengajukan untuk usaha atau alasan lain, tetapi setelah 2-3 bulan, dana tersebut digunakan untuk Merantau	11
5	Tidak jelas	10

Sumber : Wawancara dengan Ketua LPSTK dan Bendahara LKM, 2011

Kecenderungan untuk merantau ternyata juga banyak ditemui di Desa Wakambangura, tetapi masih tidak lebih banyak dibandingkan dengan di Desa Kapoa dan Desa Wauno. Pada umumnya mereka sudah memiliki pekerjaan namun masih mencoba untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Merantau yang dilakukan penduduk di Desa Wakambangura tidak identik dengan kondisi rumah tangga yang miskin, tetapi hanya untuk menambah penghasilan. Pada kenyataannya, peluang usaha di bidang budidaya rumput laut sangat menjanjikan. Walaupun terjadi penyimpangan musim seperti yang diungkapkan oleh salah seorang narasumber yaitu gelombang kuat yang lebih dominan, namun memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan rumput laut. Rumput laut akan tumbuh lebih besar dan bisa meningkatkan berat penjualan. Bahkan ada diantara salah satu penerima manfaat dana *seed fund* dan berhasil

dalam budidaya rumput laut dan memiliki aset yang cukup besar tetap saja memilih untuk merantau. Hal tersebut disebabkan karena sudah memiliki jaringan usaha di luar daerah.

Sejalan dengan penjelasan oleh pengurus LKM dan LPSTK, pemanfaatan terbesar adalah untuk usaha kenelayanan dan budidaya rumput laut. Dari usaha tersebut yang masih tetap bertahan adalah budidaya rumput laut dan memberikan hasil usaha yang meningkat juga.

Pelaksanaan Dana Bergulir Di Desa Terapung

Masyarakat yang meminjam adalah masyarakat di sekitar desa yang membutuhkan modal usaha untuk meningkatkan kondisi perekonomian rumah tangga. Berbeda dengan pengelolaan tahap awal di Desa Kapoa yang menetapkan persyaratan jaminan, maka di Desa Terapung tidak diperlukan persyaratan khusus untuk meminjam dan tidak diperlukan jaminan atau boreh. Namun tetap melalui prosedur seleksi yang dilakukan oleh ketua LKM dan Ketua LPSTK. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan prioritas bagi masyarakat yang memang membutuhkan dan memiliki komitmen dalam mengembalikannya.

Walaupun pelaksanaan perguliran dana *seed fund* terlihat sangat rapi tetapi masih ditemukan adanya sentiment dari sebagian masyarakat. Muncul isu ketidaksetaraan akses perolehan dana pinjaman. Sangat berbeda dengan penjelasan dari pengurus LKM yang selalu berupaya untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang lebih luas. Hal ini dapat saja terjadi karena keterbatasan dana yang digulirkan. Sehingga harus diterima kenyataan bahwa pada tahap awal, tidak semua masyarakat yang membutuhkan dana dapat diberikan pinjaman. Seringkali ada kondisi di mana uang kas sudah tidak ada atau kosong. Sementara itu ada sebagian kecil masyarakat

yang tidak mengetahui adanya dana bergulir COREMAP dan menganggap dana tersebut hanya digulirkan di kalangan tertentu. Namun, permasalahannya adalah pada ketersediaan dana. Dengan jumlah dana yang terbatas, pada akhirnya tidak semua peminjam dapat dipenuhi pengajuannya. Pada akhirnya kembali pada penetapan prioritas dan melalui prosedur yang disepakati yaitu dengan persetujuan LKM dan LPSTK.

Dana yang diterima oleh LKM Desa terapung pertama kali adalah pada tahun 2008 (3 Januari 2008) sebesar 25 juta rupiah. Dana tahap kedua diberikan pada tanggal 19 Januari 2008 dan tahap ketiga pada tanggal 10 November 2008. Pada tahun 2009 akhir (16 Desember 2009) LKM menerima tambahan dana sebesar 25 juta rupiah sebagai hadiah memenangkan perlombaan pengelolaan keuangan dana bergulir. Pada pencairan dana tahap pertama, jumlah peminjam adalah sebanyak 11 orang dan pada pencairan dana kedua, jumlah peminjam meningkat menjadi 14 orang. Dana tahap ketiga dipinjamkan kepada 12 orang. Sedangkan dari dana tambahan sebesar 25 juta rupiah dipinjam oleh sebanyak 16 orang. Jumlah dana yang dipinjam adalah berkisar antara 500 ribu rupiah sampai 2,5 juta rupiah.

Pemanfaatan dana pinjaman sebagaimana halnya di desa yang lain, sebagian besar digunakan untuk mengembangkan usaha perdagangan. Selanjutnya masyarakat yang meminjam dana bergulir Coremap menggunakannya untuk kegiatan usaha kenelayanan. Pada awal perguliran dana dilakukan, pengembalian cukup lancar dan terlihat dari dana yang macet tercatat sebesar 1 juta rupiah. Tetapi pada tahap berikutnya yaitu tahun 2009 jumlah penunggak sudah mulai meningkat dan dana yang tidak dapat dikembalikan menjadi 4 juta rupiah. Keadaan terus memburuk pada tahun 2010-2011 ketika terjadi panceklik di kalangan nelayan. Semua dana yang dipinjam oleh nelayan tidak dapat dikembalikan. Sehingga pada saat survey

dilakukan, dana yang beredar di masyarakat adalah semua dana yang seharusnya digulirkan.

Tabel 3.6. Matrik Perkembangan Pelaksanaan Dana Bergulir (*Seed Fund*) di Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tahun 2011

Uraian	Kondisi Awal		Kondisi saat ini	Keterangan
	Tahap I	Tahap II		
Jumlah anggota (org)	54	68	78	
Jumlah anggota yang bisa mengembalikan pinjaman	53	66	78	
Jumlah anggota yang tidak bisa melunasi pinjaman	1	2	78	Kondisi ekonomi masyarakat yang lesu akibat panceklik (bendahara LKM)
Jumlah dana yang berputar (aktif)	50.000.000 2.249.150(*)	25.000.000 2.089.600(*)	100.000.000 4.338.750(*)	(*) = keuntungan dari perguliran dana
Jumlah dana yang tidak dikembalikan (macet)	1.000.000	4.000.000	104.338.750	
Minimum	500.000	500.000		
Maksimum	2.500.000	2.500.000		

Sumber: Data Primer hasil wawancara Bendahara LKM, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Berbeda dengan pemanfaatan di Desa Kapoa dan Desa Wauno, masyarakat yang meminjam dana bergulir Coremap benar-benar digunakan untuk kepentingan usaha. Sehingga peluang untuk mengembalikan akan lebih besar. Tidak ada yang memanfaatkan pinjaman untuk pendidikan, perbaikan rumah maupun untuk konsumsi rumah tangga. Dalam keadaan normal, nelayan ikan teri di Desa Terapung merupakan nelayan yang dapat memperoleh penghasilan

yang memadai. Namun, dampak panceklik sangat dirasakan oleh pengumpul ikan teri dan mempengaruhi penurunan pendapatan secara signifikan. Dampaknya juga sangat dirasakan oleh pengumpul ikan teri. Ada dua orang pengumpul yang siap menampung langsung hasil tangkapan ikan teri. Seiring dengan menurunnya hasil tangkapan ikan teri, bahkan tidak ada hasil, maka pengumpul ikan teri ada yang memilih untuk pergi merantau ke papua. Satu orang lainnya melakukan diversifikasi jenis pekerjaan yaitu dengan membuka warung kebutuhan sehari-hari.

Diantara jenis usaha yang dikembangkan dari dana bergulir Coremap, sebagian besar menunjukkan bahwa jenis dan komoditasnya tetap. Tetapi yang menurun jumlahnya tidak terlalu besar yaitu hanya satu peminjam. Demikian juga dengan hasil usaha yang diperoleh sebagian besar tetap jika dibanding dengan awal memulai usaha hingga saat survey dilakukan. Dana yang dapat dimanfaatkan di Desa terapung sebenarnya lebih besar dan seharusnya dapat diakses lebih banyak peminjam. Tetapi karena saat survei dilakukan masih banyak yang belum dikembalikan, maka belum dapat dimanfaatkan secara luas. Hal ini merupakan kejadian alam yang tidak dapat dihindari sehingga pengurus LKM hanya menaruh kepercayaan kepada masyarakat yang meminjam dan yang belum mengembalikan tersebut.

B. Kecamatan Kadatua

Pemberian bantuan dana bergulir di Desa Kapoa dan Desa Wauno, Kecamatan Kadatua diungkapkan oleh sebagian besar narasumber sebagai bantuan yang sangat bermanfaat. Hal tersebut disebabkan kondisi perekonomian masyarakat yang sangat membutuhkan adanya intervensi pendanaan dari pemerintah. Sebagai desa nelayan dengan kawasan perairan yang luas, pada kenyataannya hasil dari sektor perikanan tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bahkan jumlah nelayan dari tahun ke tahun terus

menurun akibat penghasilan yang tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangganya. Penurunan jumlah nelayan berimplikasi pada sedikitnya ikan hasil melaut. Pemenuhan kebutuhan ikan banyak diperoleh dari papa lele yang menjual ikan dari pulau lain. Papa lele hanya mengambil ikan dari pengumpul atau dari tempat pelelangan ikan. Penurunan jumlah nelayan selain disebabkan karena adanya permasalahan dalam kesejahteraan juga disebabkan adanya kecenderungan penduduk Desa Kapoa untuk pergi merantau. Sebagian perantau ada yang tetap melakukan kegiatan kenelayanan misalnya di kawasan perairan Papua, Flores, dan Sumatera.

Dana bergulir yang berasal dari COREMAP diharapkan dapat meningkatkan dinamika perekonomian lokal yaitu untuk menciptakan usaha-usaha alternatif selain mengembangkan kegiatan kenelayanan. Rendahnya ketergantungan pada sektor perikanan, di sisi lain diimbangi dengan adanya alternatif pekerjaan sebagai buruh tambang. Pekerjaan di bidang pertambangan ini sifatnya hanya sementara yaitu dalam rangka adanya proyek pembuatan tanggul. Batu paras diambil dari bukit dan diturunkan ke wilayah permukiman penduduk untuk selanjutnya digunakan untuk pembangunan. Sementara itu ada kegiatan ekonomi yang cukup berkembang di kalangan kaum perempuan yaitu sebagai penenun. Mata pencaharian sebagai penenun memberikan hasil yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan rumah tangga, terutama apabila dilakukan secara rutin. Di Desa Kapoa banyak ditemui anak-anak gadis yang menenun di sela-sela kegiatan sekolah mereka. Sehingga dapat membantu orang tua untuk keperluan sekolahnya.

Dilihat dari potensi dan jenis usaha ekonomi yang sudah ada dan berkembang di Kadatua, maka pemanfaatan dana bergulir COREMAP sangat berpotensi untuk meningkatan produktifitas di bidang usaha kenelayanan maupun di luar sektor kenelayanan seperti di bidang usaha tenun atau perdagangan. Usaha yang banyak

dilakukan antara lain membuka warung kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk usaha menenun tidak banyak yang memanfaatkan dana bergulir COREMAP, karena mereka memiliki sistem tersendiri dalam menjalankan usahanya. Pengumpul hasil tenun memberikan langsung bahan baku untuk dibuat tenunan, dan pembayaran hasil tenun langsung dipotong untuk modal benang. Tidak semua penenun dibantu pengumpul, sebagian diantaranya tidak terikat karena membeli benang sendiri di pasar Bau-bau.

Di Desa Kapoa terlihat adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Salah satu contoh adalah sedikitnya jumlah pedagang sayuran dan pedagang ikan, meskipun konsumen masyarakat membutuhkan lebih banyak. Menurut informasi dari salah satu pengurus LKM masyarakat kurang berminat melakukan usaha dagang kebutuhan sehari-hari, karena kuatir pembeli tidak membayar tunai, tetapi memilih untuk menunggak. Oleh karena itu usaha dagang kebutuhan sehari-hari dilakukan oleh pedagang yang berasal dari luar pulau. Mereka berjualan dengan motor berkeliling setiap hari. Jika pedagang berasal dari luar pulau, masyarakat setempat lebih segan untuk menunggak pembayaran.

Pada survei yang dilakukan kali ini, jumlah responden penerima dana bergulir di Kecamatan Kadatua sebanyak 41 orang dari jumlah keseluruhan responden yaitu 120 rumah tangga. Penerima dana bergulir di Desa Kapoa adalah sebanyak 15 orang responden dan di Desa Wauno sebanyak 26 orang. Dari jumlah peminjam tersebut sekitar 70,7 persen pernah meminjam dana bergulir satu kali, 12,2 persen pernah meminjam dua kali dan peminjam tiga kali sebanyak 17,1 persen. Jumlah yang dipinjamkan bervariasi berkisar antara 500 ribu rupiah hingga 5 juta rupiah (Tabel 3.7)

Tabel 3.7. Besarnya Dana Bergulir yang Dipinjam Di Kecamatan Kadatua

No	Besarnya Pinjaman Dana Bergulir	Persentase Peminjam Tahap I	Persentase Peminjam Tahap II	Persentase Peminjam Tahap III
1	Rp. 500.000	17.1	16.7	14.3
2	Rp. 1.000.000	14.6	8.3	28.6
3	Rp. 1.500.000	12.2	8.3	0
4	Rp. 2.000.000	17.1	25.0	0
5	Rp. 2.500.000	22.0	25.0	28.6
6	Rp. 3.000.000	4.9	0	14.3
7	Rp. 5.000.000	12.5	16.7	14.3
Jumlah N		41	12	7

Sumber : Data Survei BME 2011

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa besar kecilnya dana yang dipinjamkan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana. Pertimbangan lainnya juga adalah agar dana bergulir dapat terdistribusi ke lebih banyak rumah tangga. Pada tabel diatas terlihat bahwa persentase peminjam dana sebesar 2,5 juta rupiah merupakan peminjam terbanyak pada semua tahapan peminjaman. Hal ini dapat menjelaskan bahwa masyarakat cenderung meminjam sesuai kemampuan mereka membayar. Belum lagi adanya kewajiban memberikan jaminan pada pinjaman tahap pertama. Jaminan yang berikan akan menentukan besaran dana yang dipinjamkan. Persentase jumlah peminjam terkecil pada tahap pertama terdapat pada peminjaman dana sebesar 3 juta rupiah, sementara itu pada tahap kedua persentase terkecil adalah peminjaman sekitar 1 juta rupiah dan 1,5 juta rupiah. Sebagian besar digunakan untuk usaha dan untuk kepentingan non ekonomi, seperti untuk keperluan berobat. Sementara itu, pinjaman dana yang cukup besar biasanya digunakan untuk modal merantau. Salah seorang narasumber menyebutkan bahwa untuk merantau biasanya mereka membutuhkan dana hingga mencapai 10 juta rupiah. Tentunya, dana sebesar itu tidak dapat

diperoleh dari pinjaman COREMAP karena maksimum dapat diberikan hanya 5 juta rupiah dan hanya mampu untuk beberapa orang dengan pertimbangan khusus.

> *"...untuk meminjam harus ada jaminan..tetapi kalau tidak pakai jaminan, kita juga merasa segan untuk meminjam..karena tidak semua orang punya emas, maka kalau meminjam dapat menggunakan jaminan dari pengurus. Seperti yang saya alami, ketika harus berobat memeriksakan kehamilan, diperlukan biaya Rp. 500.000 dan saya tidak punya emas. Akhirnya meminta bantuan saudara yang menjadi pengurus LKM, dan akhirnya dana bisa diperoleh" (Bu LR, Desa Kapoa)*

Jumlah peminjam dana yang besarnya lebih dari 3 juta rupiah tidak banyak karena dengan jumlah dana bergulir yang terbatas, maka besaran dana bergulir yang dipinjamkan juga dibatasi. Jika dilihat kecenderungan besarnya pinjaman, maka pada peminjaman dana tahap ketiga, dana yang dipinjam sudah mulai meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang sudah digulirkan dapat digunakan untuk menambah jumlah kucuran dana dari COREMAP.

Dari seluruh peminjam yang di survei, terdapat 68,3 persen sudah mengembalikan pinjamannya. Sebanyak 24.4 persen sudah mengembalikan setengahnya dan selebihnya yaitu 7.3 persen masih belum mengembalikan. Di Desa Kapoa terdapat 4 peminjam di tahap pertama yang tidak mengembalikan dan sudah satu tahun tidak memberi kabar apakah akan mengembalikan atau tidak. Tetapi jaminannya tetap disimpan sampai adanya kepastian dari peminjam tentang status pinjaman mereka.

Sedangkan pada peminjaman dana tahap kedua, peminjam yang sudah lunas mencapai 75 persen dan selebihnya yaitu 25 persen dari 12 peminjam sudah mengembalikan sebagian dana bergulir yang

dipinjam. Status pengembalian pinjaman dari dana bergulir yang diberikan pada tahap ketiga menunjukkan 57.1 persen peminjam sudah melunasi pinjamannya, sedangkan 42.9 persen menyatakan sudah mengembalikan sebagian. Dan tidak ada yang menyatakan masih belum mengembalikan. Hal ini disebabkan karena sebagian masih dalam masa perlunasan. Idealnya adalah dana yang digulirkan pada tahap pertama yaitu tahun 2008 sudah dapat terlunasi semuanya. Sehingga perguliran dana akan menjadi lebih lancar. Terdapat hal lain yang juga menyebabkan perguliran dana tidak optimal yaitu sebagian masyarakat peminjam dana tidak lancar pengembaliannya. Ada yang lebih memilih membayar beberapa tahap atau sekaligus apabila memperoleh uang. Hal ini ditemui di Desa Kapoa, dimana bagi peminjam yang merantau akan mengembalikan pinjamannya sekaligus pada saat kembali ke desa asal.

Permasalahan responden dalam pengembalian dana lainnya disebabkan karena kondisi peminjam yang memang benar-benar tidak mampu sehingga pengurus juga tidak dapat memaksakan. Pengurus LKM Desa Kapoa menyebutkan, ada permasalahan dalam menagih pinjaman khususnya pada masyarakat yang memang tidak sanggup mengembalikan. Sejak awal pengurus sudah mempercayakan peminjam untuk dapat tertib mengembalikan pinjamannya. Tetapi masih sulit untuk benar-benar diterapkan, Di sisi lain, tidak ada ketentuan yang tegas dari COREMAP untuk memberikan sangsi bagi yang tidak mau membayar atau penunggak bayaran. Hal ini berbeda dengan sistem pinjaman yang bersumber dari dana PNPM, yang lebih intensif untuk menagih cicilan pembayaran pinjaman. Pemerintah di tingkat kecamatan dan desa memiliki kepentingan untuk mempertahan perguliran dana agar berjalan lancar, sehingga perlu terus diprioritaskan di masa mendatang. Sangsi penunggak pembayaran PNPM cukup keras bagi desa dan kecamatan yang ditempati peminjam, sehingga aparat desa berkepentingan untuk kelancaran

pembayaran cicilan di didaerahnya, karena berkepentingan akan kelangsungan pembangunan fisik yang didanai PNPM di wilayah tersebut. Oleh karenanya, pemanfaatan dana pinjaman sangat penting untuk disesuaikan dengan kemampuan pengembalian oleh masyarakat peminjam.

Berdasarkan pemanfaatannya, dana bergulir yang dipinjam dimanfaatkan antara lain untuk berbagai kegiatan ekonomi rumah tangga dan kegiatan non ekonomi. Di bidang ekonomi, dana bergulir COREMAP digunakan untuk peningkatan produktifitas usaha dan meningkatkan penghasilan rumah tangga. Dana bergulir yang digunakan untuk kegiatan non ekonomi digunakan untuk keperluan kesehatan, pendidikan dan perumahan serta untuk modal merantau (Tabel 3.8)

Tabel 3.8. Pemanfaatan Dana Bergulir Di Kecamatan Kadatua

No	Pemanfaatan	Persentase peminjam
Untuk kegiatan ekonomi		
1	Usaha perdagangan (modal dagang, warung, pedagang keliling, pedagang bbm, dll)	42.8
2	Kegiatan perikanan tangkap (membeli/memperbaiki sarana produksi, seperti alat tangkap, body kapal, mesin kapal, modal melaut/ bensin, ransum)	21.4
3	Usaha peternakan (ayam, kambing, sapi, babi) dan pertanian (singkong, jagung, dll)	2.44
Untuk kegiatan non ekonomi		
4	Biaya pendidikan	2.44
5	Biaya kesehatan	2.44
6	Biaya transportasi dan merantau	16.7
7	Perbaikan rumah	4.87
8	Lainnya	7.3
Jumlah N = 41		

Sumber : Survei BME 2011

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa sebagian besar pemanfaatan dana bergulir di Kecamatan Kadatua adalah untuk usaha perdagangan. Selain untuk usaha perdagangan, dana bergulir tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan kenelayanan seperti memperbaiki alat tangkap, mesin kapal, dan juga untuk biaya melaut. Pemanfaatan yang dominan lainnya adalah untuk modal merantau. Dana tersebut digunakan untuk ongkos transportasi ke luar daerah seperti Papua, Batam, Bangka dan daerah lainnya. Pemanfaatan lainnya yang tidak besar persentasenya adalah untuk keperluan pendidikan, kesehatan dan beberapa menyebutkan untuk perbaikan rumah. Ada persepsi di kalangan masyarakat bahwa mereka hanya berani meminjam justru kalau digunakan untuk merantau. Karena dengan merantau dapat dipastikan akan memperoleh pendapatan yang cukup banyak. Sedangkan kalau hanya dipinjam dan tidak dipakai untuk usaha maka dianggap hanya membebani karena harus membayar bunga yang kadang memberatkan peminjam. Sebagian masyarakat memilih untuk meminjam ke tetangga atau kerabat yang pengembaliannya lebih fleksibel dan tidak perlu membayar bunga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus LKM, diperoleh informasi bahwa pada tahap pertama dana bergulir COREMAP, dimanfaatkan untuk modal menjual ikan oleh papa lele (satu orang), dan untuk modal dagang (7 orang). Sementara yang menggunakan untuk merantau sekitar lima orang, satu orang diantaranya tetap menjadi nelayan di kapal besar, lainnya berusaha di bidang perdagangan. Di Desa Kapoa secara keseluruhan (Desa Kapoa telah mekar menjadi Kapoa Barat dan Kapoa Timur) terdapat sekitar 10 orang menjadi papa lele (laki-laki dan perempuan) Tetapi hanya satu yang meminjam dana bergulir disebabkan kondisi perekonomian mereka sudah berjalan lancar. Pada umumnya modal yang digunakan untuk menjual ikan adalah sekitar 200 ribu rupiah dan mendapatkan

keuntungan sekitar 100 ribu rupiah pada setiap saat berjualan. Ikan diperoleh dari kapal redy di tengah laut yang umumnya memperoleh banyak ikan dari hasil tangkapannya.

Persentase pemanfaatan dana untuk kegiatan kenelayanan berada jauh di bawah pemanfaatan untuk kegiatan usaha perdagangan. Hal ini disebabkan aktifitas kenelayanan semakin menurun di Desa Kapoa maupun di Desa Wauno. Bahkan salah seorang narasumber menyatakan bahwa jumlah nelayan jika digabungkan dengan nelayan dari luar daerah sudah sangat banyak, sehingga persaingan dalam mencari ikan semakin meningkat. Nelayan yang beraktivitas di kawasan perairan Pulau Buton tidak saja nelayan setempat tetapi banyak yang berasal dari luar pulau. Bahkan beberapa diantaranya menggunakan kapal besar dengan teknologi tinggi, sehingga dapat mendeteksi keberadaan ikan dengan tepat dan dapat mengatasi masalah di laut misalnya adanya gelombang kuat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus LKM, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2011 terdapat sebanyak 16 orang penerima dana bergulir (dari 39 peminjam) yang menggunakan dananya untuk keperluan peningkatan produksi di bidang kenelayanan.

Sedangkan untuk usaha perdagangan, di Desa Wauno banyak yang digunakan untuk usaha jual beli emas. Sebanyak 14 orang (dari 39 orang peminjam) yang menggunakannya untuk modal merantau. Sedangkan dana bergulir yang digunakan untuk usaha seperti warung sembako dan usaha jual beli emas masing-masing tiga dan enam orang peminjam. Jumlah keseluruhan dana yang dipinjamkan adalah sebesar 60 juta rupiah. Di Desa Wauno ditemui banyak kegiatan usaha jual beli emas dan dianggap memberikan hasil yang lebih baik dari kegiatan kenelayanan. Sebagian besar kegiatan ini dilakukan oleh kaum perempuan yang kadang ikut merantau dengan keluarganya.

Sementara itu, pemanfaatan dana pinjaman untuk kesehatan pada awalnya dan seharusnya tidak menjadi prioritas, terpaksa harus diberikan karena ada jaminan dari pengurus LKM. Dikuatirkan dana yang digunakan untuk kepentingan ekonomi tidak dapat kembali dalam waktu yang ditetapkan. Alasannya adalah tidak ada dana yang diputar untuk memperoleh keuntungan bagi penerima dana bergulir COREMAP sebagaimana halnya bagi yang meminjam untuk modal usaha. Tetapi karena pengurus mengetahui kondisi dan kebutuhan yang sangat mendesak, maka pinjaman tersebut pada akhirnya diberikan dan kini sudah dikembalikan. Besarnya pinjaman yang digunakan untuk keperluan kesehatan adalah 500 ribu rupiah.

Berdasarkan catatan dari Bendahara LKM, total dana bergulir untuk Desa Kapoa adalah 50 juta rupiah yang diberikan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, dana dipinjamkan kepada 20 orang dengan perincian sebagai berikut : pada bulan Januari tahun 2008, jumlah peminjam dana adalah 12 orang, pada akhir tahun 2008 jumlah peminjam sebanyak delapan orang. Jadi total peminjam pada tahun 2008 adalah 20 orang. Kemudian jumlah penerima dana bergulir kembali meningkat pada tahap berikutnya yaitu tahun 2009. Terdapat 18 peminjam dana tahap kedua sehingga total dari tahun 2008 ada 38 orang yang menikmati dana bergulir. Jumlah tersebut bertambah lagi pada tahun 2010 hingga bulan Mei 2011 sebanyak 10 orang dan total peminjam menjadi 48 orang. Keseluruhan jumlah peminjam tersebut termasuk di dalamnya masyarakat yang meminjam lebih dari satu kali. Dana awal yang diberikan COREMAP hingga awal tahun 2011 telah berkembang menjadi Rp. 55.934.600. Nilai tersebut termasuk bagian dana untuk pengurus LKM dan LPSTK yang belum pernah dibagikan. Gambaran detail perkembangan dana *seed fund* dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9. Matrik Perkembangan Pelaksanaan Dana Bergulir (*Seed Fund*) di Desa Kapoa, Kabupaten Buton Tahun 2011

Uraian	Kondisi Awal		Kondisi saat ini	Keterangan
	Tahap I	Tahap II		
Jumlah anggota (org)	20	38	48	
Jumlah anggota yang bisa mengembalikan pinjaman	16	19	35	
Jumlah anggota yang tidak bisa melunasi pinjaman	4	10 orang	14	Ada 19 yang menunggak dan 10 orang potensial tidak bisa mengembalikan
Lebih dari dua kali				5 orang meminjam lebih dari 1 kali
Jumlah dana bergulir (Rp)			50.000.000	
Jumlah dana yang berputar (aktif)			55.934.600	Bunga yang diperoleh total dalam kurun 2008-2011 sebanyak 5.934.600
Jumlah dana yang tidak dikembalikan (macet)	4 orang nunggak	10 orang yang benar-benar tidak mampu membayar		Orang yang pinjam 3 kali tidak ada, ada yang dua kali sebanyak 4 orang
Minimum	250.000			Ada yang meminjam lebih dari jumlah tersebut tetapi ada jaminan
Maksimum	2.500.000			

Sumber: Data Primer hasil wawancara Bendahara LKM, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Jumlah dana bergulir yang telah diterima Desa Kapoa sebesar 50 juta rupiah, diturunkan secara bertahap sebanyak dua kali yaitu tahun 2008 dan 2009 masing-masing sebesar 25 juta rupiah Dana tahap pertama, langsung disalurkan kepada masyarakat yang mengajukan pinjaman. Besarnya dana pinjaman bervariasi, yaitu pinjaman terbesar adalah 2,5 juta rupiah dan paling kecil 500 ribu

rupiah. Jumlah peminjam sebesar 2,5 juta rupiah sebanyak tujuh orang, peminjam sebesar 2 juta rupiah ada tiga orang, satu juta dipinjam oleh satu orang dan 500 ribu rupiah hanya satu orang. Pada tahun 2009 jumlah dana yang digulirkan sudah bertambah karena ada pengembalian dana dari tahap pertama dan juga dari bunga yang dibayarkan oleh peminjam. Pada tahap kedua, peminjam tidak lagi menggunakan persyaratan boreh atau jaminan. Masa transisi tersebut terjadi selama sekitar dua bulan, dan selama masa transisi tersebut, dana bergulir yang masih tersimpan sekitar 10 juta rupiah, karena belum ada peminjam baru.

Dana tahap pertama dipinjamkan lagi kepada delapan orang, jadi total dana tahap pertama dipinjamkan kepada 20 orang peminjam. Pada tahun 2009 ada peminjam baru khususnya untuk dana tahap kedua yaitu sebanyak 18 orang. Jadi dana yang berputar pada tahun 2009 berjumlah 50 juta rupiah ditambah bunga pengembalian. Pada tahun 2010 jumlah peminjam yang mengulang pinjaman ada dua orang, yang baru pinjam ada tujuh orang. Peminjaman ulang mulai dilakukan pada tahun 2010. Pada tahun 2011 tambahan peminjam baru satu orang. Jadi total peminjam dari dana tahap pertama sejumlah 48 orang termasuk peminjam yang mengulang (5 orang). Peminjam dapat mengulang pinjaman apabila lancar pengembaliannya dan tepat waktu. Sementara itu, jumlah peminjam satu kali terlihat lebih banyak karena diantaranya terdapat peminjam yang pembayarannya tersendat atau macet. Peminjam yang dianggap macet saat ini sebanyak 19 orang, dengan rincian jumlah yang diperkirakan masih dapat mengembalikan sebesar sembilan orang. Selebihnya diperkirakan benar-benar tidak mampu membayar, sehingga perlu diputihkan. Total dana yang macet tersebut sekitar 15 juta rupiah. Hal ini berarti dana sebesar itu belum bisa digulirkan untuk peminjaman tahap selanjutnya.

Dengan melihat berbagai keadaan yang terjadi saat ini, pengurus LKM masih berkeyakinan tetap dapat mengembangkan dana bergulir. Meskipun sejak tahun 2010 pengawasan dari COREMAP tidak ada tetapi pengurus tetap berusaha menjalankan proses peminjaman dengan pembukuan seadanya tetapi tidak serapi seperti ketika masih didampingi secara penuh oleh CF atau pendamping lapangan, sehingga pengumpulan informasi perguliran dana tidak selengkap yang diharapkan.

Pengurus LKM merasa sangat perlu untuk tetap meneruskan peminjaman dana bergulir karena sebenarnya sangat bermanfaat. Namun kendalanya saat ini adalah dana yang tersedia masih terbatas sehingga masih belum berani untuk memberikan pinjaman dana dalam jumlah yang banyak. Dengan melihat pentingnya manfaat dana bergulir tersebut, pengurus memiliki rencana untuk membentuk koperasi sembako dengan modal dari sisa dana yang ada. Bahkan terdapat pemikiran akan menjadikan dana bergulir tersebut sebagai modal pembentukan koperasi sembako. Dengan adanya koperasi sembako diharapkan masyarakat lebih banyak dapat menikmati manfaatnya. Kemudian ide untuk pembentukan koperasi itu dianggap akan dapat bermanfaat untuk lebih banyak orang karena akan disediakan bahan-bahan sembako yang dibutuhkan masyarakat setempat.

Sebagaimana halnya pengelolaan dana bergulir COREMAP di Desa Kapoa, jumlah dana bergulir (*seed fund*) yang dikelola oleh LKM Desa Wauno adalah sebanyak 50 juta rupiah. Hingga pertengahan tahun 2011, jumlah dana aktif yang beredar sebesar Rp. 35.425.500. Sedangkan jumlah dana yang masih dipinjam dan belum dikembalikan hingga waktu yang ditentukan atau dapat dikelompokkan sebagai dana macet terdapat sebanyak Rp. 17.574.500.

Tabel 3.10. Matrik Perkembangan Pelaksanaan Dana Bergulir (*Seed Fund*) di Desa Wauno, Kecamatan Kadatua , Kabupaten Buton Tahun 2011

Uraian	Kondisi Awal		Kondisi saat ini	Keterangan
	Tahap I	Tahap II		
Jumlah anggota (org)	34	35	39 (th 2010) 20 (th 2011)	
Jumlah anggota yang bisa mengembalikan pinjaman	8	9		
Jumlah dana bergulir (Rp)	25.000.000	25.000.000		Hingga tahun 2011 dana yang dipinjamkan mencapai Rp. 60.000.000
Jumlah dana yang berputar (aktif)			35.425.500	
Jumlah dana yang tidak dikembalikan (macet)			17.574.500	

Sumber: Data Primer hasil wawancara Bendahara LKM, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Berdasarkan hasil suvei diperoleh gambaran bahwa sebagian besar yaitu 62,5 persen responden penerima dana bergulir melakukan peminjaman dana bergulir satu kali, sekitar 17 persen peminjam dua kali dan sekitar 19 persen peminjam yang melakukan pinjaman sebanyak tiga kali. Sedangkan anggota Pokmas yang meminjam empat kali belum ada dan peminjam lima kali hanya satu orang. Kesempatan meminjam hingga lima kali diberikan pengurus karena pembayaran cicilan lancar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kelancaran pembayaran kembali dana *seed fund* penting, karena pengguluran dana dapat terus berlangsung dan modal *seed fund* semakin bertambah. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengurus LKM, diperoleh informasi bahwa jumlah peminjam pada saat dana tahap pertama diberikan yaitu tahun 2008 sebanyak 34 orang, pada tahap kedua pada tahun 2009 sebanyak 35 orang dan pada

tahun 2010, jumlah penerima dana bergulir COREMAP meningkat menjadi 39 orang. Pada tahun 2011 (sampai bulan Mei) tercatat jumlah penerima dana bergulir COREMAP sebanyak 20 orang.

Berdasarkan catatan penggunaan dana tahap pertama yang diturunkan pada tahun 2008, terdapat informasi delapan dari 34 peminjam sudah mengembalikan seluruh pinjaman. Sedangkan pengelolaan dana tahap kedua, terdapat Sembilan dari 35 peminjam yang sudah lunas pengembaliannya. Berdasarkan pengalaman dari pengurus LKM, diperkirakan sekitar 21 orang peminjam potensial yang mampu mengembalikan pinjaman. Mereka adalah peminjam yang biasanya melunasi pinjaman sekaligus apabila pendapatan sudah mencukupi.

Sebagian besar penggunaan dana bergulir digunakan untuk modal usaha atau modal perdagangan (yaitu 11 dari 26 penerima dana bergulir). Seperti halnya di Desa Kapoa, modal yang digunakan untuk pengembangan usaha di bidang kenelayanan jauh lebih kecil yaitu hanya tujuh dari 26 responden yang disurvei. Sedangkan dana pinjaman yang dimanfaatkan untuk kepentingan non ekonomi yaitu untuk perbaikan rumah. Sebagian besar (2 per 3) dana digunakan untuk modal usaha perdagangan (10 dari 15 orang). Pada umumnya penerima dana bergulir merasakan manfaatnya, sehingga sebagian peminjam mengalami perkembangan usaha. Perkembangan usaha pada umumnya diikuti dengan perkembangan hasil usaha. Hasil survei menunjukkan bahwa hasil usaha yang diperoleh sebanding dengan perkembangan usahanya.

Berbeda halnya dengan kedua desa di Kecamatan Mawasangka, di Desa Kapoa dan Wauno tidak mengalami masalah ekstrim dalam pengelolaannya. Hanya hambatan dalam kelancaran pengembalian pinjaman yang disebabkan karena masyarakat yang meminjam tidak mampu membayar. Tetapi, ada kerancuan di kalangan sebagian

masyarakat di Desa Kapoa terkait dengan dana bergulir yang bersumber dari Coremap dan Gapoktan. Hal tersebut disebabkan bendahara Coremap dan bendahara Gapoktan adalah orang yang sama. Padahal sistem pengelolaan dan bunga yang dibebankan kepada peminjam berbeda. Untuk Gapoktan bunga yang ditetapkan adalah 1 persen per bulan atau 0,2 persen lebih rendah dibanding besarnya bunga dana bergulir dari COREMAP. Tetapi karena bendaharanya sama, mereka tidak lagi mempermasalahkan sumber dana pinjamannya. Salah seorang responden pada survei tahun 2008 menyebutkan pernah meminjam dana bergulir COREMAP tetapi pada saat survei tahun 2011 mengaku tidak pernah meminjam dana bergulir COREMAP tetapi menyebutkan dana yang dipinjam adalah dana bergulir dari Gapoktan. Setelah dilakukan pendalaman diperoleh informasi bahwa proses peminjaman dana diawali dengan mengajukan kepada bendahara dana bergulir COREMAP yang juga bendahara Gapoktan. Ketika dana diberikan hanya dijelaskan proses pengembalian dan besarnya bunga pinjaman yang harus dibayarkan. Dari besaran bunga tersebut barulah disadari bahwa dana yang dipinjamkan adalah dana Gapoktan.

Permasalahan lainnya di Desa Kapoa dan Desa Wauno adalah kelancaran pengembalian. Namun, secara umum masih diperoleh keuntungan dari bunga yang dibayar oleh peminjam. Pengembalian pinjaman beserta bunganya tersebut dapat digunakan untuk menambah perguliran dana berikutnya. Pemberian pinjaman di Desa Kapoa terlihat lebih selektif dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik masyarakat yang cenderung unik, yaitu mereka tidak terlalu cepat berkeinginan meminjam dana dari sebuah lembaga, karena kuatir tidak dapat mengembalikan. Sedangkan jika sudah meminjam dan tidak mampu mengembalikan dalam rentang waktu tertentu, mereka cenderung mengatasinya dengan benar-benar pergi ke luar daerah dan selanjutnya tidak

mengembalikan pinjaman. Kondisi ini menyebabkan pengurus LKM dan LPSTK menetapkan perlunya ada jaminan atau agunan berupa emas untuk setiap peminjam dana *seed fund*. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan jaminan emas yang diberikan. Pada penyusunan kesepakatan awal, sempat terpikirkan untuk menggunakan jaminan tanah, namun dianggap lebih sulit untuk dipegang sebagai jaminan. Emas dianggap lebih berharga, karena investasi masyarakat setempat cenderung berupa emas.

Jaminan emas yang ditetapkan di Desa Kapoa hanya berjalan pada pemberian dana tahap pertama. Selanjutnya tidak lagi menggunakan persyaratan tersebut karena rendahnya minat masyarakat untuk meminjam. Padahal dana bergulir COREMAP akan dapat berkembang dengan baik jika masyarakat memanfaatkan dana bergulir. Hingga survei BME ini di lakukan pada bulan Mei 2011, barang jaminan milik empat orang peminjam belum diambil, karena peminjam belum mengembalikan pinjamannya. Barang-barang berupa emas tersebut masih disimpan oleh pengurus dan belum ada kepastian tentang pengembaliannya, karena peminjam belum kembali dari merantau. Meskipun terjadi perubahan prosedur peminjaman pada tahap kedua perguliran dana bergulir COREMAP, sebagian masyarakat tetap beranggapan bahwa jaminan emas masih diperlukan untuk syarat peminjaman dana bergulir. Adanya perbedaan persepsi di kalangan masyarakat disebabkan kurang luasnya sosialisasi terkait prosedur dana bergulir. Selain tidak mengetahui adanya perubahan prosedur peminjaman, ternyata sebagian masyarakat juga tidak mengetahui keberadaan dana bergulir COREMAP untuk mendukung usaha penduduk.

Perkembangan Usaha

Tujuan diberikannya dana bergulir adalah masyarakat dapat meningkatkan kondisi perekonomian rumah tangganya. Dana yang

dipinjam diharapkan digunakan untuk usaha, sehingga usahanya dapat terus berkembang. Secara umum berdasarkan hasil survei diketahui bahwa usaha yang berkembang adalah usaha di bidang perdagangan. Usaha di bidang kenelayanan pada umumnya tidak berkembang bahkan ada yang sudah tidak menjalankan usaha kegiatan kenelayanan.

Hasil survei memperlihatkan bahwa sebagian besar kelompok penerima dana bergulir memanfaatkan dana pinjaman untuk usaha perdagangan, dan sebagian besar (88.9 persen) usahanya masih berjalan, pada saat survey dilakukan. Sedangkan sisanya menyatakan bahwa usaha yang dilakukan sudah tidak berjalan lagi (lihat Tabel 3.11). Berbeda halnya dengan dana pinjaman yang digunakan untuk kegiatan kenelayanan menunjukkan bahwa sekitar 67 persen peminjam sudah tidak melakukan kegiatan kenelayanan. Selebihnya (sekitar 22 persen) menyatakan masih tetap dimanfaatkan untuk kegiatan kenelayanan. Jadi kelompok penerima dana bergulir COREMAP yang masih berjalan sampai saat survei dilakukan adalah peminjam dana untuk usaha. Tidak berjalannya kegiatan kenelayanan disebabkan adanya alternatif lapangan pekerjaan untuk sementara waktu yaitu menjadi buruh tambang batu. Di sisi lain, hasil melaut menurun karena semakin banyaknya persaingan dalam mencari ikan, khususnya dengan nelayan-nelayan kapal besar yang wilayah tangkapnya luas dan dapat menjangkau semua wilayah perairan.

Sebagian besar nelayan di Kadatua merupakan nelayan tradisional yang masih menggunakan perahu kecil dan bahkan tidak bermesin, sehingga wilayah tangkapnya sangat terbatas dan peralatan yang digunakan juga sederhana. Penurunan hasil produksi ikan diantaranya disebabkan oleh perubahan jadwal melaut yang semakin tidak menentu. Frekwensi melaut menjadi berkurang dan untuk menghindari kerugian, nelayan memilih untuk tidak melaut. Kegiatan mencari ikan biasanya dilakukan pada saat-saat "meti" atau air laut

surut. Pada saat meti atau air laut surut, banyak ikan karang yang muncul ke permukaan. Sehingga masyarakat sekitar dapat dengan mudah mengambil ikan tersebut. Menurut informasi seorang narasumber, berkurangnya jumlah populasi ikan disebabkan banyaknya kapal redy yang dapat mengambil ikan lebih banyak dan segala ukuran. Meskipun jumlah pengebom ikan sudah berkurang sejak adanya program COREMAP, tetapi penangkap ikan dengan menggunakan bubu masih tetap dilakukan sehingga ikan tidak sempat bertambah. Berkurangnya pelaku bom ikan, juga disebabkan kasus pengebom yang meninggal dan cacat terkena bom, sehingga mengurangi keberanian nelayan untuk melakukannya. Sementara itu, regenerasi nelayan juga menurun. Minat kaum muda untuk bekerja di sektor kelautan dan perikanan semakin menurun. Pilihan utama mereka saat ini adalah pergi merantau karena dianggap dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam waktu yang singkat, dibanding dengan hasil sebagai nelayan.

Dana yang dipinjam oleh masyarakat untuk kegiatan peternakan hingga survei dilakukan masih tetap terus berjalan. Jenis ternak yang dikembangkan diantaranya adalah ternak ayam dan sapi. Ternak ayam memperoleh hasilnya dari penjualan daging ayamnya dan juga telurnya. Tetapi banyak ditemukan masyarakat yang memiliki usaha beternak tetapi hasilnya hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga. Akibatnya tidak banyak peternak membutuhkan modal untuk pengembangan lebih lanjut dalam skala yang lebih besar. Data yang lebih detil terkait perkembangan usaha yang dilakukan peminjam dana COREMAP dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11. Kondisi Usaha yang Memanfaatkan Dana Bergulir di Kecamatan Kadatua

No	Pemanfaatan	Kondisi Usaha Saat Ini		N
		Masih berjalan (persen)	Terhenti (persen)	
1	Usaha perdagangan (modal dagang, warung, pedagang keliling, pedagang bbm, dll)	88.9	11.1	18
2	Kegiatan perikanan tangkap (membeli/memperbaiki sarana produksi, seperti alat tangkap, body kapal, mesin kapal, modal melaut/ bensin, ransum)	33.3	66.7	9
3	Usaha peternakan (ayam, kambing, sapi, babi) dan pertanian (singkong, jagung, dll)	100	0	1

Sumber : Survei BME, 2011

Dari sejumlah peminjam dana bergulir yang usahanya masih tetap berjalan hingga survei dilakukan, sekitar 61 persen responden telah berhasil mengembangkan usahanya dengan menambah jenis/ komoditas usahanya. Selebihnya (sekitar 39 persen) belum bertambah atau masih tetap komoditasnya. Komoditas usaha yang bertambah sebagian besar berasal dari usaha perdagangan. Sementara dari usaha kenelayanan cenderung tetap karena ada faktor alam yang menyebabkan terbatasnya produksi ikan.

Perkembangan usaha terkait dengan jenis dan komoditas, diikuti dengan adanya peningkatan hasil usaha setelah mendapatkan dana bergulir. Mayoritas responden (sekitar 62,5 persen) menyebutkan hasil usahanya meningkat dan selebihnya (sekitar 37,5 persen) menyatakan tetap tidak ada perubahan. Sejalan dengan perkembangan usaha, maka hasil usahanya juga terpengaruh. Kebanyakan responden

(sekitar 65 persen) menyatakan hasil usahanya meningkat setelah mendapat dana bergulir COREMAP, dan selebihnya menyatakan hasil usaha sama saja.

Perkembangan usaha di Desa Kapoa dan Desa Wauno tidak terlepas dari meningkatnya dinamika perekonomian masyarakat di wilayah ini. Hal tersebut disebabkan adanya kegiatan pertambangan yang memberikan tambahan hasil bagi pekerja. Penghasilan yang diperoleh tergantung dari kemampuan mengerjakan hasil tambang tersebut. Sebagian besar rumah tangga mempekerjakan hampir seluruh anggota rumah tangganya sehingga hasil yang diperoleh rumah tangga semakin meningkat. Dengan meningkatnya penghasilan rumah tangga tersebut, maka roda perekonomian di desa tersebut semakin meningkat, sehingga daya beli masyarakat semakin membaik, dan dampaknya usaha perdagangan semakin ramai. Sekitar 63 persen responden menyatakan hasil usaha perdagangan juga meningkat.

3.2. Perkembangan Pendapatan Penerima Dana Bergulir COREMAP

A. Perkembangan Pendapatan di Kecamatan Mawasangka

Perkembangan pendapatan rumah tangga penerima dana bergulir dapat dilihat dari perkembangan pendapatan rata-rata rumah tangga. Untuk lebih melihat gambaran kesejahteraan rumah tangga maka digunakan pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita memperlihatkan penurunan sebesar 0,92 persen. Hal tersebut disebabkan karena pada saat dilakukan survey, sedang terjadi panceklik yang menyebabkan pendapatan dari sektor kenelayanan mengalami penurunan. Demikian juga akibat adanya kasus pengeboman oleh LO yang melibatkan masyarakat setempat hingga proses di tingkat kepolisian, mempengaruhi intensitas melaut nelayan. Walaupun saat survei dilakukan sudah mulai berjalan normal tetapi

tetap selalu waspada. Ketua LPSTK saat peristiwa penganiayaan tersebut dianggap sebagai salah satu tokoh yang harus bertanggung jawab atas penganiayaan tersebut. Pelaku pengeboman menganggap ketua LPSTK memprovokasi masyarakat untuk menganiaya. Padahal yang dilakukan LPSTK dan MD selama ini adalah menggerakkan masyarakat untuk turut aktif menjaga kawasan konservasi terumbu karang. Pada saat peristiwa itu terjadi masyarakat melihat pelaku yang sudah berulang kali melakukan pengeboman, kemudian ditangani oleh LPSTK. Pelaku dibawa ke daratan dan disanalah kemudian langsung terjadi adegan penganiayaan. Tindakan masyarakat saat itu hanya berusaha melindungi kawasan konservasi lautnya.

Tabel 3.12. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir (*Seed Fund*) di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten ButonTahun 2008 dan 2011

No	Jenis Pendapatan	Nilai (RP)		Kenaikan
		2008	2011	%
1	Pendapatan per kapita/bulan	470.973	466.639	-0,92
2	Rata-rata pendapatan rumah tangga/bulan	2.035.920	2.498.384	22,72
3	Median	1.160.000	2.133.333	83,91
4	Pendapatan rumah tangga minimum/bulan	105.000	277.500	164,29
5	Pendapatan rumah tangga aksimùm/bulan	8.016.667	9.236.667	15,22
N		55	41	

Sumber: Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan Tahun 2011

Berbeda halnya dengan perkembangan pendapatan perkapita, kondisi pendapatan rumah tangga terlihat meningkat sebanyak 22,72 persen. Peningkatan pendapatan rumah tangga ini berada di bawah peningkatan pendapatan rumah tangga di Kecamatan Kadatua. Jika dikaitkan dengan indikator keberhasilan Coremap, maka Kecamatan Mawasangka juga memperlihatkan keberhasilan pencapaiannya. Walaupun tidak terlalu jauh keberhasilannya namun, berada di atas rata-rata 10 persen peningkatan pendapatan. Besaran median atau nilai tengah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Nilai tengah menunjukkan nilai yang berada diantara nilai maksimum dan minimum. Jika rentang antara kedua nilai tersebut cukup tinggi maka nilai median seringkali lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean atau rata-rata.

Jika dilihat lebih detail lagi, maka dapat juga diperhatikan distribusi rumah tangga menurut kelompok pendapatan. Peningkatan pendapatan terjadi pada kelompok berpendapatan lebih dari tiga juta. Sebaliknya penurunan terjadi pada kelompok pendapatan kurang dari 1 juta rupiah. Hal ini menunjukkan ada peningkatan kondisi perekonomian rumah tangga. Pola pergeseran peningkatan pendapatan tidak linear, sangat bervariasi pada setiap kelompok pendapatan.

Perkembangan pendapatan yang lebih detail dapat juga dilihat pada grafik 3.4 berikut. Sedikit berbeda dengan kondisi distribusi pendapatan rumah tangga, persentase penerima dana bergulir yang memiliki pendapatan perkapita kurang dari 100 ribu rupiah menurun secara signifikan pada tahun 2008-2011. Sementara itu, terjadi peningkatan persentase penerima dana bergulir yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari 1 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara umum terlihat bahwa pendapatan perkapita menurun tetapi penurunan tersebut terjadi tidak merata antara kelompok pendapatan perkapita dan penurunannya kecil.

Grafik 3.3. Distribusi Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir Menurut Kelompok Pendapatan di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tahun 2006, 2008 dan 2011

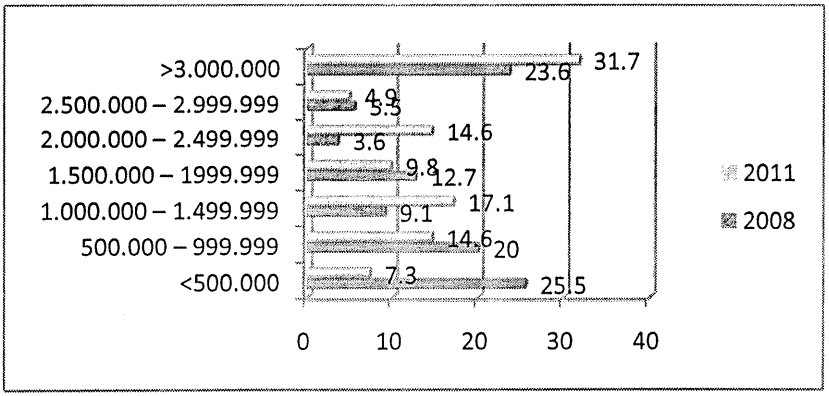

Sumber : Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan 2011

Grafik 3.4. Distribusi Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir Menurut Kelompok Pendapatan Perkapita di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tahun 2008 dan 2011

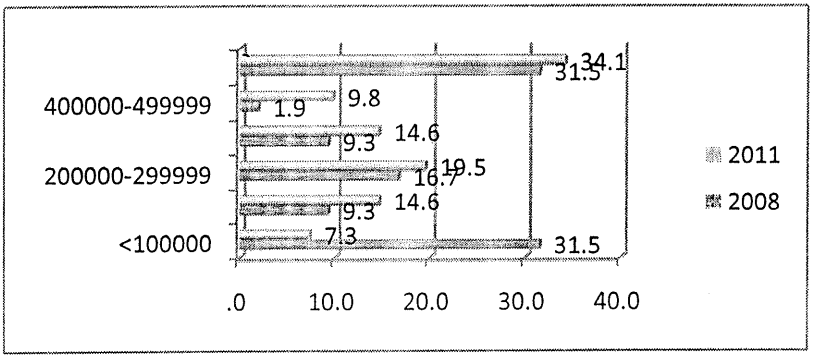

Sumber: Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan tahun 2011

Penggambaran kesejahteraan rumah tangga idealnya digambarkan dengan melihat pendapatan perkapita. Sebagaimana dengan perhitungan garis kemiskinan yang menggunakan pendapatan perkapita.

Berdasarkan data perkembangan positif pendapatan penerima dana bergulir di kedua kawasan dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor adanya budaya merantau, adanya alternatif mata pencaharian di luar sektor kenelayanan. Sementara itu, perkembangan yang negatif diantaranya disebabkan karena adanya kondisi ekstrim yang tidak dapat diatasi secara langsung oleh masyarakat seperti panceklik. Peningkatan pendapatan baik pendapatan perkapita maupun pendapatan rata-rata rumah tangga di Kadatua meningkat secara sigifikan. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya anggota rumah tangga yang pergi merantau. Hasil dari merantau dikirimkan ke daerah asal sehingga sangat membantu perekonomian rumah tangga. Bahkan ada persepsi bahwa penerima dana bergulir Coremap yang dijamin kelancaran pengembaliannya adalah mereka yang menggunakannya untuk pergi merantau. Alasan lainnya adalah adanya alternatif mata pencaharian menjadi penambang batu. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan menjadi penambang batu adalah minimal dalam waktu 10 hari bisa mendapatkan hasil Rp. 1.080.000. Hal tersebut karena untuk menambang batu tidak diperlukan ada modal khusus dan dapat dilakukan kapan saja dengan pencapaian target dapat disesuaikan dengan kemampuan. Peluang bekerja di sektor pertambangan baru dimulai pada tahun 2010, sehingga penambahan pendapatan rumah tangga sudah terasa dampaknya pada tahun 2011. Selain adanya alternatif jenis pekerjaan, dalam satu rumah tangga cenderung memiliki lebih dari satu pekerjaan. Misalnya selain bekerja sebagai nelayan, pada umumnya masayarakat juga memiliki kebun tanaman singkong dan jagung yang digunakan untuk konsumsi sendiri.

Sebaliknya, adanya kecenderungan penurunan pendapatan di Kecamatan Mawasangka sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya lebih disebabkan oleh adanya panceklik yang cukup panjang dalam satu tahun terakhir. Nelayan tidak dapat melaut dan tidak memperoleh hasil dari ikan teri yang biasanya merupakan pendapatan utama dan dari sektor kenelayanan.

Selain faktor-faktor diatas, secara umum perubahan pendapatan juga dipengaruhi oleh adanya inflasi. Pendapatan dalam dua rentang waktu tersebut tentunya tidak berimbang karena nilai harga barang pada rentang waktu yang berbeda akan mengalami perubahan. Jika dimasukkan unsur inflasi, artinya nilai harga sudah disesuaikan pada satu kondisi. Pembahasan tentang pendapatan yang dipengaruhi inflasi akan dilihat secara umum dalam lingkup yang lebih besar yaitu lingkup kabupaten.

B. Perkembangan Pendapatan di Kecamatan Kadatua

Berbeda halnya dengan kondisi perkembangan pendapatan penerima dana bergulir di Mawasangka yaitu pendapatan perkapita terlihat menurun, di Kecamatan Kadatua terjadi sebaliknya yaitu pendapatan perkapita cenderung meningkat. Pada rentang tahun 2008 dan 2011 telah terjadi peningkatan pendapatan sebesar 73,86 persen. Jika dikaitkan dengan indikator keberhasilan Coremap, yaitu adanya kenaikan pendapatan penerima dana bergulir 10 persen pada akhir project, maka di Kecamatan kadatua menunjukkan sudah mencapai keberhasilan tersebut. Peningkatan pendapatan rumah tangga penerima dana bergulir jauh diatas 10 persen. Sementara itu peningkatan pendapatan perkapita adalah sebesar 47, 64 persen.

Tabel 3.13. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir (*Seed Fund*) di Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Tahun 2008 dan 2011

No	Jenis Pendapatan	Nilai (RP)		Kenaikan
		2008	2011	%
1	Pendapatan per kapita/bulan	131.842	229.233	73,86
2	Rata-rata pendapatan rumah tangga/bulan	709.933	1.048.167	47,64
3	Median	600.000	730.333	21,72
4	Pendapatan rumah tangga minimum/bulan	50.000	155.000	210
5	Pendapatan rumah tangga aksimum/bulan	2.391.667	3.400.00	42,16
N		25	41	

Sumber: Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan tahun 2011

Peningkatan pendapatan rumah tangga tersebut juga tergambar dari peningkatan nilai minimum dan nilai maksimum pendapatan rumah tangga. Perkembangan pendapatan itu sejalan dengan kondisi usaha yang dilaksanakan oleh penerima dana bergulir yang sudah dipaparkan sebelumnya. Usaha yang dikembangkan sebagian besar masih berjalan dan berdampak peningkatan hasil usaha.

Besarnya gap antara pendapatan minimum dan maksimum juga tergambar dari nilai median yaitu nilai tengah keseluruhan pendapatan. Peningkatan nilai minimum dan maksimum berarti juga terjadi peningkatan nilai median. Perkembangan pendapatan tersebut, secara detail dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut.

Perkembangan tersebut juga dapat dilihat dari perubahan distribusi berdasarkan kelompok pendapatan. Terlihat adanya kecenderungan penurunan persentase penerima dana bergulir pada kelompok pendapatan kurang dari 1 juta rupiah dan adanya peningkatan persentase pada kelompok pendapatan lebih dari 1 juta

rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok penduduk yang berpendapatan terendah telah mengalami peningkatan kondisi ekonomi rumah tangga.

Jika dikaitkan dengan perkembangan usaha penerima dana bergulir dan hasil usaha yang diperoleh terlihat adanya konsistensi. Secara umum telah disebutkan bahwa terjadi peningkatan usaha baik di bidang perdagangan maupun bidang kenelayanan, maka pendapatan rumah tangga juga meningkat. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pendapatan rumah tangga penerima dana bergulir juga diperoleh dari adanya anggota rumah tangga yang bekerja di rantau sebagai pedagang atau jenis pekerjaan lainnya. Selain itu, di kawasan kepulauan, yaitu kecamatan Kadatua, terdapat lapangan pekerjaan baru yang cukup menjanjikan yaitu pekerjaan di bidang pertambangan. Pendapatan di bidang pertambangan cukup baik karena tidak memerlukan modal. Hanya mengambil batu paras dari bukit dan dijadikan kerikil. Dari kerikil tersebut kemudian dijual dan langsung dapat diperoleh hasilnya.

Grafik 3.5. Distribusi Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir Menurut Kelompok Pendapatan di Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Tahun 2008 dan 2011

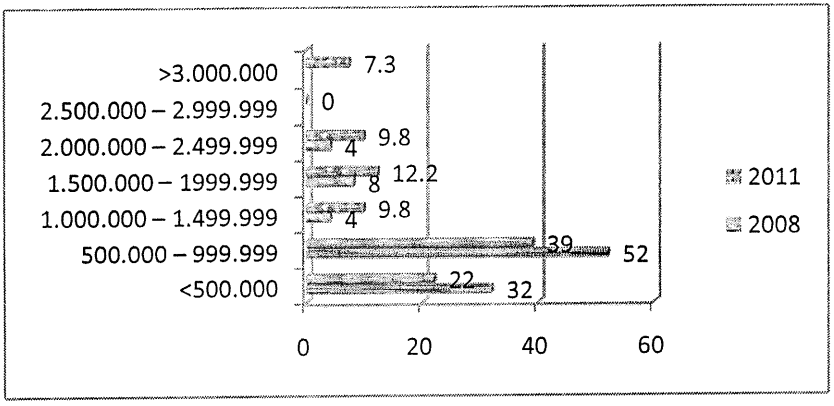

Sumber: Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan Tahun 2011

Peluang kerja di bidang pertambangan merupakan peluang yang muncul karena adanya proyek pembangunan tanggul. Dalam hal ini secara tidak langsung pemerintah membuka lapangan kerja baru bagi penduduk khususnya penduduk di Desa Kapoa. Sementara itu, ada juga bantuan dari Gapoktan dan PNPM. Bantuan Gapoktan juga merupakan dana bergulir yang dipinjamkan dengan bunga 1 persen. Salah seorang narasumber menyatakan bahwa dengan adanya bantuan dari Gapoktan tersebut, omset usahanya yaitu usaha penjualan bahan bakar bensin semakin meningkat.

Pergeseran distribusi pendapatan rumah tangga menunjukkan bahwa dampak dari penggunaan dana bergulir sangat terasa bagi kelompok penduduk berpendapatan rendah. Kelompok penduduk dengan pendapatan rendah pada tahun 2008 akhirnya menggeser pada tahun 2011.

Grafik 3.6. Distribusi Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir Menurut Kelompok Pendapatan Perkapita di Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Tahun 2008 dan 2011

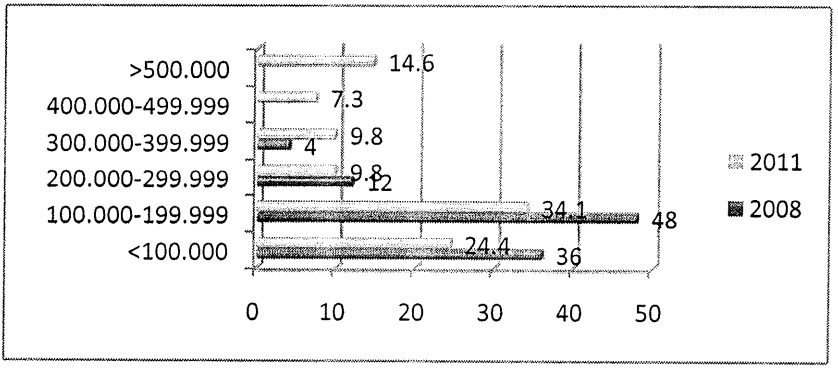

Sumber: Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan Tahun 2011

Perkembangan pendapatan perkapita di Kadatua menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan seperti halnya dengan pendapatan rumah tangga secara keseluruhan. Pada tahun 2011 terjadi pergeseran pendapatan perkapita masyarakat. Pendapatan perkapita yang kurang dari 300 ribu rupiah menurun seiring dengan munculnya pendapatan perkapitan yang lebih dari 300 ribu rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing individu dalam rumah tangga mengalami perbaikan ekonomi. Bahkan persentase penerima dana bergulir yang memiliki penghasilan lebih dari 500 ribu rupiah juga mulai banyak ditemui. Demikian juga dengan pendapatan dalam rentang antara 400 ribu rupiah – Kurang dari 600 ribu rupiah.

C. Perkembangan Pendapatan Kabupaten Buton

Perkembangan pendapatan rumah tangga dan pendapatan perkapita secara umum di Kabupaten Buton ketika dipertimbangkan inflasi, ternyata perkembangan pendapatan rumah tangga terlihat menurun 1,9 persen. Sebelum diperhitungkan inflasi, perkembangan untuk kedua tahun pengamatan mengalami peningkatan hingga 10,7 persen. Sementara itu, untuk pendapatan perkapita, perkembangannya tetap positif baik untuk pendapatan perkapita setelah disesuaikan dengan inflasi maupun sebelum disesuaikan. Sebelum diperhitungkan inflasi, pendapatan perkapita meningkat 28,8 persen dan setelah dihitung adanya inflasi menjadi 14,1 persen. Jika melihat fenomena penurunan pendapatan perkapita akibat adanya inflasi, maka dapat dikaitkan dengan penyebab inflasi pada penurunan pendapatan perkapita di Kecamatan Mawasangka. Penurunan tersebut dapat disebabkan karena adanya inflasi.

Gambaran pendapatan rumah tangga jika dilihat dari nilai minimum dan maksimum, terlihat bahwa ketika disesuaikan dengan inflasi peningkatannya juga mengalami penyesuaian. Jika tidak dimasukkan unsur inflasi, maka nilai minimum meningkat 45,6 persen

tetapi setelah dipertimbangkan inflasi perkembangannya hanya 29,1. Demikian juga dengan perkembangan nilai maksimum, ketika belum dikaitkan dengan inflasi, perkembangan pendapatan meningkat 14,7 persen dan pada saat disesuaikan dengan inflasi meningkatnya hanya 1,6 persen.

Tabel 3.14. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir (*Seed Fund*) Sebelum dan Setelah Inflasi di Kabupaten Buton, Tahun 2008 dan 2011

No	Jenis Pendapatan	Nilai (RP)		Perkembangan
		2008	2011	%
1	Pendapatan per kapita/bulan	273.046(*) 209.307(**)	351.572(*) 238.860(**)	28,8(*) 14,1(**)
2	Rata-rata pendapatan rumah tangga/bulan	1.621.550 1.243.021	1.794.386 1.219.121	10,7 -1,9
3	Median	796.667 610.696	1.160.000 788.114	45,6 29,1
4	Pendapatan rumah tangga minimum/bulan	50.000 38.328	165.000 112.102	230 192,5
5	Pendapatan rumah tangga maksimum/bulan	8.016.667 6.145.290	9.191.333 6.244.672	14,7 1,6
N		80	82	

Catatan : (*) Sebelum inflasi, (**) Setelah inflasi

Sumber: Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan 2011

Untuk lebih memahami kondisi kesejahteraan penduduknya maka pendapatan perkapita harus dibandingkan dengan garis kemiskinan di Kabupaten Buton. Pada tahun 2008, garis kemiskinan di Kabupaten Buton adalah Rp. 150.109. Pada tahun yang sama,

pendapatan perkapita dengan penyesuaian inflasi tercatat sebesar Rp. 279.792. Sehingga gap antara garis kemiskinan dan pendapatan perkapita adalah Rp. 129.681. Sementara itu, pada tahun 2011 garis kemiskinan yang digunakan adalah berdasarkan pada garis kemiskinan pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 165.198. Pendapatan perkapita tahun 2011 adalah sebesar Rp. 238.860. Sehingga gap antara pendapatan perkapita dengan garis kemiskinan pada tahun 2011 adalah Rp. 73.662.

Gap antara pendapatan perkapita dan garis kemiskinan dapat menjelaskan kondisi kesejahteraan penduduk. Jika dibandingkan antara gap pada tahun 2011 dan pada tahun 2008, maka terjadi penurunan kesejahteraan penduduk khususnya penerima dana bergulir. Semakin rendah gap maka semakin mendekati kondisi miskin. Sebaliknya jika gap cukup besar maka berarti kondisi penduduk sudah menjauh dari kondisi kemiskinan.

Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, jika diperhatikan kondisi pada tahun 2011 terhadap beberapa peristiwa yang sangat mempengaruhi terjadinya penurunan tingkat pendapatan rumah tangga. Sebagai kawasan kepulauan dan juga pesisir, masyarakatnya sebagian besar adalah nelayan. Oleh karena itu, jika terjadi kejadian ekstrim di bidang kenelayanan, maka akan sangat mempengaruhi kondisi pendapatan rumah tangga.

BAB IV
INTERVENSI PROGRAM COREMAP : PEMBERDAYAAN UNTUK REHABILITASI TERUMBU KARANG

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu program yang umum diterapkan sebagai pilihan dalam pembangunan secara lengkap dalam arti menjadikan masyarakat sebagai pelaku pembangunan, bukan semata-mata obyek atau target pembangunan (anthromorphism) (Bartle, 2005; Ife, 1995). Konsep pemberdayaan masyarakat memiliki konteks lebih mengutamakan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan mendayagunakan potensi yang dimilikinya untuk menangani permasalahan yang dihadapinya. Potensi utama yang dimiliki mereka adalah pengetahuan, keterampilan, serta kultur yang dimilikinya. Oleh sebab itu, program pemberdayaan masyarakat banyak yang dimulai dengan kegiatan identifikasi potensi masyarakat (Adi, 2003; Bartle, 2005). Kegiatan penting dalam program tersebut adalah mengidentifikasi wawasan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui berbagai jenis kegiatan yang menambah wawasan, pengalaman, pengetahuan, ketrampilan dan sikap (Zaelany, 2007).

Perlunya penguatan kapasitas masyarakat dalam rehabilitasi terumbu karang karena dirasakan selama ini ketidaklancaran berbagai program untuk merehabilitasi terumbu karang dirasakan karena tidak dipahaminya masalah sosial budaya dari masyarakat setempat. Pemahaman terhadap modal sosial yang dipunyai masyarakat sangat penting dalam rangka mencari solusi atas masalah yang ada. Modal sosial disini (Hasbullah, 2005) adalah potensi-potensi sosial budaya yang dimiliki suatu masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah

yang ada. Pendekatan pasca strukturalis (Forsyith, 2003) sangat menekankan pentingnya modal sosial ini untuk berbagai masalah yang dihadapi oleh komunitas tertentu, seperti upaya untuk rehabilitasi terumbu karang.

Program COREMAP yang semenjak tahun 2007 keberadaannya di empat desa binaan diarahkan untuk merehabilitasi terumbu karang, karena kondisi terumbu karang di Indonesia sudah memprihatinkan. Buruknya kondisi terumbu karang disebabkan oleh berbagai hal, baik karena gangguan alam (nature disaster) maupun karena ulah manusia (anthropogenic). Rehabilitasi tersebut dilakukan tidak hanya dengan memperbaiki langsung terumbu karang, tetapi juga berbagai kegiatan yang baik langsung maupun tidak langsung mengurangi "tekanan" terhadap terumbu karang.

Berbagai kegiatan tersebut dikembangkan dengan pola pemberdayaan masyarakat yang awalnya mengesankan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, namun berikutnya akan mengurangi "tekanan terhadap laut". Penduduk ditingkatkan pemahamannya tentang laut dan khususnya fungsi terumbu karang melalui program awareness, pengawasan laut, penyadaran dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang laut. Kemudian ada program-program yang sifatnya meningkatkan ekonomi, yakni *seed fund*, berupa dana bergulir. Selain itu, ada program *block grant* yang berupa bantuan fisik seperti pembuatan pemecah ombak dan jalan, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini sifatnya stimulan karena biasanya diperlukan swadaya masyarakat. Misalnya dalam pembuatan talut, masyarakat menyediakan batu-batu untuk pembuatan talut.

Block grant sesungguhnya bagian dari usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh COREMAP. Upaya tersebut dilakukan melalui

pengerjaan bangunan fisik yang diharapkan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Adapun laporan ini akan menyoroti penggunaan dana *block grant* dan intervensi lain yang dilakukan oleh COREMAP di desa Waonu dan desa Kapoa di kecamatan Kadatua, serta desa Terapung dan desa Wakambangura di kecamatan Mawasangka.

4.1. Masyarakat dan Intervensi COREMAP

Berikut ini gambaran tingkat pengetahuan responden di 4 (empat) desa lokasi COREMAP di Kabupaten Buton menurut indikator pengetahuan tentang intervensi COREMAP yang telah diinisiasi cukup lama di Buton. Dari tabel dibawah dapat dipilah-pilah berdasarkan tingkat pengetahuan tinggi-sedang dan rendah, yakni sebagai berikut : Pertama, Program Pelestarian/Penyelematan Terumbu Karang, LPSTK, Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Pelestarian Terumbu karang, Larangan Peraturan Pemerintah/Larangan mengenai Pengambilan dan atau Perusakan Terumbu Karang, Sanksi/hukuman terhadap orang/kelompok yang melanggar aturan pengambilan atau perusakan terumbu karaang dan Kegiatan Perlindungan/pengawasan Pesisir dan Laut adalah kegiatan Coremap yang cukup tinggi diapresiasi oleh penduduk baik di Kadatua maupun Mawasangka. Pengetahuan mereka terhadap kegiatan ini cukup baik.

Kedua, kegiatan LKM melalui UEP Pemilihan/Pengembangan Jenis Usaha, Pembimbingan dan pengelolaan keuangan, kegiatan monitoring Usaha Ekonomi Produktif dan Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif adalah kegiatan COREMAP yang kurang menjadi perhatian warga masyarakat baik di Kadatua dan Mawasangka. Ini sungguh ironis kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di lokasi COREMAP tetapi minim pengetahuan. Apa yang terjadi dari kondisii tersebut dapat ditarik sebuah catatan bahwa tampaknya

kegiatan yang bersifat konservasi lebih gencar dilakukan. Kegiatan ini kemungkinan dilakukan secara terbuka tanpa ada seleksi atau penunjukan oleh pengurus, hal ini berbeda dengan kegiatan yang bersifat ekonomi produktif. Kegiatan ini kemungkinan dilakukan secara diam-diam dan hanya oraang-orang tertentu yang mendapat kucuran dana pinjaman ekonomi produktif.

Ketiga, kegiatan COREMAP yang menonjol justru terjadi di Kadatua bukan di Mawasangka. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan berbasis masyarakat lebih besar di Kadatua dibandingkan dengan Mawasangka terutama kegiatan *Village Grant*, LKM, Pokmas, Pokwasmas dan Pokmas usaha.

Grafik 4.1. Keterlibatan Reponden dalam Pengelolaan Berbasis Masyarakat

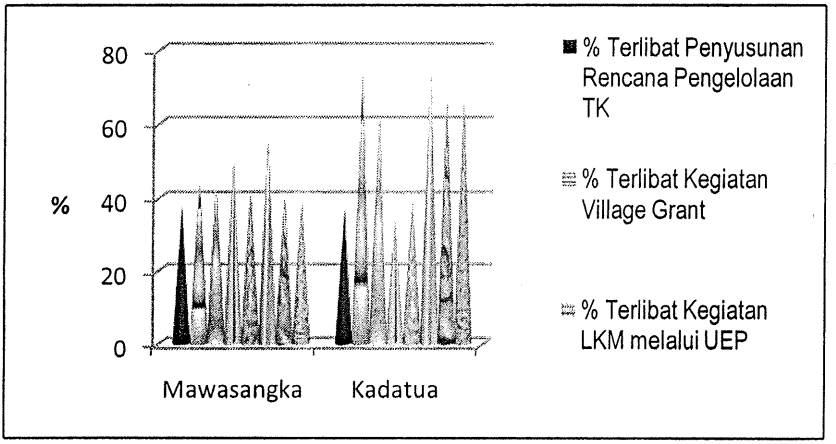

4.2. *Block Grant*

Salah satu pengelolaan berbasis masyarakat adalah program *village grant*. Di desa Terapung sampai tahun 2010 *village grant* sudah sampai tahap ketiga. Tahun 2009 semua dana *block grant* harus sudah selesai di bulan desember. Problemnya adalah jika ada

kenaikan harga bahan bangunan, maka dana ditutup dengan dana swadaya. Tahun 2010 yang lalu, balai pertemuan di Terapung yang sedang dibangun dan gedung ini merupakan keinginan warga masyarakat desa Terapung tetapi yang sejak lama belum terealisasi. Menurut kepala desa, sekalipun dana dari COREMAP sebesar lima puluh juta rupiah belum mencukupi tetapi warga tetap membangun balai desa. Pembangunan fisik yang berbasis masyarakat dapat dikatakan tidak terjadi. Semua kegiatan pembangunan fisik diborong oleh LPSTK dengan cara padat karya. Bahan bangunan seperti semen dibeli, namun untuk bahan bangunan seperti batu alam atau pasir tidak dibeli tetapi tenaga pengambilannya yang dibayar kepada warga yang mengambilnya. Jadi dengan demikian, ada upah yang diberikan kepada warga yang terlibat dalam pembangunan talut pemecah ombak. Sementara itu, swadaya murni tidak ada.

Tabel 4.1. Bentuk bantuan *Village Grant* di Buton

Bentuk *Village grant*	Kapoa	Waonu	Wakam-bangura	Terapung
Pondok Informasi	2007;	2006; Rp.10 Jt	ada	2006; Rp.10 Jt
Penampung Air Hujan		2007; Rp. 50 Jt.		2007; Rp. 50 Jt.
Balai Pertemuan/ posyandu		2009; Rp. 50 Jt		2009; Rp. 50 Jt
Talut-penahan ombak		2009 : Rp 50 juta	2008; 2009(80 M)	
WC	2008, 4 buah			
Gedung Balita	2009; 50 Jt			

Jenis Kegiatan

Adapun bantuan *block grant* yang ada di desa Waonu diawali dengan bantuan pembuatan Pondok Informasi sebesar sepuluh juta rupiah pada tahun 2006. Kemudian dilanjutkan dengan bantuan pembuatan penampungan air hujan pada tahun 2007 sebesar lima puluh juta rupiah. Pada tahun 2009 terselesaikan pembuatan talut yang diusulkan tahun 2007 dengan dana sebesar lima puluh juta rupiah. Pada tahun yang sama juga diselesaikan pembangunan Posyandu sebesar lima puluh juta rupiah. Lokasi talut saat sekarang ini terletak di belakang Taman Kanak-Kanak (TK) dan kantor Kepala Desa Waonu (yang dibangun dengan dana APBD).

Di Desa Kapoa mendapatkan bantuan *block grant* diawali dengan bantuan berupa pengadaan Pondok Informasi tahun 2007 dan WC 4 buah pada tahun 2008. Bantuan lainnya diberikan pada tahun 2009 berupa pembuatan Taman Bermain Balita yang terletak di belakang puskesmas desa Kapoa.

Di Desa Terapung bantuan *block grant* yang dimulai pada tahun 2009 berupa pembuatan gedung pertemuan berakhir dengan kegagalan menghabiskan dana sebesar lima puluh juta rupiah. Alasan yang dikemukakan pengurus COREMAP dananya tidak mencukupi. Sebaliknya, sejumlah respoden yang diwawancarai selalu mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran *block grant.* Hal yang sama juga terjadi pada bantuan "Bak penampungan air" serta pondok informasi yang sangat sederhana padahal dana bantuannya cukup besar.

Di desa Wakambangura bantuan blockgrant juga dipersoalkan penggunaan anggaran *block grant* yang digunakan untuk pondok informasi dan talut. Adapun talut hasil dari bantuan selama tiga kali berturut-turut. Desa Wakambangura bantuan dana untuk pembuatan TALUT tahun 2008 124 meter 50 juta rupiah, tahun 2009 50 juta

rupiah sepanjang 96 meter, tahun 2010 50 juta rupiah sepanjang 78 meter. Jadi total keseluruhan panjang talut yang dibangun adalah 298 meter.

Proses Pembangunannya

Perencanaannya penggunaan dana *block grant* dilakukan melalui rapat desa dan diusulkan ke pengurus COREMAP tingkat kabupaten melalui SETO dan MD (Motivator Desa). Awalnya kesepakatan melalui rapat desa yang dihadiri Seto dan pengurus COREMAP, kemudian diusulkan ke pengurus COREMAP tingkat kabupaten untuk membangun talut. Pelaksanaannya dilakukan dengan membentuk panitia dan pengerjaannya dengan melibatkan masyarakat yang diarahkan oleh tukang dalam pengerjaannya. Pelaksanaannya dengan memilih sekelompok panitia yang mengkoordinir pelaksanaan pembuatan gedung.

Perencanaan bangunan yang akan diusulkan untuk didanai *block grant* melalui penyusunan renstra desa lima tahunan yang disusun melalui rapat desa. Para peserta rapat desa adalah aparat desa, SETO, penduduk, organisasi wanita (PKK) dan pengurus COREMAP tingkat desa. Pada rapat ini dipimpin oleh Kepala Desa.

Setelah itu diusulkan kepada pihak program COREMAP melalui SETO. Setelah disetujui oleh pihak pengurus COREMAP tingkat kabupaten Buton dan direncanakan anggarannya. Pada saat anggaran terdengar sudah mau turun dilakukanlah penyusunan panitia pembangunan talut. Tahap berikutnya adalah rapat-rapat panitia pembangunan talut hingga sampai pelaksanaannya. Penduduk dilibatkan sebagai tenaga kerja yang membangun talut yang memperoleh upah dari kegiatan tersebut, khususnya untuk para tukang. Pada saat anggaran belum turun maupun sudah mulai proses pembangunannya, peran MD (Motivator Desa) adalah sebagai

"penghubung" antara pengurus COREMAP tingkat kabupaten Buton dengan desa.

Setelah anggaran turun, pelaksanaan pembuatan gedung, talut dan lain-lain diserahkan kepada pemborong tertentu. Penduduk membantu menata batu-batu dan pasir, bahkan juga ibu-ibu ikut bekerja mengambili batu dari atas bukit. Ibu-ibu menyumbang makanan untuk para pekerja. Pembangunan talut maupun gedung ini sangat ditentukan oleh 'Tukang" yang mendesain bentuk bangunan dan teknis pengerjaannya. Warga-warga yang membantu bekerja berdasarkan arahan para tukang.

Kondisi hasil *Block Grant*

Ada yang berfungsi dengan baik sebagaimana talut di desa Waonu dan talut di desa Wakambangura. Contoh lain, adanya gedung posyandu menarik minat ibu-ibu dari desa Waonu untuk datang saat penimbangan dan memeriksakan balitanya. Selain itu, karena pada saat acara posyandu dokter sering datang juga, maka dimanfaatkan penduduk untuk berobat memeriksakan penyakitnya.

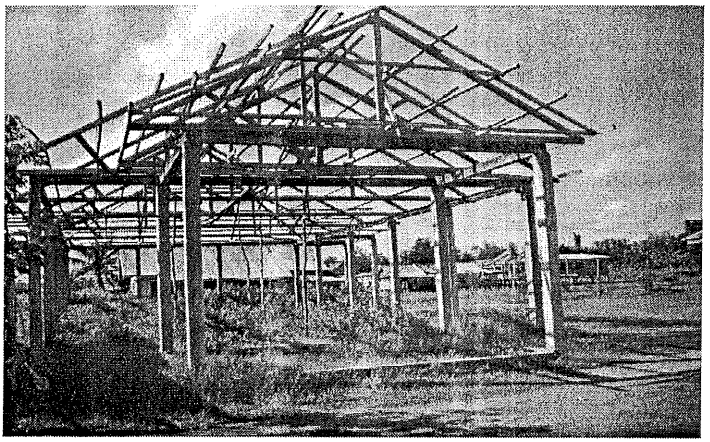

Gambar 4.1. Balai Pertemuan yang tidak selesai dibangun

Namun, ada juga yang hingga penelitian tahun 2011 ini dilangsungkan belum juga terwujud seperti Balai Pertemuan di Desa Terapung. Awalnya penduduk berencana akan membangun kantor kepala desa. Setelah anggaran turun perencanaan justru berubah, yakni ingin membangun tempat pertemuan sekaligus sebagian untuk kantor kepala desa. Namun, hingga saat penelitian tahun 2011 ini dilakukan, bangunan tersebut belum juga terwujud dengan alasan dana tidak mencukupi. Pengurus COREMAP tingkat desa mengeluhkan dua hal sebagai penyebab gagalnya pembangunan balai pertemuan, yakni: 1) anggaran yang diterima tidak penuh, sehingga tidak mencukupi untuk anggaran pembangunan yang sudah direncanakan sejak awal, dan 2) naiknya harga-harga bahan bangunan.

Gambar 4.2. Bantuan Taman Bermain di Desa Kapoa

Sementara itu, kondisi bantuan COREMAP di Desa Kapoa memperlihatkan belum maksimalnya pemanfaatkan sesuai dengan tujuan yang direncanakan di awal pembangunan. Pada awal bantuan diberikan, bangunan balai akan digunakan untuk tempat bermain balita yang ada di sekitar Desa Kapoa. Di dalamnya juga tersedia berbagai jenis mainan. Selain digunakan untuk taman bermain, bangunan ini juga digunakan untuk pertemuan ibu-ibu atau posyandu. Namun, pada pelaksanaannya, semua kegiatan itu tidak berjalan dengan lancar. Salah satu narasumber menyebutkan, anak-anak tidak lagi dapat terus bermain di dalamnya karena dikawatirkan mainan di dalamnya akan hilang atau rusak. Pada saat survey dilakukan, bangunan ini justru digunakan untuk menjadi tempat penampungan pekerja di proyek talut. Di dekat bangunan ini juga dijadikan tempat pengumpulan batu-batu paras yang akan digunakan dalam proyek tersebut.

Rawan Pemotongan

Pembangunan fisik ini rawan pemotongan. Menurut informasi seorang kepala desa bahwa kegiatan fisik seringkali dilakukan pemotongan. Pemotongan terjadi ketika uang turun. Hal ini dibenarkan oleh seorang bendahara LPSTK yang pernah mengambil uang untuk membangun gedung pertemuan senilai 50 juta rupiah tetapi dalam realitanya yang diterima 40 juta rupiah. Istilah yang dipakai bendahara LPSTK ini, bahwa oknum MD itu mau meminjam uang dari uang yang turun untuk membangun gedung pertemuan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan PNPM, pembangunan fisik yang dibangun COREMAP tidak disertai gambar desain sehingga menyulitkan bagi pemborong.

4.3. Pengawasan dan DPL

Ada 5 (lima) aktivitas pengawasan terkait dengan kegiatan pengawasan dan pelestarian dan penyelamatan terumbu karang, yaitu:

- Kegiatan Perlindungan Perlindungan/Pengawasan Pesisir dan Laut;
- Pembentukan Pembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK);
- Penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK);
- Pengembangan Daerah Perlindungan Laut (DPL);
- Kegiatan POKMAS konservasi atau POKMASWAS

Keterlibatan warga masyarakat dalam kegiatan di atas merupakan salah satu tolok ukur melihat apakah kegiatan COREMAP itu berjalan dengan baik atau tidak. Dilihat dari sisi masyarakat kegiatan pengawasan tersebut tidak direspon masyarakat dengan baik. Pada tahun 2009, telah dilakukan survei di lokasi penelitian COREMAP di Buton (Mawasangka dan Kadatua), yakni ingin melihat seberapa besar warga masyarakat terlibat dalam kegiatan pengawasan tersebut. Hasil survei memperlihatkan hampir semua indikator kegiatan pengawasan di kedua lokasi dibawah 50 persen. Responden warga masyarakat yang mengaku terlibat pada kegiatan pengawasan sangat sedikit berkisar antara 16,3 persen sampai dengan 45,9 persen di kedua lokasi penelitian COREMAP, kecuali kegiatan pengembangan DPL di Kadatua (84,2 persen). Kegiatan pengawasan tidak banyak melibatkan warga masyarakat baik pada pembentukan LPSTK, Penyusunan RPTK dan kegiatan POKMAS Konservasi. Kecenderungan ini terjadi di Mawasangka maupun di Kadatua. Namun demikian, terdapat aktivitas kelembagaan dalam pengembangan DPL yang direspon warga masyarakat sekalipun hal ini terjadi hanya di Kadatua. Di Kadatua ternyata lebih berhasil

mengembangkan DPL dibandingkan Mawasangka menurut keterlibatan responden.

Grafikl 4.2. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan

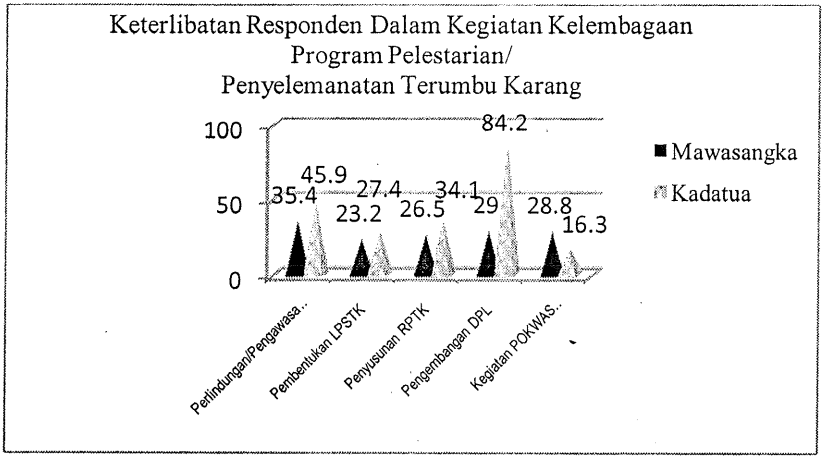

Sumber: Data Lapan

Grafik 4.2. di atas, peran serta masyarakat dalam pengawasan terumbu karang tidak begitu besar. Tidak ada banyak responden warga masyarakat di lokasi penelitian di keenam indikator program pelestarian terumbu karang, kecuali keterlibatan warga desa di Kapoa dan Waonu, Kadatua dalam hal pengembangan DPL. Tingginya partisipasi warga kedua desa di Kadatua ini tidak menjamin besarnya dalam kegiatan Pokwas. Warga masyarakat di lokasi penelitian Kadatua justru sangat minimal dalam kegiatan Pokwas Konservasi, hal ini terjadi karena warga masyarakat tidak berkepentingan langsung terhadap keberadaan DPL tersebut. Warga masyarakat desa sebagian besar pedagang perantau. Nelayan di kedua desa bukan nelayan seperti terdapat di desa Terapung atau Wakambangura.

4.4. Persepsi Masyarakat Tentang Manfaat COREMAP

Rumah ibadah, sekolah dan sejenisnya adalah sarana sosial yang paling memberikan manfaat bagi warga masyarakat di Kadatua dibandingkan dengan sarana sanitasi lingkungan maupun sarana untuk pelesatarian lingkungan. Bahkan, persepsi responden di Kadua terhadap manfaat sarana sosial di atas 70 persen, sementara sarana sanitasi dan pelestarian lingkungan hanya sekitar 50 persen responden yang memberikan pernyataan tentang kemanfaatan sarana tersebut. Di Mawasangka menunjukkan lebih rendah persepsi responden tentang kemanfaatan sarana yang dibangun COREMAP dibandingkan di Kadatua. Presentase responden di Mawasangka tentang kemanfaatan sarana sosial, sanitasi lingkungan dan pada umumnya kurang sekitar kurang 50 persen. Hal ini berarti bahwa sarana-sarana tersebut dipandang belum memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat.

Jika dikaitkan dengan indikator keberhasilan COREMAP yang berbunyi bahwa sekurangnya 70% dari warga penerima manfaat di lokasi program mempunyai persepsi bahwa COREMAP mempunyai dampak terhadap kesejahteraan, tampaknya tidak terjawab kecuali indikator persepsi kemanfaatan sarana sosial dan persepsi positip ini dimiliki oleh warga masyarakat di Kadatua. Oleh sebab itu, keberadaan sarana-sarana tersebut masih menjadi persoalan bagi di kalangan responden di kedua lokasi penelitian ini. Hal ini tampak masih adanya sekelompok responden yang mengemukakan tidak adanya sarana sanitasi lingkungan, sarana pelestarian lingkungan, dan sosial. Dari survei yang dilakukan, paling tidak hanya sekitar 50-55 persen responden di Kadatua yang mengemukakan bahwa sarana sanitasi lingkungan dan sarana pelestarian lingkungan tidak ada di kedua desa lokasi COREMAP, sementara di Mawasangka sekitar 40 persen lebih responden yang menyatakan bahwa sarana sanitasi lingkungan, pelestarian lingkungan dan sosial tidak ada di kedua desa

lokasi penelitian ini. HaL ini berarti hanya sekitar 60 persen responden yang mengetahui keberadaan sarana-sarana yang dibangun COREMAP selama ini. Ketidaktahuan ada berbagai sarana yang dibangun COREMAP tentu saja karena sosialisasi kegiatan COREMAP tidak berjalan dengan baik, karena masih ada sebagian warga di desa binaan COREMAP yang tidak mengetahui bangunan fisik atau sarana yang dibangun untuk kegiatan lingkungan dan peningkatan kesehatan masyarakat dan kegiatan sosial.

Grafik 4.3. Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat COREMAP

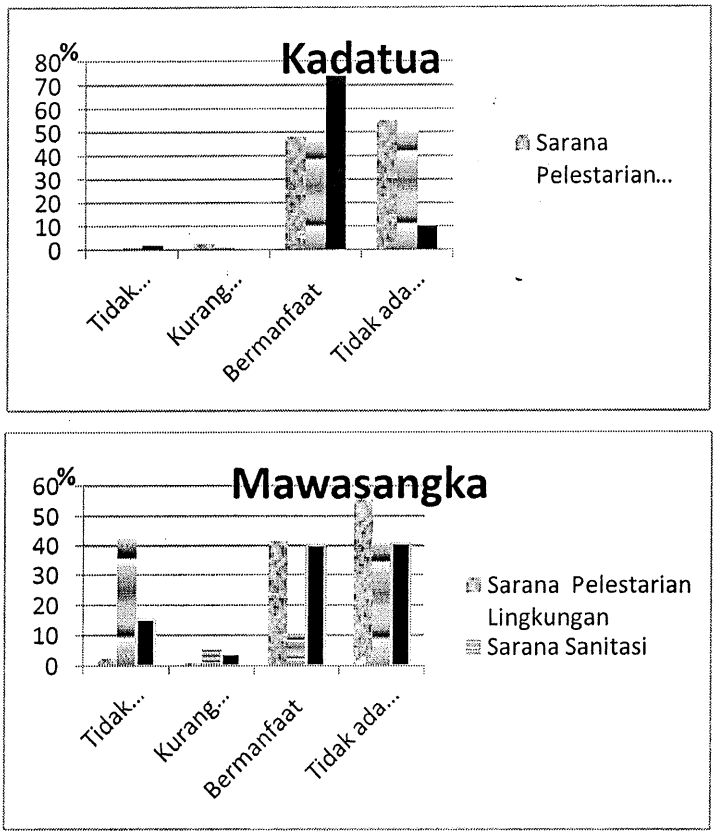

Berbeda dengan persepsi kemanfaatan sarana yang dibangun COREMAP, kalangan responden di lokasi penelitian cenderung memberikan pernyataan adanya kemanfaatan dari kegiatan yang dilakukan pada program COREMAP, dan sebaliknya sedikit sekali reponden yang mengemukan tidak ada atau kurang ada manfaatnya kegiatan yang dilakukan dalam rangka program COREMAP. Ada 6 (enam) kegiatan COREMAP yaitu : (1) kegiatan sosialisasi terumbu karang; (2) kegiatan di pondok informasi; (3) kegiatan pengawasan DPL; (4) kegiatan patroli yang diadakan kelompok pengawas masyarakat; (5) kegiatan pengawasan DPL yang dilakukan gabungan aparat dan instansi pemerintah serta masyarakat; dan (6) kegiatan pengawasan yang langsung dilakukan melalui peran serta masyarakat. Dari keenam kegiatan, mayoritas responden yakni di atas 50 persen, baik di Kadatua dan Mawasangka memberikan memiliki persepsi kemanfaatan kegiatan COREMAP bagi dirinya dan masyarakatnya. Jika dikaitkan dengan indikator keberhasilan COREMAP yang berbunyi bahwa sekurangnya 70 persen dari warga penerima manfaat di lokasi program Kadatua mempunyai persepsi bahwa COREMAP mempunyai dampak terhadap kesejahteraan terjadi untuk semua keenam kegiatan yang disebutkan di atas, sedangkan di Mawasangka hanya terjadi untuk kegiatan, kegiatan sosialisasi terumbu karang, di pondok in formasi, pengawasan DPL, dan patroli yang diadakan kelompok pengawas masyarakat. Responden tidak memiliki persepsi yang posistip terhadap kegiatan pengawasan DPL yang dilakukan gabungan aparat dan instansi pemerintah serta masyarakat; dan pengawasan yang langsung dilakukan peran serta masyarakat.

Grafikl 4.4. Persepsi Masyarakat terhadap Manfaat COREMAP di Kecamatan Mawasangka

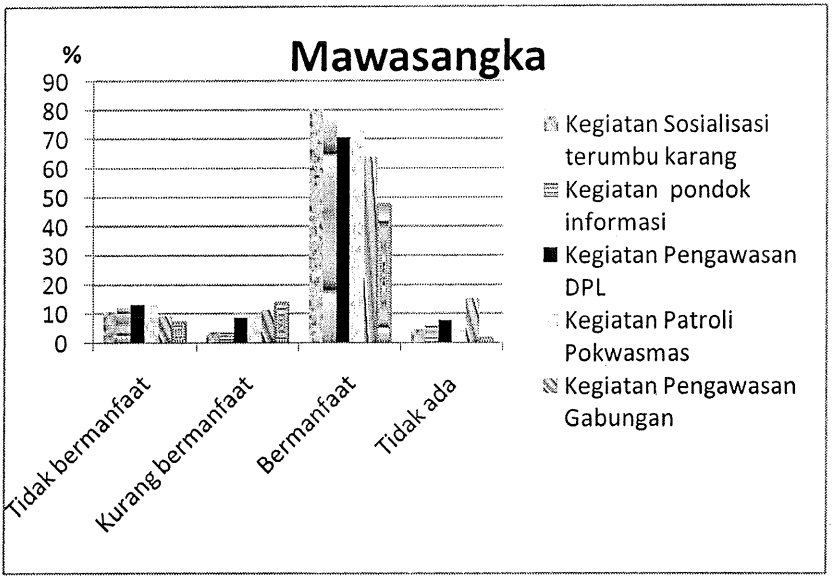

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Studi BME Sosial Ekonomi tahun 2011 terutama berkaitan dengan kegiatan COREMAP II di Kabupaten Buton, merupakan lanjutan dari kajian Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang tahun 2006, dan kajian BME tahun 2008 di lokasi kajian dan responden yang sama. Tulisan ini merupakan hasil kajian BME Sosial Ekonomi tahun 2011, terutama membahas tentang pelaksanaan COREMAP II di Kabupaten Buton umumnya dan kedua lokasi kajian pada khususnya. Studi BME Sosial Ekonomi ini bermaksud melakukan evaluasi akhir terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan COREMAP II. Evaluasi juga dilakukan terhadap perkembangan pendapatan masyarakat umumnya dan kelompok penerima dana bergulir (*seed fund*) dari COREMAP terkait dengan indikator keberhasilan sosial ekonomi dari COREMAP II. Evaluasi juga dilakukan terhadap persepsi masyarakat tentang manfaat dan dampak kegiatan COREMAP terhadap kesejahteraannya.

5.2. Temuan Pokok dari Hasil Kajian

Pelaksanaan COREMAP II yang diawali dengan pembentukan kelembagaan di tingkat desa binaan (seperti LPSTK, Pokmas, LKM dan MD) secara formal sudah mengikut sertakan masyarakat dalam proses pembentukannya. Demikian pula dalam merencanakan kegiatan-kegiatan COREMAP masyarakat diikutsertakan seperti tertuang dalam RPTK masing-masing desa binaan. Di kedua lokasi, kelembagaan yang menjadi syarat formal pelaksanaan COREMAP di

tingkat desa binaan sudah terbentuk dan sebagian sudah berjalan sesuai dengan RPTK masing-masing. Meskipun demikian ada kecenderungan pembentukan lembaga dan pemilihan pengurus lain (seperti LKM, Pokmas), tidak dilakukan secara prosedural karena tuntutan waktu pelaksanaan program, sehingga cenderung bersifat formalitas yaitu sekedar memenuhi syarat turunnya dana bantuan COREMAP (UEP. Dalam beberapa hal kelembagaan yang dibentuk lebih disebabkan oleh pemenuhan standar COREMAP daripada kebutuhan masyarakat (felt need). Akibatnya pembentukan lembaga seperti pondok informasi dilakukan sekedar memenuhi target, karena dana sudah turun, tanpa dilengkapi sarana untuk memfungsikannya.

Pengurus kelembagaan (selain ketua) cenderung dipilih dari orang-orang dekat tim pengelola (LPSTK, kepala desa dan MD). Hal ini dilakukan karena keterbatasan SDM di lokasi binaan, dan singkatnya waktu pemilihan yang juga menyulitkan seleksi untuk berbagai kelembagaan COREMAP. Dampaknya pengelolaan COREMAP cenderung didominasi beberapa pengurus, bahkan di satu lokasi binaan hanya didominasi ketua LPSTK dan keluarga dekatnya. Kondisi ini berpotensi melemahkan peran pengurus Pokmas lainnya, dan cenderung menjadi tidak peduli dengan aktivitas COREMAP, karena kurang diikutsertakan dalam pengelolaan sesuai dengan fungsinya. Kondisi ini terus berlanjut sampai kajian ini dilakukan, sehingga partisipasi masyarakat semakin menurun dan menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan program terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat yang menjadi sasaran program COREMAP.

Hasil paling nyata dari pelaksanaan program COREMAP adalah meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya terumbu karang dan sumber daya laut lainnya. Pengetahuan yang semakin membaik seyogyanya mendorong dan memotivasi semangat nelayan untuk memelihara laut umumnya dan

menjaga pelestarian terumbu karang dari kerusakan yang semakin parah. Partisipasi masyarakat nelayan sangat penting, karena terbatasnya aparat yang bertanggung jawab dibandingkan luasnya wilayah yang perlu dijaga. Namun sangat disayangkan kesadaran dan kepedulian yang mulai timbul di kalangan masyarakat pantai, belum diikuti oleh keseriusan petugas terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dampaknya mengecewakan masyarakat yang serius ingin menjaga wilayah lautnya dari praktek penagkapan ikan yang merusak lingkungan seperti pemakaian bom, obat bius dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Banyak pihak mengakui bahwa program COREMAP di desa-desa binaan COREMAP telah berdampak pada berkurangnya praktek penangkapan ikan yang merusak seperti pemakaian bom, bius dan alat tangkap yang merusak (redy dan pukat. Kesepakatan untuk penyelenggaraan Daerah Perlindungan Laut (DPL) diakui pada awal pembentukannya sangat bermanfaat untuk mencegah penangkap ikan mendekati wilayah laut yang dilindungi dari praktek yang merusak lingkungan. Wilayah DPL ini dijaga dan ditaati oleh masyarakat karena pembentukan DPL disepakati masyarakat. Bahkan di Kadatua disesuaikan dengan adat dan kebiasaan masyarakat, sementara di beberapa desa binaan COREMAP lainnya, penyelenggaraan DPL tidak bisa selaras dengan adat dan kebiasaan masyarakat (Zaelany dan Wahyono, 2011). Keberadaan DPL ini berdampak pada makin banyak populasi ikan di sekitar karang. Namun, pada akhir COREMAP fase II semangat untuk menjaga DPL menurun drastis, karena ketidakjelasan keberlanjutan kegiatan DPL, serta keterbatasan dana untuk perbaikan DPL.

Pelaksanaan program COREMAP yang cenderung berorientasi proyek, menyulitkan upaya partisipasi masyarakat apabila dibutuhkan untuk kontribusi yang memerlukan dana. Pembentukan DPL di lokasi binaan dilakukan atas dasar musyawarah, sehingga cenderung dijaga

pelaksanaannya oleh masyarakat. Namun seiring dengan berjalannya waktu banyak batas DPL yang hilang terkena ombak dan masyarakat tidak berdaya untuk menggantinya, karena tidak tersedia dana untuk penggantian sarana DPL. Akibatnya DPL tanpa batas yang jelas, hanya diketahui oleh nelayan lokal, karena pemilihan lokasi DPL sudah mempertimbangkan tempat strategis yang sesuai dengan adat budaya masyarakat. Namun nelayan dari luar sulit mengetahuinya, sehingga pelanggaran mudah dilakukan apabila tidak dijaga. Penjagaan ini dilakukan secara spontan oleh masyarakat nelayan sekaligus sambil melakukan pekerjaan kenelayanan di laut.

Meskipun penggunaan bom untuk sarana penangkapan ikan berkurang, tapi kasus pengeboman oleh nelayan dari luar daerah di salah satu lokasi kajian, telah berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat di lokasi binaan terhadap aparat hukum yang menanganinya. Kasus ini semakin serius karena masyarakat yang bermaksud menjaga wilayahnya dari praktek yang merusak menjadi korban karena pelaku bom diduga lolos karena memperoleh dukungan yang kuat dari petinggi keamanan di wilayah kabupaten. Pengurus COREMAP dan masyarakat tidak berdaya berhadapan dengan aparat hukum yang dinilai tidak adil dalam menyelesaikan masalah dan bahkan menjadi bumerang bagi masyarakat yang menjadi korban. Kondisi ini sangat menurunkan kepercayaan dan kepedulian masyarakat untuk menjaga wilayahnya seperti yang menjadi sasaran konservasi terumbu karang, karena pelaku bom dari luar daerah dianggap kebal hukum.

Isu praktek merusak karang melalui pembiusan di lokasi binaan dianggap semakin marak, terutama pelakunya jelas ada yaitu beberapa orang lokal, namun sulit pembuktiannya. Pengurus COREMAP dan masyarakat juga tidak berdaya terhadap pelanggaran –pelanggaran yang dilakukan, meskipun dampaknya amat merugikan nelayan dan budi daya rumput laut. Hal ini disebabkan kurang

seriusnya pihak yang berwajib dalam menindaklanjuti pelaku, meskipun dukungan untuk konservasi cukup kuat dari semua unsur masyarakat (Pemerintah, tua adat dan tokoh masyarakat). Dikhawatirkan dapat menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan program konservasi, karena adanya pelaku yang diduga di back up pihak berwajib, sehingga tidak tersentuh hukum.

Istilah yang populer di kalangan masyarakat penerima program COREMAP adalah perbaikan terumbu karang dan bantuan (hadiah). *Block grant* dalam konteks pemberdayaan dilihat oleh masyarakat tidak lebih hanya sebagai hadiah dari pemerintah yang tidak perlu dipertanggungjawabkan pemakaiannya bahkan pelaksanaan pembuatannya. Program COREMAP yang diharapkan memberdayakan masyarakat, justru hanya berlangsung dengan proses mitigatif. Begitu juga dengan pemberian *block grant* untuk bangunan fisik desa yang idealnya menjadi stimulan untuk proses peningkatan kemandirian sebagai tujuan pemberdayaan masyarakat. Namun kenyataannya, tidak dilakukan dalam proses peningkatan kemandirian pembangunan desa, karena dianggap sebagai proyek untuk 'bagi-bagi' rejeki. Pelaksanan bantuan *block grant* dari COREMAP dilakukan sebagai 'hibah' atau 'hadiah' dengan ketentuan/syarat masyarakat ikut berpartisipasi. Partisipasi yang dilakukan masyarakat pun akhirnya bersifat non-responsible participaction karena tidak berdasarkan pemahaman penuh terhadap tujuan pemberian bantuan tersebut yaitu dalam rangka pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian. Sebaliknya karena orientasinya sebagai hadiah 'proyek' maka yang penting menghabiskan dana, tanpa peduli penyelesaiannya atau manfaatnya bagi masyarakat di lokasi binaan. .

Kesejahteraan masyarakat dilihat dari pemilikan aset produksi dan non produksi cenderung meningkat, baik karena pengaruh konservasi COREMAP maupun faktor lainnya. Beberapa peningkatan aset produksi dan non-produksi juga dipengaruhi oleh bantuan-

bantuan lain selain COREMAP seperti APBN, APBD 1 dan APBD2 untuk pembangunan desa (jalan, prasarana penangkapan ikan, sekolah, posyandu dan dermaga). Demikian pula peranan perantau melalui kiriman rutin ke daerah asal baisanya digunakan untuk modal nelayan (sarana penangkapan ikan), rumah maupun kendaraan bermotor. Sedangkan peningkatan kesejahteraan dilihat dari kondisi permukiman dan sanitasi lingkungan juga dipengaruhi oleh dukungan banyak program yang masuk ke lokasi desa binaan COREMAP, baik dari COREMAP maupun non-COREMAP (seperti PNPM, BUMN, dan Antam).

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Pelatihan Usaha Ekonomi Produksi adalah kegiatan COREMAP yang kurang menjadi perhatian warga masyarakat baik di Kadatua dan Mawasangka. Ini sungguh ironis kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di lokasi COREMAP tetapi minim pengetahuan untuk pelaksanaannya. Tampaknya kegiatan pelatihan yang terkait dengan konservasi lebih gencar dilakukan, dibandingkan kegiatan pelatihan terkait peningkatan usaha ekonomi. Kegiatan yang bersifat konservasi kemungkinan dilakukan secara terbuka tanpa seleksi atau penunjukan oleh pengurus, karena peluang untuk masyarakat berpartisipasi cukup banyak. Sebaliknya dengan kegiatan yang bersifat ekonomi produktif, pelaksanaan untuk pelatihan terbatas dan kemungkinan dilakukan secara diam-diam, sehingga hanya orang-orang tertentu yang mendapat kesempatan dalam pelatihan. Demikian pula peluang untuk pinjam dana UEP terbatas karena jumlah kucuran dana UEP tidak sebanding dengan minat masyarakat untuk pinjam, sehingga terbats pada orang-orang yang dekat dengan pengelola dana.

Partisipasi masyarakat meningkat dengan dilaksanakannya program dana bergulir (*seed fund*) Dalam hal pengelolaan dana bergulir, peran dominan LPSTK di suatu desa binaan, berpotensi 'jalan sendiri' dan tertutup terutama dalam mengambil kebijakan

mengelola dana Pokmas (UEP). Hal ini berlanjut sampai kajian BME ini dilakukan, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya benturan kepentingan dengan kegiatan ekonomi pengurus dan orang-orang dekatnya. Kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mengembalikan dana pinjaman berkurang, apabila pengelolaan dana bergulir tidak menyentuh kepentingan langsung masyarakat yang menjadi sasaran program. Hal ini semakin nyata dengan sulitnya pengawasan dilakukan, sehingga jumlah dana bergulir yang masih beredar sulit diketahui dengan pasti.

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Buton memiliki potensi perikanan yang besar dan merupakan sentra perikanan bagi Kawasan Sulawesi Tenggara. Kegiatan ekonomi masyarakat terkait dengan perikanan laut tersebar di semua kecamatan dan merupakan mata pencaharian pokok penduduk di kawasan ini. Dinamika ekonomi di Kabupaten Buton juga didukung oleh berbagai prasarana dan sarana seperti pelabuhan, perusahaan perikanan yang mampu menampung sebagian hasil tangkapan ikan dan sekaligus sebagai pengekspor berbagai jenis hasil olahan ikan ke berbagai Negara. Kegiatan kenelayanan yang dominan di berbagai wilayah ini didukung oleh berbagai sarana dan prasarana alat tangkap yang umumnya dimiliki oleh nelayan individual dan/atau kelompok kecil.

Kegiatan ekonomi lainnya yang menonjol terkait dengan pengelolaan sumberdaya laut adalah budidaya rumput laut yang berkembang pesat dan semakin luas cakupan lokasinya.. Di Kecamatan Mawasangka kegiatan budidaya rumput laut berkembang pesat dan cakupannya semakin luas. Usaha budidaya rumput laut di wilayah ini menjadi salah satu mata pencaharian utama di samping sebagai nelayan tangkap. Kegiatan ekonomi di wilayah ini juga didukung oleh sarana dan prasarana, seperti pasar desa, warung-warung sembako, tempat pengisian BBM (semacam SPBU kecil untuk memenuhi kebutuhan solar kapal nelayan). Meskipun belum

ada tempat pelelangan ikan, keberadaan para pedagang pengumpul di desa telah memudahkan masyarakat untuk menjual hasil tangkapan ikan atau rumput laut

Berbagai program pembangunan juga berpotensi menunjang dinamika ekonomi masyarakat, baik yang berasal dari program COREMAP maupun program lainnya di luar COREMAP. Di Kecamatan Kadatua, bantuan COREMAP berupa dana bergulir untuk modal usaha maupun blockgrant untuk pembangunan fisik (MCK, dan penampung air hujan). Selain dari program COREMAP, pemberian dana bergulir dan bangunan fisik di Kadatua juga diperoleh dari program P2KP (dana bergulir dan bangunan fisik), NUS (PU) bantuan pembangunan fisik (PAH dan MCK) serta dari program PNPM (dana bergulir dan fisik). Bantuan berupa bangunan fisik juga menjadi bagian dari pemanfaatan dana APBD 1 (Pemprov), berupa jalan desa dan talut. Di Kecamatan Mawasangka, bantuan dari COREMAP, selain berupa dana bergulir juga bantuan fisik berupa bangunan talut dan sejumlah bak air untuk masyarakat. Dalam dua tahun terakhir Desa Terapung juga menerima bantuan *village grant* untuk membangun tempat pertemuan masyarakat, namun sampai saat penelitian berlangsung, pembangunan belum selesai, karena dana tidak cukup, sehingga belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan berbagai data pendapatan masyarakat umumnya dan nelayan pada khususnya, terutama dilihat dari pendapatan rata-rata dan pendapatan per kapita selama 2006-2011, terdapat kecenderungan kenaikan pendapatan rumah tangga secara konsisten pada periode 2006-2011 di kedua lokasi kajian yaitu Kecamatan Mawasangka dan Kadatua. Sebetulnya perkembangan pendapatan rumah tangga yang lebih mencolok terjadi pada periode pertama yaitu tahun 2006-2008. Sedangkan pada periode selanjutnya (2009-2011), hampir tidak terjadi peningkatan pendapatan atau bahkan di Kecamatan kadatua cenderung menurun.. Penyebab utama fenomena

penurunan pendapatan rata-rata rumah tangga dan per kapita pada 2 tahun terakhir adalah masa paceklik ikan, sehingga hasil tangkapan ikan terus menurun. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah perubahan cuaca sehingga menurunkan kegiatan melaut nelayan, dan berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan.

Secara keseluruhan terjadi perubahan penyebaran rumah tangga ke arah pendapatan yang lebih merata, namun demikian kesenjangan distribusi antarkelompok pendapatan masih tetap terjadi, terutama dilihat dari perbedaan trend perubahan antarkelompok pendapatan rumah tangga. Secara keseluruhan peningkatan pendapatan rumah tangga yang terjadi selama tahun 2006-2011, telah mengurangi kesenjangan pendapatan, terutama antara kelompok pendapatan terendah dengan kelompok pendapatan tertinggi. Proporsi rumah tangga dengan rata-rata pendapatan kurang dari 500 ribu rupiah cenderung menurun secara signifikan selama kurun waktu 2006-2011 yaitu sebesar 59 persen. Demikian pula untuk kelompok pendapatan terbesar (3 juta rupiah/lebih) cenderung menurun selama 2006- 2011, meskipun relative kecil. Kondisi yang agak berbeda menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan rumah tangga selama 2006-2011 di Kadatua cenderung terbatas pada kelompok yang relatif miskin, belum meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, sehingga kesenjangan pendapatan rumah tangga lebih kentara.

Berdasarkan data tentang perubahan pendapatan rumah tangga di kedua lokasi kajian, maka dapat disimpulkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap dinamika pendapatan masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat terutama di lokasi Kecamatan Mawasangka sangat didominasi oleh kegiatan kenelayanan. Menurunnya pendapatan rata-rata masyarakat yang didominasi oleh kegiatan kenelayanan pada periode akhir program (2009-2011) sangat dipengaruhi oleh faktor alam yaitu perubahan musim yang semakin tidak menentu, sehingga berpengaruh terhadap populasi ikan

khususnya ikan teri di Desa Terapung. Faktor-faktor lainnya adalah perbedaan kondisi alam dan akses pasar di kedua lokasi, keragaman hasil laut baik jenis maupun jumlah. Wilayah Mawasangka mempunyai hasil laut yang lebih beragam dan bernilai ekonomi tinggi seperti teri, kepiting dan ikan karang, sementara hasil laut di Kadatua cenderung kurang laku dipasarkan. Selain faktor alam, juga terdapat faktor-faktor lainnya seperti keberadaan alternatif kegiatan ekonomi lainnya baik terkait kenelayanan maupun non nelayan, seperti budidaya rumput laut di Mawasangka dan pertambangan pasir di Kadatua. Kebiasaan merantau masyarakat nelayan pada saat musim gelombang kuat terutama dari Kadatua, telah memberi peluang masyarakat untuk meningkatkan penghasilan, terutama pada saat sulit ikan.

Faktor inflasi juga turut berpengaruh terhadap perubahan pendapatan. Dengan memasukkan faktor inflasi selama periode 2008-2011, maka peningkatan pendapatan per kapita sebesar 4,28 menurun menjadi 3,68 (turun sekitar 14 persen). Hal ini berarti peningkatan pendapatan yang relatif kecil, secara substansial dapat bermakna tidak ada perubahan atau bahkan menurun. Gambaran pendapatan rumah tangga jika dilihat dari nilai minimum dan maksimum pendapatan terlihat bahwa dengan memasukkan faktor inflasi, peningkatan nya juga mengalami penyesuaian. Tanpa unsur inflasi, nilai minimum meningkat sekitar 46 persen, tetapi setelah dipertimbangkan inflasi perkembangannya hanya sekitar 29 persen. Demikian juga dengan perkembangan nilai maksimum, ketika belum dikaitkan dengan inflasi, peningkatan pendapatan sekitar 15 persen, sementara setelah disesuaikan dengan faktor inflasi peningkatan pendapatan kurang dari 2 persen (1,6 persen).

Perkembangan pendapatan rumah tangga penerima dana bergulir dapat dilihat dari perkembangan pendapatan rata-rata rumah tangga. Untuk lebih melihat gambaran kesejahteraan rumah tangga

maka digunakan pendapatan perkapita. Peningkatan pendapatan per kapita penerima dana bergulur pada periode tahun 2008 dan 2011 relatif tinggi (lebih dari 70 persen). Jika dikaitkan dengan salah satu indikator keberhasilan COREMAP, yaitu adanya kenaikan pendapatan penerima dana bergulir sebesar 10 persen pada akhir project, maka persentase kenaikan pendapatan di Kecamatan Kadatua menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi yaitu 70 persen, yang berarti program dana bergulir dari COREMAP dinilai sangat berhasil.

Berbeda halnya dengan perkembangan pendapatan perkapita, kondisi pendapatan rumah tangga di Mawasangka meningkat sekitar 23 persen. Peningkatan pendapatan rumah tangga ini berada di bawah peningkatan pendapatan rumah tangga di Kecamatan Kadatua. Jika dikaitkan dengan indicator keberhasilan COREMAP, maka Kecamatan Mawasangka juga memperlihatkan keberhasilan pencapaiannya. Walaupun tidak terlalu jauh keberhasilannya namun, berada di atas rata-rata 10 persen peningkatan pendapatan.

Perkembangan pendapatan rumah tangga dan pendapatan perkapita secara umum di Kabupaten Buton, ternyata perkembangan pendapatan rumah tangga setelah mengalami inflasi terlihat menurun sekitar 2 persen. Sebaliknya sebelum diperhitungkan inflasi, perkembangan pendapatan dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan hingga sekitar 11 persen. Sementara itu, untuk pendapatan perkapita, perkembangannya tetap positif baik untuk pendapatan perkapita setelah disesuaikan dengan inflasi maupun sebelum disesuaikan. Sebelum diperhitungkan inflasi, pendapatan perkapita meningkat sekitar 29 persen dan setelah dihitung adanya inflasi turun menjadi sekitar 14 persen. Jika melihat fenomena penurunan pendapatan perkapita akibat adanya inflasi, maka dapat dikaitkan dengan penyebab penurunan pendapatan perkapita di Kecamatan Mawasangka, adalah faktor inflasi.

Perkembangan pendapatan sejalan dengan kondisi usaha yang dilaksanakan oleh penerima dana bergulir . Sebagian besar usaha yang dikembangkan masih berjalan dan berdampak pada peningkatan hasil usaha. Secara umum terjadi peningkatan usaha baik di bidang perdagangan maupun bidang kenelayanan, maka pendapatan rumah tangga juga meningkat. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pendapatan rumah tangga penerima dana bergulir juga diperoleh dari adanya anggota rumah tangga yang bekerja di rantau sebagai pedagang atau jenis pekerjaan lainnya. Selain itu, di kawasan kepulauan, yaitu Kecamatan Kadatua, terdapat lapangan pekerjaan baru meskipun sifatnya sementara (sebagai proyek) yaitu pekerjaan di bidang pertambangan. Pendapatan yang diperoleh pekrja di bidang pertambangan dianggap cukup baik karena tidak memerlukan modal apapun, karena pengambilan batu paras dari bukit, dipecah dan dijadikan batu kerikil, hasilnya laku dijual ke proyek.

Persepsi masyarakat terhadap manfaat sarana social terkait program COREMAP di Kadatua lebih tinggi daripada di Mawasangka. Manfaat sarana ibadah, pendidikan dan kesehatan dinilai masyarakat lebih tinggi daripada sarana lingkungan dan sanitasi, baik karena kurang diketahui masyarakat (karena jumlahnya yang terbatas), maupun pemanfaatannya terbatas di kalangan sekitar atau bahkan tidak bermanfaat karena rusak atau tidak teopat sasaran. Baik di Kadatua maupun Mawasangka persentase responden yang merasakan manfaat dari sarana social COREMAP kurang dari 70 persen, di Kadatua sekitar 60 persen dan Mawasangka sekitar 40 persen. Dikaitkan dengan indicator keberhasilan COREMAP, program dianggap berhasil apabila 70 persen masyarakat merasakan manfaat dari program COREMAP. Sementara capaian hasil yaitu responden yang merasakan manfaat bantan social tersebut di kedua lokasi kurang dari 70 persen. yang menyebutkan. Berdasarkan indikator tersebut program COREMAP belum mencapai sasaran atau kurang berhasil.

Sebagai penutup, berdasarkan temuan pokok tersebut di atas, maka keberadaan program COREMAP secara umum sangat bermanfaat terutama terkait dengan sasaran untuk konservasi sumberdaya laut di wilayah Buton umumnya dan kedua lokasi kajian pada khususnya. Hal ini penting untuk pemerintah daerah Buton yang akan melanjutkan program ini untuk kepentingan kesejahteraan warganya. Seperti disebutkan di atas program dana bergulir sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan adalah menjaga dan mengembangkan dana berglir, agar cakupan meningkat dan besarnya dana yang dipinjamkan mengenai sasaran yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang tidak beruntung. Untuk itu diperlukan koordinasi antar pelaku kebijakan agar terjadi sinergi antarprogram dan menghindarkan kesan orientasi projek dalam pengelolaannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah kelompok sasaran pada umumny yang diambil harus disesuaikan dengan kemampuan sasaran program.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, I.R (2003). Pemberdayaan, Pembangunan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Burke, L et al.(2002). Terumbu Karang yang Terancam di Asia Tenggara. Terjemahan. Jakarta : World Resources Institute.

Bartle, F.(2005). Mengukur pemberdayaan. http://www.scn.org/mpfc/modules/ mea-ovin.htm

BPS Kabupaten Buton (2010). Kecamatan Mawasangka dalam Angka Tahun 2010

BPS Kabupaten Buton (2010). Kecamatan Kadatua dalam Angka Tahun 2010

BPS Kabupaten Buton (2007). Kabupaten Buton Dalam Angka Tahun 2006, Kab. Buton 2007.

Chambers, R. (1984). Metode Pintas Dalam Pengumpulan Data Sosial Untuk Proyek-Proyek Pembangunan Pedesaan. Balitbang Pertanian dan The Ford Foundation, Jakarta

Crawford, B et al. (2000). *Community-Based Marine Sanctuaries in the Phillippines : A Report on Focus Group Discussions.* PCAMRD, Los Banos

CRITC-COREMAP II-LIPI (2007). Monitoring Ekologi Buton, CRITC-COREMAP II-LIPI, Jakarta

Departemen Kelautan dan Perikanan-DKP (2007). Pedoman Umum Pengelolaan Berbasis Masyarakat COREMAP II' Jakarta DKI – Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Forsyth, T. (2003). *Critical Political Ecology, The Politics Of Environmental Science, Routledge*, London and New York

Hardin, G. (1968). *Tragedy of the Common.* Science 162 : 1243-1248

Hasbullah, J. (2005). Social Capital, Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia, MR United Press, Jakarta

Ife, J.(1995). *Community Development: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis And Practice*, Longman Pty Ltd, Australia

Nagib, Laila, dkk (2006). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP II: Kasus Kabupaten Buton, COREMAP-LIPI.

Nagib, Laila, dkk (2008). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP II: Kasus Kabupaten Buton, COREMAP-LIPI.

Oliver, ed. (2002). *Sustainable Fishery Management in Asia. Asian Productivity Organization*, Tokyo.

Program Management Unit (PMU) dan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pesisir (LP2SP) (2007). Laporan Hasil Kegiatan Workshop Guru Untuk Pengembangan Pembelajaran Mulok Terumbu Karang, PMU & LP2SP, Bau-Bau

The Coral Reef Alliance (2003). The Exploitive Fishing. Http://www.coral.org

Zaelany, A.A. (2003). "Becoming the Fish Bomb Fisherman as an Adaptation Strategy in Economic Crisis : Case Study of Pulau Karang, Indonesia ". In : The Role of Dialogue and Networking: From A Transitional to an Industrialized Country, Proceeding of an International Symposium Cum Workshop in Hanoi, Vietnam.

Zaelany, A.A. dkk. (2007). "Persepsi Tiga Stakeholder terhadap Pekerjaan Nelayan Bom Ikan di Pulau Barrang Lompo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam : Jurnal Pesisir dan Lautan. Volume 7, no.2. Bogor : PKSPL – IPB

Zaelany, A.A. dan Wahyono, A. (2011). "Konflik Pengelolaan Konservasi Laut Coremap dengan Adat di perairan Buton" dalam Masyarakat Indonesia edisi XXXVI, No.2 hlm.157-180

PUSAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN KEBUDAYAAN
LIPI